LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i - i
DAFTAR ISI..... i - ii
BAB I PENDAHULUAN..... I - 1
A. Dasar Hukum..... I - 1
B. Gambaran Umum Daerah..... I - 1
C. Kondisi Geografis Daerah..... I - 2
1. Batas Administrasi Daerah……I - 2
2. Luas Wilayah…….. I - 2
3. Topografis dan Hal Lain Yang Dianggap Perlu……. I - 3
D. Gambaran Umum Demografis .....I - 4
E**. Kondisi Ekonomi**..... I - 6
a. Potensi Unggulan Daerah..... I - 6
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)..... I - 16

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)..... II - 1
A. Visi dan Misi.....II - 1
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah..... II - 1
C. Prioritas Daerah..... II - 8

BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ..... III - 1
A. Urusan Kongruen..... III - 1
a. Ringkasan Urusan Wajib..... III - 1
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana..... III - 1
2. Program dan Kegiatan..... III - 2
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal..... III - 70
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional..... III - 73
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran..... III - 74
6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah..... III - 75
7. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan ..... III - 78
8. Permasalahan dan Solusi..... III - 79
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... III - 80
b. Ringkasan Urusan Pillihan..... III - 80
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana..... III - 80
2. Program dan Kegiatan..... III - 80

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional..... III - 89
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran..... III - 89
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah..... III - 90
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan ..... III - 90
7. Permasalahan dan Solusi..... III - 91
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... III - 91

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya)..... III - 91
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana..... III - 92
2. Program dan Kegiatan..... III - 92
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional..... III - 133
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran..... III - 133
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah..... III - 134
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan ..... III - 135
7. Permasalahan dan Solusi..... III - 135
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... III - 135

C. Ringkasan Urusan Umum (Kesbangpol)..... III - 136
1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana..... III - 136
2. Program dan Kegiatan..... III - 136
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional..... III - 141
4. Alokasi dan Realisasi Anggaran..... III - 142
5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah..... III - 142
6. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan ..... III - 142
7. Permasalahan dan Solusi..... III - 142
8. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... III - 142

D. Indikator Kinerja Kunci..... III - 143
1. Tataran Pengambil Kebijakan..... III - 143
2. Tataran Pelaksana Kebijakan..... III - 143
   1) Administrasi Umum (8 Aspek) ..... III - 143
   2) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan..... III - 143
3. Urusan Pemerintahan Umum
4. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan..... III - 143

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018..... IV - 1

BAB V TUGAS PEMBANTUAN..... V - 1
A. Tugas Pembantuan yang diterima..... V - 1
1. Dasar Hukum..... V - 1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan..... V - 1
3. Program dan Kegiatan..... V - 1
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... V - 1
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan..... V - 1
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan..... V - 1
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..... V - 1
8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan..... V - 1
9. Permasalahan dan Solusi..... V - 1
10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... V – 1

B. Tugas Pembantuan yang diberikan..... V - 1
1. Dasar Hukum..... V - 1
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantukan..... V - 1
3. Sumber dan Jumlah Anggaran..... V - 2
4. Sarana dan Prasarana..... V I- 2

BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..... VI - 1
A. Kerjasama Antar Daerah..... VI- 1
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ..... VI - 1
1. Mitra Yang Diajak Kerjasama..... VI - 1
2. Dasar Hukum..... VI - 1
3. Bidang Kerjasama..... VI - 1
4. Nama Kegiatan..... VI - 2
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah..... VI - 2
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..... VI - 2
7. Jumlah dan Sumber Anggaran..... VI - 3
8. Jangka Waktu Kerjasama ..... VI – 3
9. Hasil Output Kerjasama ..... VI – 3
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... VI - 4
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah ..... VI - 4
1. Forum Koordinasi..... VI - 4
2. Materi Koordinasi..... VI - 5
3. Instansi Vertikal yang Terlibat..... VI - 5
4. Sumber dan Jumlah Anggaran..... VI - 5
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan

Instansi Vertikal Di Daerah ..... VI - 5
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan..... VI - 5
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan..... VI - 6
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi..... VI - 6
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi..... VI - 7
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan..... VI - 7

D. Pembinaan Batas Wilayah..... VI - 7
1. Sengketa Batas Wiilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi ..... V - 7

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana..... V - 18
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya..... V - 18
2. Status Bencana..... V - 18
3. Sumber dan Jumlah Anggaran..... V - 18
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana..... V - 20
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana..... V - 20
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan..... V - 21
7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana ..... V - 21
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi..... V - 22

F. Pengelolaan Kawasan Khusus..... V - 23
1. Jenis Kawasan Khusus..... V - 23
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus..... V - 23
3. Sumber Anggaran..... V - 23
4. Permasalahan yang Dihadapi..... V - 23
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana..... V - 23
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan..... V - 23

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum..... V - 23
1. Gangguan yang Terjadi..... V - 23
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana..... V - 23
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Golongan..... V - 23
4. Penanggulanan dan Kendalanya..... V - 25
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan..... V - 25
6. Sumber dan Jumlah Anggaran..... V - 26

BAB VII PENUTUP..... VI - 1

KATA PENGANTAR

Laporan Bupati Barito Selatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, pada prinsipnya LPPD adalah rangkuman Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan cermin kinerja Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Meskipun hakekatnya demikian namun kami sangat menyadari bahwa LPPD ini tidaklah dapat memuat secara keseluruhan dan rinci kegiatan dari urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, hal ini dikarenakan kompleksitasnya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat kami tuliskan secara satu persatu, oleh karenanya apa yang kami susun dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini merupakan hal-hal prioritas yang menurut kami perlu disampaikan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta bersama-sama berkerja sama memajukan Kabupaten Barito Selatan, semoga kerjasama kita selama ini yang telah terjalin dengan baik dapat menjadi dasar landasan kuat bagi penerus kita dalam memajukan Kabupaten Barito Selatan menuju Dahani Dahanai Tuntung Tulus, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai suatu pahala.

Buntok, Pebruari 2018

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No 101).
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1820).

B. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

Ibukota Barito Selatan terletak di Buntok yang terletak membujur disepanjang Sungai Barito. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalaimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km serta melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangkaraya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Barito Timur – Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan barang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Palangkaraya maupun Kota Banjarmasin. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan letak dan

posisi yang demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada 1º 20' LU-2º 35' dan 114º BT-115º BT, dengan luas wilayah 702.009,9 km². Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

1. Batas Administrasi Daerah

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

2. Luas Wilayah.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km².

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km², Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spatial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,9 hektar.

Luas Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas (km²)	% terhadap luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	662,16	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,73	19,51
3	Karau Kuala	825,23	11,76
4	Dusun Selatan	1.133,47	16,15
5	Dusun Utara	1.271,64	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.757,86	25.04
Jumlah		**7.020.09**	**100**

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

3. Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua.

Berdasarkan formasi batuannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuannya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada jumlah sebaran hunian penduduk, sebagaimana tabel berikut :

Jumlah Bangunan Rumah Tempat Tinggal Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Rumah	Keterangan
1.	Jenamas	2.322	
2.	Dusun Hilir	2.524	
3.	Karau Kuala	3.939	
4.	Dusun Selatan	16.704.	
5.	Dusun Utara	4.253	
6.	G.B.Awai	1.908	
Total Rumah		**31.650**	

Sumber : LPPD Kecamatan 2018

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2018 berjumlah 130.330 Jiwa dengan kepadatan penduduk 15 jiwa/Km2 yang menyebar di 6 Kecamatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

Jumlah Kepala Keluarga menurut Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

No.	Kabupaten	Jumlah Kepala Keluarga	Keterangan
1.	Barito Selatan	40.516	
	Total	**40.516**	

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2018

Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4.469	4.357	8.826
2.	Dusun Hilir	8.063	7.489	15.552
3.	Karau Kuala	7.865	7.528	1.5393
4.	Dusun Utara	8.790	8.154	1.6944
5.	G. Bintang Awai	9.570	8.872	18.442
6.	Dusun Selatan	28.210	26.963	55.173
Jumlah		**66.967**	**63.363**	**130.330**

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2018

Struktur Penduduk Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

STUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	4.617	4.231	8.848
5-9	5.198	4.824	10.022
10-14	5.572	5.157	10.729
15-19	6.213	5.870	12.083
20-24	5.823	5.242	11.065
25-29	5.528	5.437	10.965
30-34	5.632	5.547	11.179
35-39	6.203	5.921	12.124
40-44	5.454	5.095	10.549
45-49	4.878	4.551	9.429

STUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
50-54	3.780	3.556	7.336
55-59	3.104	2.836	5.940
60-64	2.082	1.945	4.027
65-69	1.254	1.243	2.497
70-74	700	850	1550
>75	929	1.058	1.987
TOTAL	**66.967**	**63.363**	**130.330**

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2018

Jumlah Kepala Keluarga menurut Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jenamas	2.380	372	2.752
2.	Dusun Hilir	4.193	625	4.818
3.	Karau Kuala	4.179	711	4.890
4.	Dusun Utara	4.525	694	5.174
5.	Gunung Bintang Awai	4.939	681	5.620
6.	Dusun Selatan	14.760	2.502	17.262
Total		**34.976**	**5.540**	**40.516**

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2018

E. KONDISI EKONOMI

Kondisi perekonomian Barito Selatan pada tahun 2018 didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini m melienunjukan bahwa daerah ini sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sumber daya alam.

Potensi pengembangan wilayah Kabupten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan pertanian yang menjadi sektor prima meliputi : tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

a. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah yang keberadaannya tersebar diberbagai sektor adalah :

1) **Sektor Pertanian dan Perkebunan**.

a. **Padi *:***

Produksi padi sawah dan padi ladang merupakan produk utama sektor tanaman pangan. Kantong produksi padi sawah terbesar pada Kecamatan Dusun Selatan dan Kantong produksi padi lading di Kecamatan Gunung Bintang Awai.

- Peluang usaha dan pemasaran : Sangat menjanjikan dan masih terbuka.
- Kondisi saat ini : Sentra produksi tersebar di semua Kecamatan seluas ± 7.150 ha dengan produksi ± 23.767,25 ton gabah kering panen (GKP).
- Pengembangan : Pada tahun 2018 dengan dibangunnya Bendungan D.I Uwang dan Jaringan Irigasi di Kecamatan Gunung Bintang Awai dimungkinkan akan menambah luasan sawah. ± 5.000 ha dengan pola SL-PTT padi yang terbagi dalam 2 musim tanam,yaitu April-September 2015 dan Oktober 2015-Maret 2016, yang berhasil panen ± 4.575 ha dengan produksi ± 14.558 ton yang di sebabkan oleh adanya kekeringan pada musim tanam April-September dan banjir pada musim tanam Oktober-Maret.
- Investasi yang diperlukan : benih/bibit dan saprodi.
- Pemasaran : Pedagang pengumpul dari Kalimantan Selatan/Bulog siap menampung asalkan produksi kontinyu .

b. **Jagung :**

Produksi jagung tersebar di 6 Kecamatan yang masa tanamnya pada waktu kemarau.

- Peluang usaha dan pemasaran : cukup baik

- Kondisi saat ini : sentra produksi tersebar di Kecamatan Gunung Bintang awai dan Kecamatan lainnya seluas ± 284 ha, luas panen ± 190 ha dengan produksi ± 532 ton.
    - Pengembangan : dikembangkan di Kec. GB. Awai dan Kecamatan lainnya seluas ± 108 ha.
    - Investasi yang diperlukan : Modal usaha.
    - Pemasaran : untuk pasar lokal cukup menjanjikan karena yang dikembangkan adalah jagung manis dan jagung lokal (sayur).

c. Kedele

- Peluang usaha dan pemasaran : cukup baik
- Kondisi saat ini : sentra produksi tersebar di Kecamatan GB. Awai dan Kecamatan Dusun Utara seluas ± 41 ha dengan produksi ± 12,65 ton.
- Pengembangan : di Kec. GB. Awai dan Kec. Ds. Utara seluas ± 52 ha.
- Investasi : Modal usaha.
- Pemasaran : Pedagang pengumpul

d. Ubi Kayu

- Peluang usaha dan pemasaran : cukup baik
- Kondisi saat ini : Tersebar di 6 Kecamatan seluas ± 287 ha dengan produksi ± 1.850,52 ton.
- Pengembangan : di Kec. GB. Awai, Kec. Ds. Utara dan Kec. Ds. Selatan seluas ± 94 ha.
- Investasi yang diperlukan : Modal usaha dan pengolahan hasil.
- Pemasaran : Saat ini masih kebutuhan konsumsi rumah tangga/makanan ringan.

e. Nanas Perigi

- Peluang usaha dan pemasaran : masih terbuka
- Kondisi saat ini : tersebar di Kecamatan Dusun Selatan seluas ± 47,19 ha dengan produksi ±

35.391,84 ton (namun masih sebagai tanaman selain karet).

- Pengembangan : di kembangakan di Kecamatan Dusun Selatan seluas ± 42 ha.
- Investasi yang diperlukan : Modal Usaha dan pengolahan hasil.
- Pemasaran : Saat ini masih buah segar untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan di pasarkan ke daerah Kalimantan Selatan.

f. Sayuran Dataran Rendah (SDR)

- Peluang Usaha dan Pemasaran : sangat baik
- Kondisi saat ini : Sentra produksi tersebar di Kecamatan Dusun Selatan dan GB. Awai seluas ± 325 ha dengan produksi ± 650 ton.
- Pengembangan : di kembangakan di Kecamatan Dusun Selatan dan GB. Awai seluas ± 325 ha.
- Investasi yang diperlukan : Modal usaha tani.
- Pemasaran : Pasar dalam daerah dan luar daerah atau Kabupaten lainnya sangat terbuka dan masih membutuhkan pasokan.

g. Karet

- Peluang usaha dan pemasaran : masih terbuka luas
- Kondisi saat ini : sentra produksi tersebar di 6 (enam) Kecamatan seluas ± 32.494 ha dgn produksi ± 23.930 ton.
- Pengembangan : dikembangkan di 6 Kecamatan seluas ± 200 ha tahun.
- Investasi yang diperlukan : Bibit unggul okulasi.
- Pemasaran : Pabrik Pengolahan Karet PT. Bumi Asri Pasaman (PT.BAP) di desa Danau Sadar dan pedagang pengumpul.

h. Coklat

- Peluang usaha & pemasaran : Luar daerah (khusus Sul-Sel)
- Kondisi saat ini : Sentra produksi tersebar di Kecamatan GB. Awai seluas ± 192,5 ha dengan produksi ± 77,28 ton.
- Pengembangan : di kembangkan di Kecamatan GB. Awai dan Ds. Selatan
- Investasi yang diperlukan : sarana produksi pertanian/pengolahan hasil.
- Pemasaran : pedagang pengumpul yang datang ke lahan.

2) Sektor Perikanan dan Peternakan

a. Budidaya Ikan di Kolam dan Keramba

Perkembangan kegiatan perikanan mengalami peningkatan pada usaha budidaya ikan di karamba dan jaring apung. Walaupun terjadi kemarau dan kabut asap, tetapi jumlah unit karamba dan hasil produksinya tetap meningkat setiap tahun. Untuk usaha budidaya ikan di kolam dan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum mengalami penurunan disebabkan adanya kemarau panjang dan kabut asap. Perkembangan luas areal budidaya dan produksi perikanan di Kabupaten Barito Selatan seperti pada tabel berikut :

Perkembangan Luas Areal Budidaya dan Produksi Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 – 2015 *)

No.	Jenis Produksi Perikanan	Luas Areal (Ha/Unit)		Produksi (Ton)		Perkem-bangan (%)
		2014	2015	2014	2015	
1.	**Budidaya Perikanan** - Kolam (Ha)	270,00	224,00	2.295,00	1.899,75	(17,22)
	- Karamba/Jaring Apung (unit)	9.804,00	10.883,00	5.882,40	6.530,34	11,01
2.	**Penangkapan Ikan (PU)** (Sungai, Danau, Rawa) Ha.	312.920,00	312.920,00	6.053,93	5.997,30	(0,94)
Jumlah				**14.231,33**	**14.427,39**	**1,38**

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan 2015

b. Penggemukan Sapi Potong dan Kerbau Rawa

- Peluang usaha dan pemasaran : sangat baik dan masih terbuka luas
- Kondisi saat ini : sentra produksi tersebar di Kecamatan Jenamas seluas ± 13.309 ha dengan produksi ± 25,98 ton.
- Pengembangan : dikembangkan di Kecamatan Jenamas seluas ± 10 ha.
- Investasi yang diperlukan :
  - Revitalisasi padang gembala kerbau di Desa Tampulang.
  - Pemagaran Lokasi ternak
  - Pengembangan industri rumah tangga produk olahan (dendeng, abon, bakso).
- Pemasaran : Peternak menjual kerbau hidup ke luar daerah (Provinsi Kalimantan Selatan) yang permintaannya tinggi, sementara untuk dalam daerah permintaan terbatas karena masyarakat tidak terbiasa mengkonsumsi daging kerbau, kecuali untuk kegiatan adat/ritual keagamaan.

c. Budidaya Ternak Unggas

Budidaya itik dan ayam buras untuk Kabupaten Barito Selatan masih jauh dari harapan, sebagian peternak sebagian besar mendatangkan itik dan ayam buras dari kabupaten tetangga.

3) Sektor Perindustrian dan Perdagangan

a. Industri Penggergajian Kayu

Meskipun pada kenyataannya hutan produktif belum tereksploitasi seluruhnya dengan baik, tanpa melanggar

ketentuan yang ada mengenai larangan *ilegal logging* industri penggergajian kayu masih dapat dilakukan.

b. Industri Pengolahan Kayu/Meubel

Mengingat sulitnya memperoleh bahan baku berupa supply kayu masak untuk pengolahan kayu/meubel, usaha industri pengolahan kayu masih dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan di bidang perkayuan/ kehutanan bekerjasama dengan pemilik ijin usaha hutan rakyat atau HPH guna memperoleh bahan baku dan memperlancar proses distribusi/ penyaluran sentra-sentra industri pengolahan.

c. Industri pengolahan Getah Karet

Secara umum pemasaran hasil sadapan berupa lateks oleh petani dilakukan dalam wujud slab atau lump. Pada saat ini, di Kabupaten Barito Selatan terdapat perusahaan yakni PT. Bumi Asri Pasaman (PT.BAP) lokasi operasi berada di Desa Danau Sadar. Perusahaan ini operasional pada tahun 2018 dengan kapasitas mencapai 3.500 ton/bulan.

d. Industri Rotan

Rotan merupakan salah satu produk unggulan di Kabupaten Barito Selatan, namun karena minimnya pengerajin rotan yang ada maka hampir seluruh produksi hasil tanaman rotan dijual mentah ke luar daerah.

e. Usaha Aneka Industri (Industri pembuatan kompor, panci, dll)

Sampai dengan saat ini, di Kabupaten Barito Selatan pengrajin usaha aneka industri masih sangat sedikit jumlahnya, sebagian besar kebutuhan industri untuk rumah tangga misalnya kompor, panci dll seluruhnya masih didatangkan dari luar daerah.

f. **Usaha Industri (Pembuatan arang kayu**)

Sulitnya bahan baku kayu, menyebabkan masih sedikitnya pelaku usaha di bidang industri pembuatan arang

kayu, padahal kebutuhan akan arang kayu untuk bahan bakar di Kabupaten Barito Selatan bagi konsumsi rumah tangga, rumah makan/restoran cukup besar.

g. Industri Rumah Tangga (Pembuatan Kerupuk Ikan/Tepung, Keripik, dll)

Meskipun pasar yang ada cukup luas, namun belum banyak yang menekuni bidang usaha rumah tangga (*home industry*) ini karena keterbatasan modal usaha, mesin/ peralatan produksi, Sumber Daya Manusia baik sebagai pekerja maupun pelaku wira usaha, serta keterbatasan pengetahuan maupun akses pemasaran.

h. Usaha Perdagangan (barang dan Jasa)

Selain Plaza Beringin Buntok dan juga Mini Market sebagai sentra perdagangan, juga didukung oleh pasar lainnya yang keberadaannya tersebar di berbagai wilayah kecamatan, desa/kelurahan.

4). Potensi Unggulan Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata

a. Kebudayaan

Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adat – istiadat masyakarat Dayak pada umumnya. Perbedaan antar daerah dipengaruhi adat – istiadat pada anak Suku Dayak yang beragam di Kabupaten Barito Selatan, antara lain Suku Dusun, Suku Maanyan, Suku Bakumpai, Suku Biaju dan lainnya. Budaya merupakan cermin jati diri bangsa yang bermartabat, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dapat mewujudkan peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang sistematis, terarah dan menyeluruh di wilayah kabupaten barito selatan.

Pembangunan Kebudayaan dan kehidupan beragama sangat penting dan terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat barito selatan sesuai

dengan Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyakarat indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai – nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai – nilai kebangsaan.

b. Pariwisata

Untuk sektor pariwisata, dilakukan melalui pengembangan objek Wisata Dayung Danau Sadar, Danau Sanggu pengembangan tempat rekreasi hiburan taman kota, pengembangan wisata ekosistem air hitam, dan pengembangan wisata Danau Malawen.

Sektor pariwista yang dapat dikembangkan diantaranya objek wisata danau sadar, danau malawen, danau sanggu serta pelestarian budaya Dayak Dusun, Dayak Ma,anyan situs-situs suku Dayak Bawo, Sungai Ayuh dan Gunung Bawo sebagai kawasan cagar budaya , Dusun terapung Bambaler di Kecamatan Dusun Selatan sebagai kampung budaya dayak Bakumpai, Desa/ Danau Madara di Kecamatan Dusun Selatan sebagai desa budaya dayak

Ma'anyan, Desa/Danau Bundar di Kecamatan Dusun Utara sebagai desa dayak Ma'anyan, dan Desa Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir) sebagai desa budaya dayak Bajajo.

Selain itu, terdapat potensi wisata alam, kawasan Bumi Perkemahan Pramuka "Lalemo Lewas" Sababilah sebagai kawasan hutan anggrek alami, Danau Sadar, Danau Malawen-Pamait-Sababilah sebagai kawasan wisata konservasi wisata kuliner dan wisata petualangan/permainan air dalam kota, Desa Tampulang dan kawasan hutan di sekitarnya di Kecamatan Jenamas sebagai pusat konservasi kerbau rawa, pengembangan habitat orang utan/bekantan lokasi antara sungai Puning-Mangkatip di Kecamatan Dusun Hilir sebagai hutan wisata, ekosistem Air Hitam Sungai Puning lokasi antara Desa Batilap-Desa Batampang di Kecamatan Dusun Hilir sebagai kawasan hutan alami desa, pengembangan habitat orang utan di Desa Madara di Kecamatan Dusun Selatan sebagai kawasan hutan konservasi alami desa, pemanfaatan panorama asli pegunungan Bawo di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai kawasan lintas hutan alam, kawasan Liang Lempeng di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebagai kawasan wisata gua dan petualangan alam, serta objek Jembatan Kalahien, Danau Hante-Parigi di Kecamatan Dusun Selatan sebagai kawasan wisata pancing dan perkotaan.

5). Sektor Kehutanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan (RTRWK) Tahun 2014 maka fungsi dan peruntukan hutan di Kabupaten Barito Selatan seperti pada tabel berikut :

Fungsi dan Peruntukan Hutan di Kabupaten Barito Selatan

No.	Fungsi dan Peruntukan	Luas Area (Ha)	Keterangan
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	85.070.272	
2.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	93.378.869	
3.	Hutan Lindung (HL)	82.707.457	
4.	Hutan Suaka Alam / KP	76.829.517	
5.	Hutan Produksi (HP)	203.445.391	
6.	Areal Penggunaan Lain (APL)	144.971.117	
7.	Sungai	15.607.277	
Jumlah		**702.009.900**	

Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Barito Selatan Tahun 2015

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonominya yang tercermin melalui nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), untuk Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel-tabel di bawah ini

PDRB Perkapita Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2010 – 2018

Tahun	PDRB Perkapita	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2010	2.219,34	972,67
2011	2.517,32	1.030,80
2012	2.837,03	1.094,44
2013	3.204,51	1.165,04
2014	4.068,15	3.378,92
2015	4.443,1	3.554,1
2016	4.889,2	3.754,0
2017	5.428,6	3.973,2
2018	***Dalam proses penghitungan***	

Sumber : Barito Selatan dalam Angka 2010-2018

PDRB Per Sektor Kabupaten Barito Selatan (Milyar Rupiah) Tahun 2018

No	SEKTOR	Harga Berlaku	Harga Konstan	Ket.
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan*)	1.020,2	708,8	
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.020,3	9249,9	
3.	Industri Pengolahan*)	357	238,3	
4.	Pengadaa Listrik, Gas	2,6	2	
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,4	5	
6.	Konstruksi	357,3	249,9	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	445,3	312,8	
8.	Transportasi dan Pergudangan	617,4	450,2	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	114,8	74,6	
10.	Informasi dan Komunikasi	69	57,6	
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	259,3	171,5	
12.	Real Estate	124,8	80,4	
13.	Jasa Perusahaan	1	0,6	
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	368,1	237,3	
15.	Jasa Pendidikan	394,8	245,7	
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,8	103,6	
17.	Jasa Lainnya	115,5	73,6	
	TOTAL PDRB*)	**5.428,6**	**3.973,2**	

Sumber : BPS Kab. Barsel 2018

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2011, 2012, 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tahun	Laju Pertumbuhan			
	Primer	Sekunder	Tersier	PDRB
2018	*Dalam Proses Penghitungan*			
2017				*5,84*
2016				*5,62*
2015				*5,54*
2014				*5,31*
2013	3.35	8.89	7.84	6.45
2012	3.84	6.35	7.76	6.16
2011	2.80	5.13	8.60	5.98
2010	3.13	7.03	7.78	5,90

Sumber : BPS Barito Selatan

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010 - 2018

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)		Pertumbuhan (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
2018	*Dalam Proses Penghitungan*			
2017	*5.428,6*	*3.973,2*	*5,84*	
2016	*4.889,2*	*3.754,0*	*5,62*	
2015	*4.443,1*	*3.554,1*	*5,54*	
2014	*4.079,6*	*3.367,5*	*5,31*	
2013	3.204,51	1.165.05	-	6,45
2012	2.843,21	1.093,62	-	6,09
2011	2.517,32	1.030,80	-	5,98
2010	2.219,34	972,67	-	5.90

Sumber : BPS Barito Selatan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eavaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai kedaan yang diingikan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat Pilkada.

Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan **Visi** Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebagai berikut : ***" Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa".***

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu : **1) Maju; 2) Mandiri; 3) Sejahtera;** dan **4) Daya Saing** yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan Yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata dan Padu)**.

Adapun yang dimaksud dengan ***Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata*** adalah :

1. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Peningkatan dukungan insfrastruktur***.***
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin serta berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Adapun yang dimaksud dengan ***Kabupaten Barito Selatan Yang Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa*** adalah :

1. Tercipatanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayan dan keyakinan msing-masing.
3. Terjaminya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekenomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat.

Misi merupakan upaya umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders*

pembangunan yang dirumuskan kedalam 5 (lima) Misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun dan membenahi insfrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah ruang terbuka hijau dan lain-lain) dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup mmasyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan insfrastruktur pendukung perekonomian.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat.
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Berdasarkan Visi dan Misi tersebutt diatas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan. Masing-masing Misi Pembangunan terdiri dari minimal satu atau lebih Tujuan Pembangunan, dan dari masing-masing Tujuan Pembangunan terdiri dari beberapa Sasaran Pembangunan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada, telah dirumuskan sebanyak 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan dan sebanyak 47

(empat puluh tujuh) Sasaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

1) **Misi 1 : Membangun dan membenahi insfrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, smapah ruang terbuka hijau dan lain-lain) dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran**. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 7 (tujuh) Sasaran Pembangunan yaitu :

   1. **Tujuan pertama pada Misi 1 adalah** : "Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan insfrastruktur dasar wilayah", terdiri dari 5 (lima) Sasaran Pembangunan.

      1.1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.

      1.2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.

      1.3. Meningkatnya cakupan layanan air minum.

      1.4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.

      1.5. Meningkatnya ketersediaan Jaringan irigasi bagi pengembangan sector pertanian.

      1.6. Pencapaian Kawasan Kumuh, dan

      1.7. Sanitasi Layak.

2) **Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.** Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 8 (delapan) Sasaran Pembangunan yaitu :

   1. **Tujuan Pertama pada Misi 2 adalah :** "Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan", terdiri dari 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu :

1.1. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.
1.2. Menurunnya angka kematian bayi.
1.3. Menurunnya angka kematian ibu.
1.4. Menurunnya angka gizi buruk, dan
1.5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).

2. **Tujuan Kedua pada Misi 2 adalah :** "Meningkatnya kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan", terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   2.1. Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan.
   2.2. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
3. **Tujuan Ketiga pada Misi 2 adalah :** "Meningkatnya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong ketentraman dan kerukunan daerah", terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
   3.1. Meningkatnya Pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3) **Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan insfrastruktur pendukung perekonomian.** Terdiri dari 9 (Sembilan**)** Tujuan Pembangunan dengan 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. **Tujuan Pertama pada Misi 3 adalah** : "Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat", terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
   1.1. Meningkatnya produksi hasil pertanian.
2. **Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah** : "Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat", terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu :
   2.1. Meningkatnya produksi Hasil Perikanan.

2.2. Meningkatnya Konsumsi Ikan.

2.3. Pengelolaan Sumber Daya Alam.

3. **Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah** : “Mengembangkan sektor Ketahanan Pangan yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu :

   3.1. Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan.

   3.2. Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapital.

   3.3. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

4. **Tujuan Keempat pada Misi 3 adalah** : “Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :

   4.1. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.

   4.2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

   4.3. Menurunnya angka kemiskinan.

   4.4. Meningktnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

   4.5. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

   4.6. Meningkatnya daya beli masyarakat.

5. **Tujuan Kelima pada Misi 3 adalah** : “Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :

   5.1. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.

   5.2. Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll).

6. **Tujuan Keenam pada Misi 3 adalah** : “Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :

6.1. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. **Tujuan Ketujuh pada Misi 3 adalah** : “Meningkatkan kunjungan wisatawan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
   7.1. Terpasarnya pariwisata daerah.
8. **Tujuan Kedelapan pada Misi 3 adalah** : “Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pengembangan wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.
   8.2. Meningkatnya sektor ekonomi hijau.
9. **Tujuan Kesembilan pada Misi 3 adalah** : “Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   9.1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
   9.2. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

4) **Misi 4 : Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat kemandirian ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.** Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. **Tujuan Pertama pada Misi 4 adalah** : “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
   1.2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK dll).

2. **Tujuan Kedua pada Misi 4 adalah** : “Membangun pondasi kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
   2.1. Meningkatnya peran pemuda.
   2.2. Meningkatnya prestasi olah raga.
3. **Tujuan Ketiga pada Misi 4 adalah** : “Melestarikan dan menegakan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
   3.1. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

5) **Misi 5 : Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.** Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. **Tujuan Pertama pada Misi 5 adalah** : “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :
   1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
   1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
   1.3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
   1.4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
   1.5. Predikat penyelenggaraan pemerintah daerah.
   1.6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.
   .

C. PRIORITAS DAERAH

Program Pembangunan Daerah merupakan Program Kepala Daerah sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Guna mempertegas garis-

garis besar prioritas perencanaan pembangunan, maka program dan strategi daerah yang merupakan teknik pencapaiannya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 – 2022 tanggal 29 Desember 2017 yang terdiri dari **5 (Sapta) Program**, meliputi :

1. **Program Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana**

   Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 7 (tujuh) program pelaksanaan berupa :

   a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antar desa, dan kecamatan serta kabupaten.
   b. Peningkatan sarana air bersih.
   c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Barsel Terang.
   d. Peningkatan sarana transportasi air, darat dan udara.
   e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah.
   f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
   g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

2. **Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam**

   Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 7 (tujuh) program pelaksanaan berupa :

   a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan system pelayanan kesehatan yang murah dan mudah.
   b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan melahirkan dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu.
   c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat.

d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan adanya sekolah berstandar internasional.
e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD dan SMP di setiap desa serta menyiapkan Tenaga Pendidik dan pemberiann Beasiswa.
f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan.
g. Membangun sarana dan prasarana pembinaan generasi muda dan olah raga.

3. Program Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup.

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 6 (enam) program pelaksanaan berupa :

a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut :
   1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan serta pariwisata danau.
   2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian.
   3. Gunung Bintang Awai, pengelolaan industri pertambangan dan pertanian.
   4. Karau Kuala, pengembangan industri rotan berkualitas ekspor.
   5. Jenamas, pengembangan komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan.
   6. Dusun Hilir, pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor.
b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lokal menjadi wirausaha.
c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat.

d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi publik.
e. Mengembangan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata.
f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

4. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama, Sosial dan Budaya Yang Lestari

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 6 (enam) program pelaksanaan berupa :

a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalam agama.
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya.
c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat.
d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan bencana alam.
e. Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah.
f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.

5. Program Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 4 (empat) program pelaksanaan berupa :

a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.
b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi.

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Urusan Konkuren

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 5 Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan 6 Kecamatan.

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Secara garis besar Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib pada Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 terdiri dari 16 (enam belas) Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOP) yang melaksanakan 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib, dari beberapa Satuan Organisasi Pemerintahan Daerah (SOPD) tersebut ada beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang melaksanakan satu Urusan Wajib, dan sebagian Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang melaksanakan lebih dari satu Urusan Wajib, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Wajib

No	Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
1	*2*	*3*
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RSUD Jaraga Sasameh
3.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Penataan Ruang	

No	Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
1	*2*	*3*
6.	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Perumahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
8.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Ketenaga Kerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, PP dan PA
15.	Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	
16.	Perhubungan	Dinas Perhubungan
17.	Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
18.	Pertanahan	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
19.	Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
20.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, BPBD ,Kecamatan
21.	Statistik	Dinas Kominfo
22.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
23.	Sosial	
24.	Budaya	Dinas Pemuda, Olah raga, Pariwisata dan Kebudayaan
25.	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Perpustakaan	

2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh masing SOPD adalah sebagai berikut :

1) Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **10 (sepuluh) Program** dan **201 (dua ratus satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat Pertemuan dan konsultasi ke luar daerah
9. Pembinaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Selatan
11. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Hilir
12. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Utara
13. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Bintang Awai
14. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karau Kuala
15. Pelayanan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jenamas
16. Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Pertemuan Teknis
17. Pelaksanaan Pengelolaan Tambahan penghasilan Tunjangan Daerah PNS (Perubahan)
18. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah (Perubahan)
19. Pelaksanaan Inventarisir Barang dalam Rangka Pengelolaan Aset
20. Kegiatan Pengelolaan Laporan Pajak
21. Pengelolaan Jaringan Internet dan Intranet
22. Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Profesi Guru
23. Pelayanan UPTD SKB Kabupaten Barito Selatan

24 Evaluasi Kinerja Jasa Kantor dan Tenaga Kependidikan
25 Peningkatan Kapasitas Tim Analisis Jabatan Dinas Pendidikan Kab. Barsel
26 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

2 Program *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Jasa Perencanaan Pembuatan RAB dan Gambar Sekretariat (Perubahan)
3 Pemeliharaan Mobil Dinas Roda 4 (empat) dan Bahan Bakar
4 Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting Struktur Organisasi dan Nomenklatur Dinas Pendidikan Kab. Barsel
5 Bantuan Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Dinas Pendidikan Kab. Barsel
6 Pemeliharaan Perabot Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barsel
7 Pengadaan Perabot Aula Dinas Pendidikan Kab. barsel
8 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
9 Penataan Halaman Kantor Dinas Pendidikan Kab. Barsel
10 Penyediaan Tanaman Hias Kantor
11 Pengadaan Pakaian PDH untuk Pegawai di 6 UPT Dinas Pendidikan Kab. Barsel
12 Pawai Pembangunan Kabupaten Barito Selatan
13 Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Barsel Expo Dinas Pendidikan
14 Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (Dua) dan Bahan Bakar
15 Penyebaran Informasi melalui sarana media cetak dan elektronik
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
17 Pengelolaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Barsel

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Jalur Diklat

5 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Lomba Kreativitas Anak PAUD
2 Pengelolaan Dapodik Jenjang PAUD
3 Implementasi K-13 Jenjang PAUD
4 Rehab Berat TK Teratai Gagutur
5 Jasa Konsultasi Bidang Pembinaan PAUD
6 Peningkatan Kelembagaan Lembaga PAUD (DAK Non Fisik)
7 Pengadaan Meubelair PAUD
8 Rehabilitasi TK Dharma Wanita Bangkuang
9 Pendataan PAUD Formal dan Non Formal 6 Kecamatan
10 Sosialisasi Pendidikan Keluarga Jenjang PAUD
11 Sosialisasi dan Pelatihan Akreditasi Lembaga PAUD
12 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD
13 Jasa Konsultan Perencanaan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
14 Jasa Konsultan Pengawasan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
15 Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD
16 Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Kayuh Baimbai Pamait
17 Rehabilitasi TK Agung Gamelan Penda Asam
18 Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Melati PGRI Mengkatip (2 ruang)
19 Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Santa Melania Tanjung Jawa (2 ruang)
20 Sosialisasi BOP PAUD DAK Non Fisik
21 Rehabilitasi WC PAUD di Kabupaten Barito Selatan
22 Peningkatan Kapasitas DAK BOP PAUD

23 Evaluasi Kinerja Guru PAUD Non Formal Kelompok Bermain

6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 DAK Bidang Pendidikan Dasar (DAK Fisik)
2 Pelaksanaan Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar (DAK Fisik)
3 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
4 Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SD Sederajat
5 Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) SD Sederajat
6 Pelaksanaan Tim Manajemen BOS SD Sederajat
7 Peningkatan Pelaksanaan Tim Pendataan dan Monitoring Siswa Miskin SD Sederajat
8 Penyelenggaraan Olimpiade Saint SD Sederajat
9 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SD Sederajat
10 Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang SD Sederajat
11 Pendataan Peserta UN dan Imput BNS Tingkat SMP Sederajat
12 Sosialisasi BOS / BOSDA SMP Sederajat
13 Pelaksanaan US / UN SMP Tingkat Kabupaten
14 Peningkatan Pelaksanaan Tim Manajemen BOS/BOSDA SMP
15 Pelaksanaan Kegiatan Tim Pendataan dan Monitoring Siswa Miskin SMP Sederajat
16 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMP Sederajat
17 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Seleksi Tingkat Kabupaten serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi
18 Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD) SMP Sederajat
19 Pengadaan Meubelair SMP se Kab. Barsel
20 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN 5 Dusun Selatan
21 Pembangunan Pagar Keliling SDN 4 dan 11 Buntok
22 Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar

23 Rehab RDKS SDN 1 Teluk Betung
24 Monitoring Kegiatan Sarana dan Prasarana
25 Pelaksanaan Tim Pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) SD Kabupaten Barito Selatan
26 Lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD Sederajat
27 Pelatihan Implementasi Kurikulum Jenjang SMP Sederajat
28 Penyuluhan Anti Narkoba, Kekerasan Seksual dan Pornografi SMP Sederajat
29 BimtekPalang Merah Remaja (PMR) SMP Sederajat
30 Bimtek Pengurus OSIS SMP Sederajat
31 Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN)
32 Kemah Siswa Nasional SMP Tingkat Kabupaten Barito Selatan
33 Tim Manajemen Pengelola PIP SMP
34 Gala-Siswa SMP
35 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N) SMP Sederajat Seleksi Tingkat Kabupaten, serta Pengiriman ke Tingkat Provinsi
36 Penyelenggaraan Olimpiyade Saint Nasional (OSN) SMP Sederajat Tingkat Kabupaten
37 Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP/SMPLB/MTs Sederajat
38 Pelaksanaan Pendataan dan Monitoring Penggunaan Dana BOS Jenjang SD Sederajat
39 Pembangunan Rumah Dinas Guru SMPN Satu Atap 3 Gunung Bintang Awai
40 Rehabilitasi Sedang Rumah Dinas Kepala Sekolah SMPN 3 Gunung BIntang Awai di Patas
41 Bimtek Bendahara BOS Jenjang SD Sederajat
42 Penataan Halaman SDN 3 Buntok
43 Rehabilitasi SDN 2 Lehai
44 Rehab SDN Teluk Telaga
45 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SDN 13 Buntok
46 Pengadaan Komputer Sekolah SMP di Kabupaten Barito Selatan
47 Penyusunan Akreditasi dan Kelembagaan SD
48 Rehab Rumah Dinas Guru SDN 2 Babai
49 Rehabilitasi SDN 2 Penda Asam

50 Rehabilitasi WC Sekolah di Kabupaten Barito Selatan
51 Rehab Berat / Peninggian SDN 2 Lembeng
52 Pelaksanaan US / UN SD Tingkat Kabupaten
53 Pelaksanaan TIM Manajemen BOS / BOSDA SMP Sederajat
54 Pelaksanaan Kegiatan TIM Monitoring BOS / BOSDA SMP Sederajat
55 Lomba Pengucapan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
56 Peningkatan Kapasitas Kurikulum 2013
57 Pembangunan 2 buah Ruang Kelas SMP IT Baiturrahman Buntok
58 Jasa konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawas Bidang Pembinaan Pendidikan SMP
59 Jasa Konsultan Perencanaan dan Jasa Konsultan Pengawas Bidang Pembinaan Pendidikan SD
60 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan SMP (Perubahan)
61 Konsultasi, Pertemuan Teknis Pembinaan dan Pemetaan Mutu Pendidikan SMP (Perubahan)
62 Rapat-Rapat konsultasi Pertemuan Teknis Ke Luar Daerah Bidang Pembinaan Pendidikan SD (Perubahan)
63 Survey Untuk Sistem Takola Sekolah Dasar (SD) (Perubahan)
64 Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Pendistribusian Soal Jenjang SD Sederajat (Perubahan)
65 Penyelenggaraan Festival dan Lomba Literasi Siswa Nasional (FL2N) SD/MI Sederajat (Perubahan)

7 Program Pendidikan Non Formal dan Informal

1 Pelaksanaan US / UN Keseteraan Paket A Setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA
2 Pelaksanaan Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI)
3 Pelaksanaan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten
4 Pembentukan dan Pembinaan Satuan Karya Pramuka WIDYA BUDAYA BAKTI
5 Tim Pengelola Program Pokok PKK

6 Monitoring dan Evaluasi Penerima BOP PAUD (Perubahan)

8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Pelaksanaan Sertifikasi Guru PAUD
2 Lomba Kepala Sekolah dan Guru PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten
3 Penilaian Angka Kredit Guru PAUD
4 Pelaksanaan POKJA Akreditasi PAUD dan PNF
5 Pengiriman Apresiasi PTK PAUDNI
6 Penilaian Angka Kredit Guru SD Sederajat
7 Pelaksanaan Sertifkasi Guru SD Sederajat
8 Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD Tahun 2018
9 Lomba Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tingkat SD Sederajat
10 Olimpiade Guru Nasional (OGN) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan
11 Peningkatan Mutu Profesional Guru Melalui Kelompok kerja Guru (KKG) di 6 Kecamatan
12 Sosialisasi Sertifikasi Guru SD
13 Penilaian Angka Kredit Guru SMP Sederajat
14 Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi Guru SMP Sederajat
15 Lomba Guru Berprestasi SMP dan Kepala Sekolah Berprestasi SMP
16 Bimbingan Teknis Penelitian Tindakan Sekolah SMP Sederajat
17 Bimtek Penelitian Tindakan Kelas SMP Sederajat
18 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Jenjang SMP
19 Bimtek Manajemen Kepala Sekolah SMP
20 Lomba Forum Ilmiah Guru SMP Sederajat
21 Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)
22 Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru Kabupaten Barito Selatan
23 Pendataan dan Verifikasi Guru PAUD di 6 Kecamatan
14 Pembelajaran Guru PAUD Berprestasi

25 Pemberkasan Verifikasi Bantuan Mahasiswa Berprestasi, Tidak Mampu serta Mahasiswa Kedokteran
26 Diklat Dasar Guru PAUD
27 Diklat Lanjutan Guru PAUD
28 Apresiasi PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tahun Anggaran 2018, untuk 6 Kecamatan se Barito Selatan
29 Olimpiade Sains Nasional Guru (ONSG) Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Barito Selatan
30 Diklat Penguatan Kepala Sekolah Jenjang SMP
31 Diklat Calon Kepala Sekolah Jenjang SMP
32 Seleksi Calon Kepala Sekolah Jenjang SMP
33 Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik PAUD
34 Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik SD
35 Evaluasi Kinerja Tenaga Pendidik SMP
36 Evaluasi Kinerja Guru Agama SD/MI Kab. Barsel
37 Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian dan Berkelanjutan SD
38 Evaluasi Kinerja Guru Agama SMP Sederajat
39 Evaluasi Kinerja Guru PAUD Formal
40 Seleksi Calon Kepala Sekolah Jenjang SMP (MOU) dengan LPMP Palangka Raya (Ketenagaan) (Perubahan)
41 Pembinaan dan Peningkatan Mutu Operator DAPODIK PAUD (Ketenagaan) (Perubahan)
42 Manajemen Tim Pengelola Aneka Tunjangan Kab. Barito Selatan (Ketenagaan) (Perubahan)
43 Monitoring dan Pembinaan Guru Jenjang SMP (Perubahan)

9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
4 Penyusunan dan Pembuatan Profil Pendidikan

5 Pembuatan Standar Operating Prosedur (SOP) dilingkungan Dinas Pendidikan
6 Pengolahan dan Pengelolaan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) pada Server Kemendikbud
7 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan Dinas Pendidikan
8 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Pendidikan
9 Rapat Kerja dan Sinkronisasi Perencanaan Pogram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10 Pengelolaan DAPODIKDAS dan PTK
11 Kapasitas dan Pengawasan, Pembinaan, serta Pemantauan Sekolah TK/SD dan Penilik PLS
12 Akreditasi Sekolah / Madrasah
13 Kegiatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan sekolah SMP Sederajat
14 Pelaksanaan Kompetensi dan Manajemen Kepengawasan TK/PAUD , SD dan SMP Sederajat
15 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat
16 Penyusunan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pendidikan Kab. Barsel
17 Musyawarah Kelompok Pengawas TK/SD dan SMP Sederajat
18 Kerjasama dengan Organisasi Vertical
19 Peningkatan Kompetensi dan Manajemen Pengawasan SD dan SMP Sederajat
20 Peningkatan Kapasitas Dewan Pendidikan
21 Evaluasi Kinerja Guru Non PNS Guru Agama dan Guru Olahraga

10 Program Pendidikan Tinggi

1 Peningkatan Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya
2 Bantuan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi
3 Bantuan Untuk Praktek / Koas Mahasiswa Kedokteran
4 Bantuan Untuk Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (Ketenagaan) (Perubahan)

2) Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **22 (dua puluh dua) Program** dan **121 (seratus dua puluh satu) Kegiatan** ditambah **Layanan Umum Daerah** yang terdiri dari **2 (dua) Program** dan **13 (tiga belas) Kegiatan** tersebut dibawah ini :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD
11 Monev di Puskesmas/Pustu/Poskesdes
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor (RSUD Jaraga Sasameh)
13 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Pengadaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK Dasar)
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Speedboat

3 **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1 Penyuluhan Bahaya Napza dan Penyakit Menular Seks (PMS)
2 Pembinaan dan Monev Penatausahaan Keuangan di Puskesmas
3 Kegiatan Seleksi Tenaga Kesehatan Non PNS
4 Registrasi, Sertifikasi dan Akreditasi
5 Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan dan Tersusunnya Standar Ketenagaan di Pelayanan Kesehatan
6 Monev Administrasi data Kepegawaian
7 Peningkatan Kapasitas SDM dilingkungan Dinkes
8 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
9 Peningkatan Kapasitas Nakes dengan uji Kompetensi

4 **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Feasibility Study (Studi Kelayakan) untuk Pesiapan Pembangunan Rumah Sakit Type B
3 Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas di Kab. Barsel
4 Inventarisasi Aset Dinas Kesehatan dan Jaringannya
5 Pendistribusian Alat Kesehatan Ke Puskesmas (Perubahan)
6 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
7 Kegiatan Penyelesaian Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2017
8 Sensus Aset dilingkungan dinas kesehatan dan UPTD

8 **Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**

1 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
2 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan E-Catalogue dan Non E-Catalogue (DAK Kefarmasian)

9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 Monitoring dan Pembinaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas dan Jaringannya
2 Pelayanan Kesehatan Dasar Penduduk Miskin
3 Penjaringan Kesehatan Indera Mata-Katarak atau Mulut-bibir Sumbing
4 Penyelenggaraan Pelayanan Upaya Kesehatan Haji
5 Monev Program Kesehatan Rujukan di Puskesmas
6 Pelayanan Kesehatan Masyarakat
7 Penyuluhan Bahaya Penyakit Menular Sex (PMS) dan HIV - AID pada Remaja
8 Penyuluhan Tentang PHBS (CTPS, Kesehatan Gigi) di Sekolah Dasar
9 Pengendalian Faktor Resiko PTM melalui Posbindo (Pos Pelayanan terpadu)PTM
10 Lomba Balita Indonesia (LBI)
11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Labkesda Kab. Barito Selatan
12 Biaya Tarif Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas
13 Sosialisasi dan monitoring evaluasi program Keluarga Sehat (KS)
14 pelatihan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
15 Pelayanan penyediaan Darah bagi masyarakat
16 Sosialisasi, Bimtek,Pelacakan Kasus, Deteksi Dini, Pertemuan Keswa, ODGJ dan NAPZA
17 Kegiatan Iuran BPJS
18 Peningkatan Kapasitas Puskesmas
19 Peningkatan Kapasitas Pustu dan Poskesdes
20 Peningkatan Kapasitas Labkesda Kab. Barsel

10 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 Pengawasan dan Pembinaan Apotik, Toko Obat dan Pelayanan Kefarmasian Lainnya

11 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (PHBS)
2 Pengembangan Media Promosi dan Informasi tentang kawasan tanpa asap rokok
3 Penyampaian Informasi di Bidang Kesehatan Pada BARSEL EXPO
4 Promosi Program Kesehatan dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat
5 Sosialisasi Germas
6 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi
7 Penyuluhan Bahaya Rokok
8 Sosialisasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
9 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang di Daftarkan oleh Pemerintah Daerah (DBH-CHT)

12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Peningkatan Kapasitas POKJA AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan) Kabupaten
2 Penyelenggaraan Review Studi EHRA Program PPSP
3 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tempat Pengolahan Makanan dan Depot Air Minum
4 Penyehatan TTU, TPM dan Limbah Medis Fasyankes, Pengawasan Kualitas Lingkungan
5 Penyelenggaraan STBM Kabupaten
6 Pelaksanaan Gerakan BASNO Kabupaten Barito Selatan dengan Meningkatkan Jumlah Desa ODF

13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
2 Desiminasi Informasi Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penularan HIV-AIDS Pada Perempuan Usia Produktif dan Ibu Hamil Melalui Konseling dan Tes Sukarela
3 Penemuan dan pengobatan Penderita Malaria (Program P2B2)
4 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik

5 Imunisasi Bayi, Bumil, WUS dan Anak Sekolah
6 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Fogging
7 Penemuan dan Pengobatan serta Pencegahan Kecacatan Penderita Kusta
8 Pencegahan Rabies
9 Penemuan dan Pengobatan Penderita TB-Paru (BTA Positif) dan Pembentukan pos TB Desa
10 KOMDA KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)
11 Implementasi KTR di 7 Tatanan kawasan tanpa rokok
12 Mobile VCT dan Pembentukan klinik VCT di FKTP
13 Pembentukan Pos TB Desa
14 Sistem Informasi Tuberculosis Terpadu (SITT) dan E-TB manager
15 Pengambilan sediaan darah / Mass Blood Survey (MBS)
16 Lomba Penilaian Kinerja Petiugas Imunisasi (LPKPI) tingkat puskesmas kabupaten barito selatan tahun 2018
17 Workshop / pelatiahan JURIM Tahun 2018
18 Supervisi suportiv
19 Penguatan Kapasitas Penanggung Jawab dan Pengelolaan Program TB
20 Monitoring dan Evaluasi Program Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang
21 Pencanangan Imunisasi MR (Measles and Rubbela)

14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

15 Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Survey Pemantauan Status Gizi dan Kadarzi
2 Survey Pemantauan Garam Beryodium
3 Pemantauan dan Pengawasan Pangan Kadaluarsa Hari-hari Besar
3 PMT- IHMKM, PMT Bumil, KEK, dan PMT Balita Gizi Kurang dan/Buruk

4 Peningkatan Kapasitas Pelacakan dan intervensi Kasus Gizi Kurang dan atau Gizi Buruk

16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)
2 Peningkatan Kapasitas Penelusuran Kasus Kematian Maternal/Balita

17 Program Peningkatan Mutu Layanan FKTP PUSKESMAS

1 Tim Survey Telaah Lapangan Terkait Perizinan Fasyankes di Kab. Barsel
2 Tim Peningkatan Kapasitas Akreditasi Puskesmas Tahun 2018

18 Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana FKTP PUSKESMAS

1 Kegiatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Sarana dan Prasarana Kesehatan

19 Program Kesehatan Ibu dan Anak , Gizi dan Kesehatan Keluarga,

1 Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Program Kesga dan Gizi
2 Sosialisasi dan Orientasi SHK
3 Pokja Pengendalian Kasus Kesga / Gizi
4 Orientasi Penjaringan Kesehatan Peserta Didik dan PKPR Bagi Nakes
5 Monitoring dan Evaluasi Program Gizi

20 Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

1 Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga ASN, Jema'ah Haji dan Masyarakat
2 Penyelenggaraan Kesehatan Keselamatan Kerja

21 Program Kegiatan DAK Fisik

1 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK Penugasan)

2 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (DAK Dukungan JKN)
3 Pelaksanaan Kegiatan DAK Dasar
4 Pelaksanaan Kegiatan DAK Farmasi

22 Program Kegiatan DAK Non Fisik

1 BOK Puskesmas
2 BOK Kabupaten
3 Distribusi Obat Dan E-Logistik
4 Akreditasi Puskesmas
5 Jampersal
6 Akreditasi Rumah Sakit

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

24 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD

PUSKESMAS BABAI - JKN

25 Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

1 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS BANGKUANG - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

2 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS BANTAI BAMBURE - JKN

3 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS BARU - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

4 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS BUNTOK - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

5 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS JENAMAS - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

6 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS KALAHIEN- JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

7 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS MENGKATIP - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

8 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS PATAS I - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

9 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS PENDANG - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

10 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS SABABILAH - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

11 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

PUSKESMAS TABAK KANILAN - JKN

Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

12 Biaya Dana Kapitasi (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tk. Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)

3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **16 (enam belas) Program** dan **65 (enam puluh lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
12 Pelaksanaan RAKORDA Lingkungan Hidup Tahun 2018
13 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Dalam Daerah
14 PertemuanTeknis dan Konsultasi Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 Pendataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris/Aset

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
3 Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian
4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Kerja SKPD

6 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan (Pengujian dan Survey)
2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup (Pembinaan Pengasapan Rotan)
4. Sinkronisasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
5. Peningkatan Kapasitas Payung Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
6. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup
7. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Limbah Domestik dan B3
8. Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas Peralatan Laboratorium

7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA
2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

8 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1. Pengelolaan Lingkungan Menuju Indonesia Hijau (MIH)

9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Pembuatan Baliho Informasi Lingkungan)
2. Peningkatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah
3. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan (Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah/ SLHD)
4. Sinkronisasi Penyusunan AMDAL / UKL-UPL
5. Penatalaksanaan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)

10 Program Pengendalian Kebakaran Hutan

1 Sinkronisasi dan Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan
2 Inventarisasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

12 Program Adiwiyata

1 Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup (Sosialisasi Menuju Sekolah Adiwiyata)
2 Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup

13 Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan

1 Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
3 DAK LH (Penugasan)
4 Penyediaan Sarpras Persampahan
5 Peningkatan Kapasitas DAK LH

14 Program Sarana dan Prasarana Kebersihan

1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
3 Perpanjangan STNK dan KIR Kelayakan Dump Truck/Arm Roll
4 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 Belanja Pengadaan Alat-alat Bengkel
6 Pemeliharaan Berkala Landasan Arm Roll

15 Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

1 Peningkatan Kapasitas UPTD
2 Peningkata Kapasitas Aparatur
3 Pemeliharaan Berkala TPA
4 Belanja Penggantian Spare Part/Suku Cadang Buldozer
5 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Volume
6 Pemeliharaan Periodik Alat Berat

16 Program Penataan Hukum / Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup

1 Pengawasan Penataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 Sinkronisasi Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
3 Pengaduan Sengketa Lingkungan
4 Pertemuan Teknis dan Investigasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

4) Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **18 (delapan belas) Program** dan **121 (seratus dua puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD
11 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Kebersihan
13 Pengelolaan Kegiatan Penyusunan Program
14 Penyediaan Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Aset Dinas PU

15 Penyediaan Kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) & SPM ke PU an
16 Penyediaan Penunjang UPTD Dinas PU
17 Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah
18 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - Alat Berat
3 Pengadaan Suku Cadang Alat - Alat Berat

3 Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan Pakaian Batik Kalteng
2 Pengadaan ID Card Pegawai
3 Pemeliharaan Mushola Kantor

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban SKPD

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
1 Penyediaan Pelayanan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan

7 Program pembangunan jalan dan jembatan
1 Pembangunan Jalan Dalam Desa Baru
2 Pengelolaan Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018
3 Pengawasan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
4 Penyusunan Database Jalan
5 Peningkatan SDM BinaMarga / Kursus Pelatihan Keteknikan Jalan dan Jembatan
6 Pengadaan Excavator
7 Pembangunan Badan Jalan dari RT. 23 - RT. 26 (Sei Bahalang)
8 Penyiringan Penimbunan dan Cor Beton Jalan Kelurahan Bangkuang RT. 16 s/d Rt. 22

9 Pembangunan Jalan Palu Rejo - Wayun - Simpang Tiga Ugang Sayu
10 Pembangunan Jembatan Majundre - Sei Telang
11 Pelebaran Jalan Bundaran Sanggu s/d Tugu Selamat Datang (ruas 141)
12 Peningkatan Jalan Provinsi - Pendang (ruas 164)
13 Peningkatan Jalan Asmawi A. Gani (Jl. Jelapat - Kp. Baru)
14 Peningkatan Jalan Mayor Pithel (Jl. Buntok - Mabuan - Kalahien)
15 Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Buntok - Kaladan
16 Peningkatan Jl. Tabak Kanilan - Km. 20 HPH
17 Pembangunan Jalan Ruas Jalan Buyui - Malungai Raya (Swakelola TMMD Tahun 2018)
18 Peningkatan Jalan KM. 20 HPH - Rampa Mea
19 Rehab Jembatan Tampa Tembus Jalan Asam - Jalan Pahlawan
20 Peningkatan Jalan Menuju SLB Sababilah
21 Peningkatan Jalan Komplek Pelajar Rt. 07/RT.8 Kelurahan Mengkatip
22 Pembangunan Jalan Desa Batampang
23 Pembangunan Jalan dari Rantau Bahuang ke Paminggir
24 Pembangunan Jalan Desa Lehai Menuju Desa Tampulangit
25 Peningkatan Jalan Pemangka Manggaris
26 Pengecoran Jalan Menuju Kuburan Muslimin Desa Sababilah
27 Pembangunan Jembatan Sungai Madami Desa Muara Ripung
28 Pembangunan Titian Penghubung Desa Murung Paken - Danau Masura
29 Pembangunan Jalan Usaha Tani Penungku Desa Danau Bambure
30 Peningkatan Jalan Dalam Desa Hulu Tampang RT. 09 s/d RT. 10 ke Desa Hulu Tampang +-3 KM
31 Pembangunan Jalan Desa Gunung Rantau menuju Danau Sarang Murung
32 Peningkatan Jalan Desa Talio
33 Pembuatan Jembatan Gantung Desa Sanggu

34 Pembangunan Jalan dari Kelurahan Pendang / Belakang Polsek Menuju Jalan provinsi +- 4Km
35 Peningkatan Jalan Kampung Baru - Teluk Telaga - Muara Talang - Jembatan Surapanji
36 Peningkatan Jalan Godfried Tumang (Ruas 062)
37 Peningkatan Jalan Sei Santangan Menuju Lokasi Objek Wisata Liang Santangan-Desa Sei Paken
38 Pembangunan Jalan Talekoi-Majundre
39 Peningkatan Jalan Jembatan Sei Ihi - Mantarem - Marawan Baru - Reong / Batas Barsel
40 Pembangunan Jalan Desa Marawan Lama - Danau Lelek - Bamanen 7Km
41 Peningkatan Jalan MTU - Kelurahan Bangkuang - Teluk Timbau - Damparan
42 Rehab Trotoar Depan Kantor Bupati Barito Selatan
43 Pembangunan Jalan Pakat Pahari I Menuju Desa Mahajandau
44 Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Sungai Ayuh Tabak kanilan

8 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1 Pembuatan Drainase Jalan AMD 3 Hilir Sper
2 Pembuatan Drainase Jalan Pahlawan Rt. 28 Buntok
3 Perbaikan Saluran Drainase Pasar Beringin
4 Pembangunan Drainase Jalan Pelita IV Buntok

9 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

10 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
2 Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (Swakelola)
3 Pengelolaan Kegiatan Bidang Sumber Daya Air
4 Inventarisasi Jaringan Irigasi dan Rawa tersebar di 6 Kecamatan (Swakelola)

11 Program Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa

1 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa

2 Peningkatan Kapasitas Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa

12 Program Pengembangan Air Minum

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan
3 Pembinaan SPAM Perdesaan
4 Pengelolaan Kegiatan Pamsimas
5 Peningkatan Pengelelolaan Kegiatan DAK Air Minum Tahun 2018
6 Penyusunan Perda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM

13 Program Pembangunan Prasarana Sanitasi

1 Pembuatan Prasarana Sanitasi
2 Peningkatan Pengelelolaan Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2018
3 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Baru SPALD Terpusat
4 Pengadaan Mobil Truck Tinja

14 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)

1 Prasarana Drainase Lingkungan
2 Prasarana Jalan Lingkungan
3 Pengelolaan Kegiatan Bidang Cipta Karya
4 Kegiatan Pelaksanaan PPSP Tahun 2018
5 Pemilihan Duta Sanitasi dan LPS
6 Pengawasan Kegiatan Bidang Cipta Karya

15 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

1 Pelayanan Perijinan IUJK dan Penyediaan Administrasi Jasa Konstruksi

2 Penyusunan Database Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten BaritoSelatan
3 PenyuluhanTerhadap Penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi
4 Pengelolaan Bidang Jasa Konstruksi
5 Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKT)
6 Diklat Teknis Pemberdayaan Apatur Bidang ke- PU-an

16 Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air

1 Peningkatan dan Perlindungan Sumber Mata Air Desa Mangaris

17 Program Bina Teknik / Program

1 Pengelolaan Bina Teknik / program
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring
4 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
5 Penyusunan Pelaporan E-Monitoring DAK
6 Penyusunan Basic Price
7 Pengelolaan Kegiatan Penunjang Bidang Infrastruktur
8 Survey dan Perencanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan pada Bidang Bina Marga
9 Survey Perencanaan Kegiatan Irigasi Rawa dan Non Rawa
10 Survey Perencanaan Kegiatan Bidang Cipta Karya
11 Pengalihan Fungsi Jalan Koridor Eks HPH menjadi Jalan Umum

18 Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas

1 Pembangunan Fasilitas Umum/Bangunan Gedung
2 Rehabilitasi Fasilitas Umum/Bangunan Gedung
3 Pengawasan Pendirian Bangunan dan Gedung

5) Urusan Wajib Penataan Ruang

Urusan Wajib Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **1 (satu) Program** dan **9 (Sembilan)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penataan Ruang Kabupaten

1 Kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
2 Kegiatan Penataan Ruang Kota dan Kawasan
3 Kegiatan Pengendalian Ruang Kota dan Kawasan
4 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penataan Ruang
5 Pengelolaan Bidang Penataan Ruang
6 Kegiatan Peningkatan Prasarana Pendukung Penataan Ruang Wilayah dan Kota

7 Konsultasi dan Validasi Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kota
8 Kegiatan Sosialisasi dan Lomba Tata Ruang
9 Kegiatan Konsultasi dan Penyusunan PERDA Tata Ruang

6) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **17 (tujuh belas) Program** dan **91 (sembilan puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11 Penyediaan Jasa Administrasi
12 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
13 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebeleur
2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
3 Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7 Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop
8 Pemeliharaan AC

9 Pengadaan AC Kantor

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
3 Penyusunan LPPD dan IKK
4 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA)
5 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
6 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB)
7 Pelaksanaan Aksi Penanganan dan Pencegahan Korupsi Daerah (Aksi PPK) Kab. Barito selatan

5 Program pengembangan data/informasi

1 Penyusunan profile daerah
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4 Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan
5 Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel
6 Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan
7 Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)
8 Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2017
9 Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama
10 Rapat / Pertemuan Teknis / Konsultasi Bidang Litbang, Perencanaan Program & Pengendalian
11 Rapat Pertemuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)

6 Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3 Forum Gabungan SKPD
4 Penyusunan Perubahan RKPD
5 Penyusunan RKPD Tahun 2018
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD
7 Penyusunan KUPA dan PPAS

7 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
3 Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi
4 Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten
5 Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan
6 Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan
7 Inventarisasi Kawasan Potensi Wisata
8 Identifikasi Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat
9 Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
10 Pendataan dan Pengembangan Koperasi Berbasis Kerakyatan
11 Konsultasi, Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi

8 Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1 Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2 Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an
3 Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

5 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perhubungan
7 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
8 Pengendalian dan Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur

9 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1 Mengikuti Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis, Sinkronisasi rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana

10 Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra

1 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan
3 Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes
4 Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2018
5 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program Pembangunan Desa

12 Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Kepemerintahan

1 Monitoring dana DAK TA. 2018 dan Perencanaan DAK Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
2 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa
3 Sosialisasi, Desiminasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
4 Monitoring Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
5 Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial
6 Asistensi Renja SKPD Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
7 Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)

9 Rapat-Rapat, konsultasi, Pertemuan Teknis, dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan

13 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

14 Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Wilayah Blank Spot Layanan/Jaringan Telekomunikasi Seluler

15 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang

1 Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya
2 Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel
3 Lanjutan Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai dan Danau
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah
5 Penyelenggaraan Tematik Data Spasial dan Geospasial Pengembangan Wilayah (Simpul Jaringan/KSP)
6 Penyusunan Peninjauan Kembali / Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan

16 Program Pemerintahan dan Nakertrans

1 Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja

17 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

1 Penyusunan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Kab. Barito Selatan

7) Urusan Wajib Perumahan

Urusan Wajib Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **16 (enam belas) Program** dan **75 (tujuh puluh lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
11 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
12 Pertemuan teknis dan konsultasi ke luar daerah
13 Pertemuan teknis dan konsultasi dalam daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Halaman/Taman Kantor (Swakelola)
2 Sensus Barang Milik Daerah

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Penyusunan Anjab, ABK dan SKP

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA)

6 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 Promosi, Publikasi, dan Ajang Pameran

7 Program Peningkatan Kapasitas Bidang Perumahan

1 Peningkatan Pelayanan Bidang Perumahan
2 Penigkatan SDM Bidang Perumahan

3 Survey Perencanaan Peningkatan/Pembangunan Kualitas PSU Kawasan Pengembang dan Kawasan Kumuh (Swakelola)
4 Pengawasan Peningkatan/Pembangunan Kualitas PSU Kawasan Pengembang dan Kawasan Kumuh (Swakelola)

8 Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Pengembang

1 Peningkatan/Pembangunan Drainase Perumahan Kawasan Pengembang
2 Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Kawasan Pengembang

9 Program Penataan dan Pemeliharaan Makam

1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Penataan dan Pemeliharaan Makam
2 Pembuatan Siring dan Pagar TPU Gang Air Mata Buntok
3 Pembuatan Siring Kuburan Katholik/Protestan Desa Bundar
4 Siring Timbun untuk Makam Muslimin RT. 04 di Desa Baru
5 Pembuatan Cor Jalan Menuju Makam Kuburan Muslimin Almukarramah RT. 03 Kamper
6 Pembangunan Siring Pemakaman Umum RT. 03 Desa Gagutur (Sei Talang)
7 Siring Timbun Kuburan Gang IAIN Jelapat
8 Pembuatan Jalan Menuju Kuburan Kristen Protestan Desa Bantai Bambure
9 Penataan Makam Muslimin Desa Teluk Mampun

10 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH

1 Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
2 Peningkatan kapasitas Pemeliharaan Peralatan RTH
3 Peningkatan Kapasitas Penertiban Kawasan RTH
4 Penataan Taman Median Jalan di Buntok Kec. Dusun Selatan
5 Pengadaan Bibit Tanaman Hias/Tanaman Langka

11 Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU

1 Penataan dan Pemeliharaan Lampu PJU Kota Buntok dan Sekitarnya
2 Pembangunan Gudang Bidang Kawasan Permukiman
3 Pemasangan Lampu PJU di Kelurahan Pendang Tahap II
4 Pemasangan Lampu PJU di Desa Bundar

5 Pemasangan Lampu di Komplek Pelajar
6 Pengadaan Lampu PJU (e-purchasing)
7 Survey/perencanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

12 Program Peningkatan kapasitas Bidang Kawasan Pemukiman

1 Peningkatan Pelayanan Bidang Kawasan Permukiman

13 Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni

1 Rehabilitasi RTLH Tersebar se Kabupaten Barito Selatan (Swakelola)

14 Program Peningkatan Perumahan Swadaya

1 Peningkatan Kapasitas Bantuan Perumahan Swadaya
2 Penunjang BSPS Pembangunan Baru (Perubahan)

15 Program Penataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh

1 Peningkatan/Pembangunan Drainase Perumahan Kawasan Kumuh
2 Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Kawasan Kumuh

16 Program Pembangunan Permukiman Perkotaan

1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pembangunan Permukiman Perkotaan
2 Survey dan Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Swakelola))
3 Pengawasan Kegiatan Pembangunan Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Perkotaan dan Drainase Kawasan (Konsultan)
4 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Rajawali Jl. AMD I Buntok
5 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Anggrek II Tembus Gang Pastoran Buntok
6 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Barito Raya I RT. 36 RW. 04 Jl. Barito Raya Buntok
7 Pemeliharaan Jalan Permukiman dan Lingkungan Dalam Kota Buntok (Swakelola)
8 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Dawit Karani Jl. Pelita IV Buntok
9 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Halaban Jl. H. Indar Buntok
10 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Leko Jl. Kaladan Buntok
11 Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Gang Seroja Jl. Teratai Buntok

12 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Batuntu Jl. Jelapat
13 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Nusa Indah I Jl. AMD I Buntok
14 Pembangunan Jalan Permukiman Gang Reformasi Tembus Gang Durian Jl. Kaladan Buntok
15 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Rumbia Jl. Buntok - Asam Buntok
16 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Sasapat Jl. Padat Karya Buntok
17 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Barito Raya II Jl. Barito Raya Buntok
18 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Ismail Jl. Buntok - Kaladan - Danau Ganting Buntok
19 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Rining Jl. Damang Ladar Buntok
20 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Palepek Jl. H. Indar Buntok
21 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Purnama A.3 Jl. Kaladan Buntok
22 Peningkatan Jalan Permukiman Gang Ayuh Tembus Gang Keluarga Jl. Agung Buntok
23 Peningkatan Jalan Menuju Bumi Perkemahan Lalemu Lewas

8) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **8 (delapan) Program** dan **31 (tiga puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD
13 Pengelolaan Barang dan Aset
14 Rapat-rapat Pertemuan Teknis dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Stadion Batuah, Stadion Sanggu dan Stadion Danau Sadar

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
2 Kegiatan Kepemudaan dalam rangka Sumpah Pemuda
3 Kegiatan Drum Corp Daha Tutu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
4 Kegiatan Korp Musik (Korsik) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

5 Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kepemudaan
6 Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten Barito Selatan

7 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

1 Pelakasanaan HAORNAS Tingkat Kabupaten Barito Selatan

8 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 Pertandingan Olahraga dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan

9) Urusan Penanaman Modal

Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan (DPMPTSP). Pada tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan (DPMPTSP) Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **13 (tiga belas) Program** dan **37 (tiga belas tujuh)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minuman
8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
9 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
10 Pertemuan Teknis dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 Pengadaan mebeleur kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4 Pengadaan Floter
5 Pengadaan Sistem Aplikasi Perizinan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus Hari-hari tertentu

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Asset
3 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
4 Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian

5 Program Pameran Promosi Investasi

1 Pameran Promosi Potensi Unggulan Daerah
2 Barsel expo

6 Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi

1 Rapat dan Konsultasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

7 Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi

1 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Inventarisasi Potensi Unggulan

8 Program Pengawasan dan Pengendalian

1 Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
2 Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM)
3 Kegiatan Penyusunan Data dan Pelaporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan
4 Rapat dan Konsultasi Bidang Pengawasan dan Pengendaliaan

9 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan

1 Persiapan Rencana Kerja Program Sistem Pelayanan Perijinan (SIP)

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

10 Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan

1 Rapat-rapat dan Konsultasi Bidang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2 Pengadaan Baliho / Spanduk Media Informasi Perizinan dan Non Perizinan
3 Pengelolaan Administrasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

11 Program Pengaduan dan Informasi Layanan

1 Konsultasi Penanganan Atas Pengaduan
2 Identivikasi dan Inventarisasi Izin Usaha

12 Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan

1 Penyusunan Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan

13 Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan

1 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perizinan

10) Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **36 (tiga puluh enam)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minuman
8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

9 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
11 Penyediaan Honorarium / Insentif Petugas
12 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.
5 Penyediaan Bahan Bakar Minyak
6 Biaya Umum Internet

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Penyusunan Anjab, ABK dan SKP
2 Penyusunan Renja, Lakip, RKA, LPPD dan LPJ Bupati

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Diklat Satpam

5 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM

1 Mengikuti dan Menghadiri Harkopnas 2018
2 Mengikuti SMESCO 2018
3 Mengikuti Cooperatif Fair

6 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM

1 Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM
2 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UKM
3 Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

4 Pengawasan Koperasi dan UKM
5 Penilaian Kesehatan KSP/USP -Koperasi dan UKM
6 Pembelajaran ke KSP/USP -Koperasi dan UKM
7 Menghadiri Rapat Gerakan Koperasi
8 SATGAS Pengawasan Koperasi dan UKM Tingkat Kabupaten Barito Selatan
9 Revitalisasi Koperasi
10 Konsultasi dan Pembinaan Koperasi, KSP/USP, dan UKM
11 Rapat dan Konsultasi Regional dan Pusat Regional

11) Urusan Wajib Kependudukan dan Cacatan Sipil

Urusan Wajib Penataan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **9 (sembilan) Program** dan **36 (tiga puluh enam)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
11 Rapat Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Penataan Lingkungan kantor
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2 Pembinaan Operator dan Pemeliharaan Peralatan SIAK Kabupaten dan Kecamatan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Renja/RKA/DPA
2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3 Penyusunan Laporan SPM
4 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
5 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB)

6 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatatn Sipil

1 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil
2 Pelayanan Pencatatan Sipil Massal Bagi Umat Non Muslim
3 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4 Pererkaman KTP Elektronik
5 Verifikasi Bantuan Dana Sosial Penduduk Rentan

7 Program Pengelolaan Data Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan

1 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan

8 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 Pelayanan Dokumen Kependudukan

3 Penerbitan Dokumen Kependudukan
4 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

9 Program Pertemuan Teknis Pelayanan Kebijakan Kependudukan

1 Kerja Sama Peningkatan Kapasitas dengan Pengadilan Agama Buntok dalam pelayanan Sidang Istbad Pernikahan Umat Muslim

12) Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **10 (sepuluh) Program** dan **38 (tiga puluh delapan)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat pertemuan dan konsultasi ke luar daerah
11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
12 Honorarium Non PNS

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Inventarisasi Aset Perangkat Daerah dan Jaringannya

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
2 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
3 Pertemuan Teknis Ketenagakerjaan
4 Pendataan Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintahan

7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

8 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Pembinaan Ketenagakerjaan

9 Program Pengembangan Data dan Informasi

1 Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan
2 Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

10 Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

1 Penetapan UMK/UMKS Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pengupahan

2 Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Jamsostek
3 Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit dan Serikat Pekerja/ Buruh
4 Pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
5 Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan
6 Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

13) Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **43 (empat puluh tiga)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
12 Pertemuan Teknis dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
2 Pengelolaan dan Penyusunan Data Statistik
3 Mengikuti Musrenbang / Musrenbangtan / Musrenbangprov / Musrenbangtanas / Forum SKPD (Desa, Kecamatan, Provinsi dan Pusat

4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Analisis ketersediaan Pangan Sumber Energi dan Protein
2 Pembinaan Cadangan Pangan Pemerintah
3 Ekspo Parade, Gelar Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
4 Analisis Distribusi, Harga dan Akses Pangan
5 Analisis Ketersediaan Pangan dan Gizi
6 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
7 Percepatan Penanekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
8 Analisis Konsumsi Pangan dan Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)
9 Pembinaan Keamanan Pangan
10 Peningkatan Kapasitas Hari Pangan Sedunia (HIPS)

6 Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan

1 Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian
2 Penyediaan Materi Penyuluh
3 Penyediaan Perjalanan Tetap Penyuluh
4 Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian
5 Penyusunan Program Penyuluhan
6 Pembinaan dan Pengawasan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)
7 Monitoring / Pembinaan Kelompok Tani di Tingkat Kecamatan dan Desa
8 Evaluasi Penyuluh, Kelembagaan Petani dan Nelayan
9 Penilaian Kredit Point Penyuluh Pertanian

10 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Jenamas
11 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Dusun Hilir
12 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Karau Kuala
13 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Dusun Selatan
14 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Dusun Utara
15 Pengelolaan UPTD BPP Kec. Gunung Bintang Awai

14) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana ,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **39 (tiga puluh sembilan)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Makanan dan Minuman
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
7 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
8 Penyediaan ATK
9 Peningkatana Kapasitas Penetapan Angka Kredit
10 Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluh KB (DAK Non Fisik)
11 Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB/Klinik KB (DAK Non Fisik)

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13 Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Ops
15 Pengadaan Sarana, Prasarana dan Peralatan KB (DAK- dan Penunjang)

16 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Peralatannya
17 Pengadaan Dukungan Media KIE dan Managemen Program KB (DAK Non Fisik)

3 Program peningkatan disiplin aparatur

18 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkap

4 Program pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

1 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Keluarga Berencana
2 Bhakti Sosial Pelayanan KB, TNI Manunggal KB Kes Kesatuan Gerak PKK KB Kes
3 Peningkatan Kapasitas Klinik KB
4 Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja
5 Pembinaan Kampung KB
6 Rapat Konsultasi Program KB
7 Pembinaan Program KB Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)

4 Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas

1 Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional
2 Peningkatan Kapasitas Penilaian BKB
3 Penilaian Bina keluarga Lansia
4 Lomba Kualitas Kader IMP, PLKB

5 Program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

1 Publikasi Program KB dan PP
2 Peningkatan Kapasitas Penggerakan Masyarakat
3 Pameran Hasil Produk UPPKS
4 Konsultasi Program Penggerakan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera ke Propinsi / Luar Daerah

6 Program keserasian dan kebijakan pendataan kependudukan

1 Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga
2 Monitoring dan Evaluasi Data Keluarga
3 Konsultasi dan singkronisasi data program
4 Verifikasi Data Keluarga

5 Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program

15) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Urusan Wajib Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **4 (empat) Program** dan **13 (empat belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

1 Pelatihan Ekonomi Produktif Perempuan
2 Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan
3 Sosialisasi Pencegahan KDRT
4 Peningkatan Kapasitas Pembinaan Poktan UPPKS

2 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

6 Mendata Data Terpilah

3 Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak

7 Pembinaan Forum Anak Daerah
8 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
9 Pembinaan dan Peningkatan kreativitas Anak
10 Louncing/Pencanangan Kota Layak Anak

4 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

11 Pembinaan Satgas GSI
12 Konsultasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
13 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender/Kesatuan Gerak PKK

16) Urusan Wajib Perhubungan

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **10**

(sepuluh) Program dan **72 (tujuh puluh dua)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
12 Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan
13 Honorarium Non PNS
14 Survey Perencanaan dan Hasil Pembangunan Pekerjaan Fisik Perhubungan
15 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan
16 Monitoring dan Evaluasi PAD Ke 5 UPTD Perhubungan
17 Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pamerean Pembangunan
18 Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebeleur kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan Komputer dan Printer Kantor
5 Langganan Internet DISHUB
6 Pengecoran Lantai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor PKB
7 Penataan Ruang Kantor
8 Pemeliharaan Ruang Tunggu VIP Bandara Sanggu

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Rakornis Dishub
3 Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS)

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
3 Penyusunan LPPD dan IKK
4 Penyusunan Laporan SPM
5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA)
6 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
7 Penyusunan Laporan TEPRA SKPD
8 Penyusunan LKPJ SKPD
9 Penyusunan RKT / PKT SKPD
10 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB)

6 Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU

1 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Trafic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan
2 Survey Jarak dan Penempatan Rambu
3 Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rambu Sungai

7 Program peningkatan pelayanan angkutan

1 Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas
2 Pengawalan dan Pengamanan Jamaah Haji
3 Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru
4 Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Bid. Perhubungan SDPLU
5 Pelayanan Jasa Administrasi Perizinan Angkutan Barang Umum

6 Pelayanan Jasa Administrasi Pengelola Parkir
7 Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum
8 Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Bid. Perhubungan Darat
9 Jasa Pelayanan Administrasi Perizinan dan Pengelola BUS
10 Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi
11 Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek
12 Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek
13 Posko Ketupat dan Posko Lilin

8 Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU

1 Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat
2 Sosialisasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)
3 Survey Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
4 Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)
5 Monev dan Pembinaan Sarana dan Prasrana Transportasi Jalan LLAJ

9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU

1 Rehab Berat / Bangun Kantor UPTD Dermaga Mengkatip
2 Rehab Kantor UPTD Dermaga Bangkuang
3 Pembersihan Danau Telang di Desa Tarusan
4 Pembersihan Sungai Sei Paken di Lingkungan RT. 3 dan RT. 4
5 Pembersihan Sungai Paku di Desa Baru
6 Pembersihan Sungai Mengkatip di Mengkatip
7 Pembersihan Sungai Bambaler di Kecamatan Dusun Selatan
8 Pembersihan Sungai Palui di Kecamatan Dusun Selatan

10 Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan

1 Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan

17) Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi

Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **41 (empat puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Honorarium Non PNS
12 Pertemuan Teknis dan konsultasi ke luar daerah
13 Pertemuan dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9 Pengadaan Dukungan Media KIE dan Managemen Program KB (DAK - Non Fisik)
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan KB (DAK dan Penunjang)
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
2 Penyusunan LPPD dan IKK
3 Penyusunan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA)
4 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
5 Penyusunan dan Pelaporan SKPD
6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
7 Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian
8 Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD
9 Raker / Sosialisasi Perencanaan Komunikasi dan Informatika

7 Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran

1 Konsultasi Domain, Hosting dan Langganan Internet
2 Penyusunan Berita Dinas dan Konten Website Resmi Pemda Barsel
3 Pembentukan dan Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
4 Penyampaian Informasi Pembangunan Melalui Pameran Pembangunan
5 Publikasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Melalui Baliho, Spanduk Leaflet, Brosur dll

6 Penyediaan Akses Internet (WIFI) gratis bagi Masyarakat kota dan Pedesaan di Kab. Barsel.

18) Urusan Wajib Pertanahan

Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasana Perumahan dan Pertanahan abupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **4 (empat) Program** dan **8 (delapan)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan

1 Peningkatan Pelayanan Kapasitas Pertanahan

2 Program Penyusunan Aset Tanah Daerah

1 Inventarisasi Tanah Milik Daerah
2 Sinkronisasi dan Konsultasi Pemanfaatan Tanah

3 Program Pengadaan dan Pembebasan Tanah Daerah

1 Pembuatan Sertifikat untuk Masyarakat Barsel
2 Perencanaan Pengadaan dan Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum
3 Pertemuan Teknis Pengadaan Tanah (Dalam dan Luar Daerah)

4 Program Permasalahan Pertanahan

1 Penanganan Sengketa Tanah
2 Pencegahan Meluasnya Dampak Sengketa Tanah

19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan. Selain Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri juga melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol).

Pada tahun 2018 **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan** telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **33 (tiga puluh tiga)** Kegiatan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
12 Rapat Pertemuan dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Pengadaan AC Kantor
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan Konsultasi dan bimtek perencanaan Badan Kesbangpol

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Keuangan
2 Penyusunan RKA-DPA Murni dan RKA-DPA Perubahan

5 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan

2 Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)
4 Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Kemasyarakatan
5 Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
6 Singkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
7 Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara

6 Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik

1 Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya
2 Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah
3 Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
4 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
5 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik
6 Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
7 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

7 Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik

1 Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu
2 Evaluasi Perkembangan Politik ki Kabupaten Barito Selatan
3 Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan
4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan
5 Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan
6 Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Pertemuan Teknis Bidang Politik Kemasyarakatan

Pada tahun 2018 **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** telah menetapkan **7 (tujuh) Program** dan **41 (empat puluh satu) Kegiatan.**:

1 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   1 Penyediaan jasa surat menyurat
   2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3 Penyediaan alat tulis kantor
   4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   7 Penyediaan bahan logistik kantor
   8 Penyediaan makanan dan minuman
   9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
   10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
   11 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur
   12 Rapat Pertemuan dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
   4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
   5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   1 Pendidikan dan pelatihan formal
   2 Pembinaan Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja bagi Tenaga Kerja Kontrak
   3 Peningkatan Kapasitas Kecamatan

4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan
2 Inventarisasi Penyusunan Database Anggota Satlinmas

5 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1 Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam
2 Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran
3 Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran
4 Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemadam Kebakaran

6 Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum

1 Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok
2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet
3 Peningkatan Pengawasan PSK
4 Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
5 Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan
6 Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan
7 Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur HIjau
8 Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C
9 Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan
10 Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

7 **Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan**

1 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS
2 Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda
3 Investigasi Pelaksanaan Perda / Perkada

20) Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum

Urusan Wajib Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh beberapa SOPD yaitu : Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan, Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, Inspektorat dan 6 (enam) Kecamatan yang adan di Kabupaten Barito Selatan

Lebih lanjut Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dijelaskan pada Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersendiri.

21) Urusan Statistik

Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informsasi Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **3 (tiga) Program** dan **19 (sembilan belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian

1 Pengumpulan dan Pengolahan Data
2 Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan
3 Pengembangan Teknologi Data dan Informasi
4 Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian
5 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian
6 Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi Selular BTS untuk 6 (enam) Kecamatan
7 Dokumentasi Kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Barsel
8 Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi

2 Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

1 Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan
2 Pembuatan Buku Barito Selatan Dalam Foto
3 Pembuatan Warta bergambar / Kalender
4 Pembuatan Tas / Paper Bag
5 Kerjasama Informasi Daerah Dengan Media Massa
6 Penyediaan Souvenir Asli Daerah Kab. Barito Selatan

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1 Publikasi Pembangunan, Pemerintah dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati
2 Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM
3 Pemeliharaan Radio Batuah FM
4 Peliputan Kehumasan Dalam dan Luar Daerah
5 Pembuatan buku kliping berita

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyara Desa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **8 (delapan) Program** dan **42 (empat puluh dua)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
13 Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan penataan halaman kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Penunjang Gedung Kantor
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6 Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2 Sensus Aset Barang Milik Daerah
3 Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ
4 Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Bimtek/sosialisasi/pembinaan PKK desa
2 Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Osaha Kerajinan/Industri Rumah Tangga
3 Singkronisasi Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaaan
4 Jambore PKK Provinsi
5 Rapat Koordinasi TP-PKK

6 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa
2 Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa
3 Bimbingan Teknis Pengembangan dan Pengelolaan BUMDes

7 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1 Gelar teknologi tepat guna
2 Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan
3 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
4 Musrenbang Desa dan Kelurahan

8 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1 Pemantauan & Pembinaan Administrasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi & Kabupaten (ADD), DBK, DD
2 Rakor ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan
3 Penyediaan Pelaksanaan Simda Keuangan Desa
4 Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW
5 Bantuan Sarana Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Serentak
6 Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan

23) Urusan Wajib Sosial

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyara Desa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **15 (lima belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
2 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
3 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
4 Pertemuan Teknis Pengelolaan Program Keluarga Harapan

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
3 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
4 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

3 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
2 Penyelenggaraan Hari Pahlawan
3 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia
4 Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah

5 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

1 Pendataan KIP, KIS dan KKS

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

1 Pengadaan Sarana/ Prasarana UEP Karang Taruna

24) Urusan Wajib Budaya

Urusan Wajib Budaya dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **3 (tiga) Program** dan **12 (dua belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2 Seleksi Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten Barito Selatan Dengan Pengiriman Peserta ke Tingkat Provinsi
3 Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)

4 Seleksi Festival Seni Budaya Tingkat Pelajar SLTA Se-Kabupaten Barito Selatan

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Penataan dan Pemeliharaan Display Kab. Barito Selatan di Mandala Wisata
2 Penataan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Anjungan Barsel TMII
3 Pemeliharaan dan Pengelolaan Museum Kab. Barito Selatan
4 Pemeliharaan dan Pengelolaan Benda-benda Purbakala/ Cagar Budaya
5 Pendataan dan Dokumentasi Benda Cagar Budaya Kab. Barito Selatan

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 Pembinaan Sanggar Seni Budaya
2 Penampilan Seni dan Budaya
3 Festival Budaya Isen Mulang

25) Urusan Wajib Perpustakaan

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **19 (sembilan belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
14 Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK)

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD

5 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
2 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
3 Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
4 Otomasi Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi dan Informatika
5 Lomba Bidang Minat Baca Tingkat Kabupaten
6 Pelayanan Perpustakaan Keliling pada Ruang Terbuka Publik
7 Penyelenggaraan Pengembangan Budaya baca.

8 Pertemuaan Teknis, pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan.

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

1 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

26) Urusan Wajib Kearsipan

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **4 (empat) Program** dan **5 (lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Arsip SKPD

2 Supervisi, Pembinaan dan Pertemuan Teknis Kearsipan

2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1 Pembangunan Database Informasi Kearsipan

3 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

4 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pada Tahun 2018 SOPD yang telah menetapkan Tingkat Pencapaian Standar Minimal Urusan Wajib diantaranya : Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib yang dilaksanakan pada masing-masing SOPD pelaksana diuraikan lebih lanjut.

Adapun beberapa standar pelayanan minimal pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yang disusun selain memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai batasan pelaksanaan SPM, juga memperhatikan kondisi sumber daya dan kebutuhan daerah. Berikut SPM pada lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

Pencapaian Standar Minimal Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

NO	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Target	Pencapaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98,87 %	98,82 %
2	Penduduk yang berusia> 15 tahun melek huruf	0,15 %	96,60 %
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A	96 %	105,07 %
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	85 %	77,75 %
5	Angka Putus Sekolah (Apus) SD/MI	0,04 %	0,05 %
6	Angka Putus Sekolah (Apus) SMP/Mts	0,01 %	0,56 %
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %	100,00%
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	100 %	100,00%
9	Angka Melanjutkan (AM) dariSD / MI ke SMP/MTs	100 %	81,16%
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	100 %	73,56%

Dari Tabel diatas ada 1 (satu) indikator yang melebihi target yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, ada 2 (dua) indikator yang mencapai target yakni Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai tahun ada 7 (tujuh) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B, Angka Putus Sekolah (Apus) SD/MI, Angka Putus Sekolah (Apus) SMP/Mts, Angka Melanjutkan (AM) dariSD / MI ke SMP/MTs, dan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Tingkat Pencapaian Standar Minimal Urusan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan seperti pada tabel berikut ini :

Pencapaian Standar Minimal Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

No	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Target	Pencapaian
1	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	5 Per 1000 KH	0
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,75	99,75
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	89 per 100.000 KH	156 Per 100.000 KH
4	Rasio Posyandu Persatuan Balita	1 Per 70 Balita	1 Per 80 Balita
5	Rasio Puskesmas per 10.000 penduduk	10 Per 100.000 Pddk	10 Per 100.000 Pddk
6	Rasio Pustu Per satuan Penduduk	6 Per 10.000 Penduduk	10 Per 10.000 Pddk
7	Rasio Rumah Sakit per 500.000 Penduduk	4 Per 500.000 Pddk	4 Per 500.000 Pddk
8	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	40 Per 100.000 Pddk	24 Per 100.000 Pddk
9	Persentase Balita Gizi Buruk pada balita	4%	0,06%
10	Cakupan Pelayanan Nifas	78,5%	63,6%

Dari Tabel diatas ada 7 (tujuh) indikator yang mencapai target yakni Angka Kematian Bayi, Kelangsungan hidup bayi, Rasio Posyandu, Rasio Puskesmas, Rasio Pustu, Rasio Rumah Sakit dan Persetase Balita Gizi Buruk. Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai tahun ada 3 (tiga) yaitu Angka Kematian Ibu, Rasio Dokter dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional

Jumlah Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan wajib 14 Dinas, 4 Badan, seperti pada tabel dibawah ini :

NO	Urusan Wajib	SOPD	Jumlah Pegawai
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	129
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	622
3	Lingkungan Hidup	DLH	45
4	Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	95
5	Penataan Ruang		
6	Perumahan	Dinas Perkimtan	49
7	Perencanaan Pembangunan	Bapeda	46
8	Kepemudaan dan Olah Raga	DISPORAPARBUD	41
9	Penanaman Modal	DPMPTSP	34
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan Kopersai dan UKM	38
11	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcatpil	26
12	Ketenaga Kerjaan	Disnaker	28
13	Ketahanan Pangan	BKPPP	183
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPP dan PA	30
15	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
16	Perhubungan	Dishub	53
17	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo	32
18	Pertanahan	Dinas Perkimtan	
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol	27
20	Statistik	Diskominfo	
21	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DinsosPMD	46
22	Sosial		
23	Budaya	DIPORAPARBUD	
24	Perpustakaan	DPAD	22
25	Kearsipan		
	JUMLAH		**1.615**

Untuk lebih rinci Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Strukturan dan Fungsional Urusan Wajib per urusan dijelaskan pada masing-masing bagian selanjutnya.

5. Realiasasi Anggaran Urusan Wajib

Pada Tahun 2018 Realisasi Anggaran Urusan Wajib yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagur Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 355.253.884.772,70** (*tiga ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, tujuh puluh sen*) realisasi **Rp. 299.193.785.881,30** (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan satu ribu tiga puluh sen*) atau sebesar **96,46 %** yang mana ini belum termasung Belanja Tidak Langsung.

Rincian Realisasi Anggaran Urusan Wajib Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel Alokasi Realisasi Anggaran Pelaksanaan Urusan Wajib

Urusan Wajib Pelayanan Dasar		ANGGARAN				REALISASI		SOPD
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	REALISASI	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Pendidikan**	8,861,112,000.00	16,699,691,200.00	11,411,800,000.00	36,972,603,200.00	35,662,820,968.00	96.46	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**	10,784,595,000.00	68,279,083,950.00	42,505,591,550.00	121,569,270,500.00	96,850,339,570.60	79.67	Dinas Ksehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	4,195,670,000.00	11,467,991,322.70	162,687,573,000.00	178,351,234,322.70	148,744,301,105.70	83.40	Dinas PUPR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	2,229,660,000.00	5,349,118,950.00	3,889,200,000.00	11,467,978,950.00	11,128,593,100.00	97.04	Dinas Perkimtan
5	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	472,750,000.00	1,067,010,300.00	5,450,000.00	1,545,210,300.00	1,526,240,000.00	98.77	Badan Kesbangpol
		1,931,189,600.00	1,332,849,500.00	133,200,000.00	3,397,239,100.00	3,352,335,424.00	98.68	Satpol PP dan Damkar
6	**Statistik**	210,600,000.00	1,177,640,000.00	0,00	1,388,240,000.00	1,368,575,957.00	98,58	Diskominfo
7	**Sosial**	159,100,000.00	1,762,348,400.00	28,900,000.00	1,950,348,400.00	1,929,155,713.00	98.91	BPBD
8	**Tenaga Kerja**	515,130,000.00	1,304,875,300.00	75,714,000.00	1,895,719,300.00	1,821,145,159.00	96.07	Disnaker

Urusan Wajib Pelayanan Dasar		ANGGARAN				REALISASI		SOPD
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	REALISASI	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	91,820,000.00	1,792,285,000.00	0.00	1,884,105,000.00	1,883,119,000.00	99.95	BPPKKB
10	**Pangan**	160,325,000.00	4,858,522,000.00	72,500,000.00	5,091,347,000.00	4,951,928,904.00	97.26	BKPPP
11	**Pertanahan**	87,380,000.00	689,120,000.00	15,500,000.00	792,000,000.00	743,419,200.00	93.87	Dinas Perkimtan
12	**Lingkungan Hidup**	3,076,600,000.00	2,848,829,400.00	1,245,800,000.00	7,171,229,400.00	7,040,866,534.00	98.18	DLH
13	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	696,537,000.00	1,945,704,320.00	129,100,000.00	2,771,341,320.00	2,767,975,459.00	99.88	Disdukcatpil
14	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	861,150,000.00	2,789,284,000.00	149,450,000.00	3,799,884,000.00	3,606,691,975.00	94.92	DinsosPMD
15	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	325,800,000.00	679,570,600.00	0.00	1,005,370,600.00	986,289,443.00	98.10	BPPKKB
16	**Perhubungan**	1,472,100,000.00	1,536,971,200.00	0.00	3,009,071,200.00	2,929,319,632.00	97.35	Dishub
17	**Komunikasi dan Informatika**	677,190,000.00	2,768,715,800.00	727,100,000.00	4,173,005,800.00	3,994,599,787.00	95.72	Diskominfo
18	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	669,410,000.00	859,052,300.00	10,000,000.00	1,538,462,300.00	1,528,070,352.00	99.32	DisperkopUKM
19	**Penanaman Modal**	384,515,000.00	766,711,600.00	187,000,000.00	1,338,226,600.00	1,311,983,453.00	98.04	DPMPTSP
20	**Kepemudaan dan Olah Raga**	855,100,000.00	1,253,448,900.00	29,500,000.00	2,138,048,900.00	2,108,977,090.00	98.64	DISPORAPARBUD
21	**Kebudayaan**	150,230,000.00	475,520,000.00	0.00	625,750,000.00	624,451,300.00	99.79	DISPORAPARBUD
22	**Perpustakaan**	421,450,000.00	768,590,200.00	12,500,000.00	1,202,540,200.00	1,185,433,300.00	98.58	BPAD
23	**Kearsipan**	50,450,000.00	161,750,000.00	0.00	212,200,000.00	209,718,900.00	98.83	BPAD
	JUMLAH	**28,634,076,600.00**	**105,958,093,622.70**	**220,661,714,550.00**	**355,253,884,772.70**	**299,193,785,881.30**	**84.22**	

Sumber Data SIMDA Kab. Barsel 2018 (DPKAD Kab. Barsel)

Untuk lebih rinci Realiasasi Anggaran Urusan Wajib per urusan dijelaskan pada masing-masing bagian selanjutnya.

6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum mengacu pada dokumen perencanaan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022.

Pada sistem perencanaan daerah khususnya pada Kabupaten Barito Selatan yang menangani Urusan Wajib, usulan tahun 2017 didasari pada usulan masyarakat di 93 Desa / Kelurahan yang ada melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 baik di tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Barito Selatan. Semua aspirasi masyarakat dirangkum dan kompilasi dengan berbagai aspek baik itu dari segi manfaat, biaya, sumber daya manusia sampai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan dari usulan tersebut.

Usulan tersebut kemudian dituangkan dalam rencana kerja Sekretariat Daerah yang menangani Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 yang selanjutnya direalisasikan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Dokumen RKA tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan dengan tim eksekutif, legislatif yang akhirnya menjadi sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018. Akhirnya berdasarkan dokumen tersebut program pembangunan Urusan Wajib Kabupaten Barito Selatan bisa terealisasi dengan baik.

Proses perencanaan pembangunan urusan wajib Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Daerah yang disusun oleh Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tahapan sebagai berikut :
   - Persiapan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama tim menyusunan persiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yaitu dengan melakukan klasifikasi tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat akan kesejahteraan mereka;
   - Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun rancangan awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan melakukan pendekatan-pendekatan subtantif terhadap kebutuhan dan karaketristik wilayah demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi anggaran dengan hasil yang maksimal.
- Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama-sama turun ke daerah untuk melakukan musyawarah rencana pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan keselarasan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat di daerah.
- Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Dari hasil musyawarah rencana pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setelah melakukan perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang akan dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif demi terwujudnya masyarakat barito selatan yang madani.

b. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan Rencana Kerja Urusan Wajib Kabupaten Barito Selatan; masing-masing Badan, Dinas Kabupaten Barito Selatan sebelum menyusun Rencana Kerja pembangunan daerah urusan wajib melakukan persiapan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis sesuai aspirasi masyarakat akan kebutuhan pembangunan urusan wajib yang efesien dan efektiv demi tercipatanya pembangunan pendidikan yang berkualitas dan handal.
- Penyusunan Rancangan Rencana Kerja; Rancangan Rencana Kerja urusan wajib Kabupaten Barito Selatan disusun serta dipublikasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan yang lebih agar didapat Rencana Kerja yang mendekati akan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan urusan wajib.
- Pelaksanaan forum komunikasi urusan wajib untuk menyelaraskan program dan kegiatan Rencana Kerja Urusan Wajib di masing-masing SOPD Kabupaten Barito Selatan;
- Sebelum menetapkan Rencana Kerja selalu melakukan koordinasi dengan kalangan pendidikan melalui forum pendidikan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan urusan wajib daerah yang berkualitas.
- Penetapan Rencana Kerja urusan wajib dilaksanakan oleh masing-masing SOPD Kabupaten Barito Selatan; Setelah semua hal di atas telah dilalui maka sampailah pada titik kesimpulan penyusunan Rencana Kerja yang dapat dijadikan acuan perencanaan pembangunan urusan wajib pada tahun anggaran 2018.

Untuk lebih jelasnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan dimasing-masing SOPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. Pemenuhan akan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana urusan wajib terus

dilakukan dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh masing-masing SOPD di Kabupaten Barito Selatan dengan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh masing-masing SOPD dan untuk penjabarannya di jelaskan kemudian.

8. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Urusan wajib oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

Kendala

a. Pelaksanaan Progam dan Kegiatan Tahun 2018 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan dari berbagai pihak, baik secara internal maupun eksternal karena Sumber Daya Manusia (SDM) kurang memadai serata sarana prasarana lainnya.
b. Minimnya rasa tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing.
c. Kurangnya dana pendukung dari semua kegiatan

Solusi

Solusi yang akan diambil untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

a. Dengan bertambahnya minimnya yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan pada Tahun Anggaran 2018, maka diusahakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan-pelatihan, Kursus-kursus, Seminar, Semiloka ataupun dengan Studi Banding.
b. Tentang minimnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, maka diusahakan untuk menumbuh kembangkan kesadarannya dengan mengikuti Bintek dan Pelatihan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

c. Mengusulkan penambahan pendanaan pada Kegiatan-kegiatan yang akan datang.

8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Dilaporkan

Secara umum tidak ada hal lain yang dianggap perlu dilaporkan dalam pelaksanaan Urusan wajib oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

b. Ringkasan Urusan Pilihan

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pilihan pada Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) yang melaksanakan 6 (enam) Urusan Pilihan, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pilihan

No	Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana
1	*2*	*3*
1.	Perikanan dan Kelautan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Pertanian	
3.	Pariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Budaya
4.	Perdagangan	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
5.	Industri	
6.	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Program dan Kegiatan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing SOPD adalah sebagai berikut :

1) Urusan Perikanan dan Kelautan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **5 (lima) Program** dan **5 (lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya

1 Pembinaan kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2 Pembinaan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan
3 Pembinaan dan Sosialisasi Ijin Usaha Perikanan
4 Pendataan, Verifikasi, Sosialisasi dan Penetapan Calon Lokasi Reservaat
5 Pengembangan Data dan Statistik Perikanan

2 Program pengembangan budidaya perikanan

1 Pengembangan Kolam Dinas / Stasiun Perbenihan
2 Rutin UPTD BBI Palu Rejo
3 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Budidaya
4 Pembinaan dan Pengembangan Sarpras Budidaya
5 Pengembangan Sarana Percontohan Dinas dan Penyuluhan
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Pesisir (Nelayan, pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam) (DAK)
7 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD)

3 Program pengembangan perikanan tangkap

1 Pembinaan dan Monev Kegiatan Perikanan Tangkap
2 Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
3 Rutin UPTD PPI Buntok / Satuan Pelaksana

4 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

1 Pengembangan Diversifikasi Pangan (ikan) dan Home Industri Pengolahan
2 Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan
3 Pengembangan Sentra Pengolahan Produk Perikanan
4 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
5 Lomba Masak Serba Ikan

5 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

1 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan & Lingkungan
2 Pengembangan Bantuan Saprodi Budidaya untuk Masyarakat Prasejahtera

2) Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudyaan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **3 (tiga) Program** dan **11 (sebelas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program pengembangan pasar pariwisata

1 Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional
2 Mengikuti KALTENG EXPO
3 Pameran Stationer
4 Pembinaan/ Pengawasan Hotel, restoran, Rumah Makan/ Minum dan
5 Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten Barito Selatan
6 Penyelasaian Perda TDUP

2 Program pengembangan destinasi pariwisata

1 Peningkatan dan Pemeliharaan Objek Wisata
2 Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata

3 Program pengembangan Kemitraan

1 Pelaksanaan Pertemuan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata
2 Pagelaran Seni Panggung Hiburan Wisata Sanggu
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS dalam

3) Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **60 (enam puluh)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Bimbingan Teknis Pasca Panen Komoditas TPH
2 Sosialisasi Kemitraan dengan Lembaga Stake Holder Untuk Menunjang Modal Usaha
3 Bantuan Penyediaan Sarana Produksi Bagi Petani
4 Bantuan Saprodi Bagi Petani/ Kelompok Tani Komoditas Holtikultura
5 Pelatihan Bagi Petani dan Petugas
6 Pelatihan Teknik Budaya Perkebunan
7 Pelatihan Petugas Pembina/ Pengawas Benih, Pestisida dan OPT
8 Monitoring Pembinaan dan Pengawasan UPJA
9 Pengelolaan Pengembangan Perkebunan

2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1 Mengikuti Kalteng Ekspo dan Borneo Exotica
2 Parade Produk Pertanian (Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI)
3 Gelar Produk Pertanian (Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan)
4 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan
5 Pengembangan Pusat Etalase/Eksebisi Promosi Hasil Produksi Pertanian
6 Gebyar Varietas TPH
7 Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan

8 Penanganan, Pengelolaan Panen dan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
9 Promosi Hasil Produk Pertanian (Tingkat Provinsi / Nasional)
10 Pembinaan Pengelolaan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Perkebunan

3 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

1 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian
2 Knsultasi, Pertemuan, Rapat-rapat Kegiatan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Sarana Prasarana
3 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen PSP
4 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Tanaman Pangan
5 Inventarisasi, Pangamatan dan Pembinaan OPT Terpadu/Monitoring OPT
6 Penguatan Brigade Proteksi
7 Pengembangan Perbenihan/Pembibitan (Operasional Balai Benih Padi dan Palawija)
8 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (Operasional Balai Benih Hortikulura)
9 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan UPTD Balai Benih Perkebunan Dangka
10 Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan dan Rapat-rapat Kegiatan Perkebunan
11 Pembinaan, monitoring dan evaluasi Pengembangan PBS
12 Pengelolaan Kebun Induk 20 Ha dan Kebun Percontohan 8 Ha
13 Pengelolaan Kebun Entris 4 Ha
14 Penyiapan Bibit Karet Unggul Okulasi di BBI Perkebunan Dangka
15 Pemeliharaan Tanaman di Areal Bumi Perkemahan Lalemu Lewas
16 Pengembangan Kawasan Hortikultura
17 Bantuan Saprodi Bagi Petani / Poktan di Kawasan Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)

18 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Non Kawasan
19 Pengembangan, Pembinaan, Penyediaan, Sarana Prasarana, Alat dan Mesin Pertanian
20 Pembinaan Penangkar Bibit Karet Unggulan
21 Gerakan Kebun Bersih
22 Pendataan Bantuan Bibit Karet Unggul
23 Pengembangan Perkebunan dan Tanaman Pangan
24 Pengembangan Komoditi Perkebunan
25 Pengembangan Informasi Perkebunan
26 Pembangunan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)
27 Pembangunan Sumber-sumber Air Meliputi irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam/Embung/DAM Parit/Pintu Air Long Storage)
28 Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
29 Pengembangan dan Pengelolaan UPTD Alsintan / Satuan Pelaksana

4 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
2 Sosialisasi Penanggulangan Rabies
3 Pengembangan UPTD Puskeswan Pamangka
4 Pengembangan UPTD Poskeswan dan PB-HMT Rantau Kujang

5 Program peningkatan produksi hasil peternakan

1 Pembibitan dan perawatan ternak
2 Pengadaan Aneka Bibit Ternak
3 Pembinaan dan Pengembangan Flasma Nuftah Kerbau Rawa
4 Pengembangan UPTD PB-HMT
5 Pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH)
6 Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)

7 Konsultasi dan Rapat - Rapat Kegiatan Peternakan

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

1 Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian

4) Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **2 (dua) Program** dan **18 (delapan belas)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1 Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus Tera / Tera Ulang di Kab. Barsel
2 Pendataan UTTP
3 Pengawasan Kemetrologian (UTTP)
4 Peningkatan Kapasitas Pasar Tertib Ukur
5 Pendukung Kegiatan Peningkatan kapasitas BPSK

2 Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)

1 Pembangunan/Rehab/Penimbunan/Penataan Lokasi Pasar Desa/Daerah/Tradisional-Dana APBD II
2 Pasar Penyeimbang Menjelang Hari Besar Keagamaan Tahun 2018 (Idul Fitri ,Natal dan Tahun Baru) bekerjasama dengan kantor bulog Buntok
3 Sembako Murah (Pasar Murah) untuk Masyarakat Kurang Mampu /Pra Sejahtera menjelang hari besar keagamaan Tahun 2018 (Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru)
4 Barsel Expo 2018 (Dalam rangka hari jadi Kab.Barito Selatan yang ke 59 tahun)

5 Promosi /Pameran Perdagangan Potensi Produk Unggulan UKM Daerah
6 Pembinaan/Pemantauan/Penyuluhan/Pendataan dan Monev bagi Pelaku Usaha Dagang Kecil dan Menengah/UMKM dan PKL
7 Pengawasan , Pemantauan dan Monev Distribusi Barang Lainnya dan Harga Bahan Pokok Pangan (Sembako) diwilayah Kab.Barsel (6 Kecamatan)
8 Pengandalian/Pengawasan/Pemantauan dan Pembinaan Pangkalan BBM Bersubsidi (Premium, Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg) (6 Kecamatan)
9 Pendataan dan Peremajaan / Kompilasi Data Base Pasar Rakyat /Pasar Tradisional /Daerah di wilayah Kabupaten Barito Selatan
10 Identifikasi /Kompilasi /Sinkronisasi Data Pedagang Plaza Beringin dan Pasar SAIK Buntok untuk Pembuatan Perjanjian Kontrak/sewa sebagai Penerima PAD 2018
11 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Perdagangan
12 Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar Beringin Buntok
13 Pengadaan/Pembelian dan Pemasangan Running Text LED Semi Outdoor Full Color Untuk Plaza Beringin

5) Urusan Perindustrian

Urusan Peridustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **1 (lima) Program** dan **12 (lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

1 Pemetaan, Pendataan dan Identifikasi untuk Pembaharuan Direktori Data Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kab. Barsel

2 Pemeliharaan/Perawatan Gudang Mesin Rotan dan Kantor Pengelola dan Administrasi Industri Pengolahan Rotan Jelapat
3 Promosi/Pameran Potensi Produk Unggulan Daerah dan Andalan IKM
4 Penyuluhan, Pembinaan/Pengembangan untuk Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
5 Pameran Kalteng Quality Expo 2018
6 Mengikuti/Menghadiri Pameran Kerajinan Nusantara dan Rapat Kerja Nasional Dekranas Tahun 2018
7 Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
8 Pengadaan Mesin Rotan untuk UPT Rotan Jelapat (DAK)
9 Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten
10 Rapat-rapat Konsultasi Bidang Industri
11 Peningkatan Kapasitas Kegiatan DAK IKM
12 Pemeliharaan/Perawatan, Pembelian Barang dan Peningkatan kapasitas Gedung Showroom Dekranasda Kab. Barsel

6) Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **4 (empat) Program** dan **5 (lima)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
1 Pembinaan Sosial Budaya Warga Transmigrasi
2 Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Warga Transmigrasi

2 Program Transmigrasi Lokal
1 Penyuluhan Transmigrasi Lokal

3 Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan
1 Pertemuan Teknis Transmigrasi
2 Verifikasi dan Validasi Data Lahan Transmigrasi

4 Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan

1 Peningkatan Kualitas Perumahan Transmigrasi

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan pilihan terdiri dari 4 Dinas, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai Urusan Pilihan

NO	Urusan Pilihan	SOPD	Jumlah Pegawai
1	**Perikanan dan Kelautan**	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan	183
2	**Pertanian**		
3	**Pariwisata**	Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan	41
4	**Perdagangan**	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	38
7	**Perindustrian**		
8	**Transmigrasi**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	28
	JUMLAH		**290**

Untuk lebih rinci Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional Urusan Pilihan per urusan dijelaskan pada masing-masing bagian selanjutnya.

4. Alokasi Realiasi Anggaran Pelaksanaan Urusan Pilhan

Pada Tahun 2018 Realisasi Anggaran Urusan Pilihan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 355.253.884.772,70** (*tiga ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, tujuh puluh sen*) realisasi **Rp. 299.193.785.881,30** (*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan satu ribu tiga puluh sen*) atau sebesar **96,46 %** yang

mana ini belum termasung Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Urusan Wajib Pilihan		ANGGARAN				REALIASAI		SOPD PELAKSANA
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	REALISASI	%	
1	Kelautan dan Perikanan	70,400,000.00	2,677,913,000.00	198,800,000.00	2,947,113,000.00	2,635,653,671.00	89.43	BPPP
2	Pariwisata	29,500,000.00	272,400,000.00	0.00	301,900,000.00	297,614,000.00	98.58	DISPPRAPAR
3	Pertanian	199,500,000.00	4,751,365,400.00	492,442,600.00	5,443,308,000.00	5,022,659,679.00	92.27	BPPP
4	Perdagangan	426,000,000.00	1,089,000,000.00	137,000,000.00	1,652,000,000.00	1,651,079,510.00	99.94	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
5	Perindustrian	56,600,000.00	490,400,000.00	375,430,000.00	922,430,000.00	910,401,468.00	98.70	
6	Transmigrasi	6.500.000,00	128.078.400,00	0,00	134.696.000,00	133.311.900,00	98.97	DINAKERTRAN
	JUMLAH	788.500.000,00	9,409.156.800,00	1,203,672,600.00	11,401.447.000,00	10,650.720.228,00	93.47	

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Urusan Pilihan mengacu pada dokumen perencanaan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022.

Pada sistem perencanaan daerah khususnya pada Kabupaten Barito Selatan yang menangani Urusan Pilihan, usulan tahun 2017 didasari pada usulan masyarakat di 93 Desa / Kelurahan yang ada melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 baik di tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Barito Selatan. Semua aspirasi masyarakat dirangkum dan kompilasi dengan berbagai aspek baik itu dari segi manfaat, biaya, sumber daya manusia sampai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan dari usulan tersebut.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. Pemenuhan akan kebutuhan

pembangunan sarana dan prasarana urusan pilihan terus dilakukan dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh masing-masing SOPD di Kabupaten Barito Selatan dengan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh masing-masing SOPD dan untuk penjabarannya di jelaskan kemudian.

7. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Urusan wajib oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Dilaporkan

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentunya tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan pembangunan urusan pilihan yang handal.

B. Ringkasan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang Lainnya)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat dan 6 Kecamatan.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 5 (Lima) Badan , Inspektorat dan 6 Kecamatan yang melaksanakan fungsi Penunjang fungsi Pemerintahan Daerah, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	SOPD Pelakasanan
1	**Administrasi Pemerintahan**	Sekretariat Daerah
		Sekretariat DPRD
		Kecamatan Dusun Selatan
		Kecamatan Dusun Hilir
		Kecamatan Dusun Utara
		Kecamatan Gunung Bintang Awai
		Kecamatan Karau Kuala
		Kecamatan Jenamas
2	**Pengawasan**	Inspektorat
3	**Perencanaan**	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4	**Keuangan**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**Kepegawaian**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	**Pendidikan dan Pelatihan**	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
7	**Penunjang Lainnya**	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Program dan Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing SOPD adalah sebagai berikut :

1) Administrasi Pemerintahan

Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan 6 Kecamatan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing sebagai berikut :

1. **Sekretariat Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2018 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dengan Program dan Kegiatan sebanyak **29 (dua puluh) program** dan **153 (seratus lima puluh tiga) kegiatan** sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
    1. Penyediaan jasa surat menyurat
    2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
    4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
    5. Penyediaan alat tulis kantor
    6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    8. Penyediaan makanan dan minuman
    9. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
    10. Monitoring dan Evaluasi Keuangan dan Aset
    11. Honorarium Non PNS
    12. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur
    13. Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
    14. Peningkatan Kapasitas pelayanan Kinerja Pengelolaan Barang Lingkup Setda Barsel
    15. Kegiatan Staf Ahli Bupati Barito Selatan
    16. Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah
    17. Rapat-rapat dan Konsultasi Bagian Keuangan dan Aset

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
    1. Pengadaan mebeleur kantor
    2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Guest House Rujab Bupati dan Wakil Bupati
    3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Guest House Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati
5. Kegiatan Pengadaan Speed Boad
6. Pengadaan Sepeda Untuk Pelajar SD dan SMP Se-kabupaten Barito Selatan
7. Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati
8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati/ Wakil Bupati/ Rumah Dinas Sekda
9. Pemeliharaan Peralatan dn Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dan Sekda
10. Pemeliharaan rutin/berkala Barang Inventaris Kantor Sekretariat Daerah
11. Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat Daerah
    Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Bupati dan Wakil Bupati
12. Pemeliharaan Rutin Berkala GPU Jaro Pirarahan
13. Pengadaan Akses Internet untuk LPSE Kab. Barsel
14. Penyediaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
15. Pemeliharaan sarana/ prasarana LPSE Kab. Barsel
16. Pemeliharaan Tanaman Hias pada Kantor Bupati Barito Selatan
17. Lanjutan Pembangunan Gudang Peralatan Kantor
18. Penataan Ruang Rapat LPSE
19. Kegiatan rehab rumah jabatan wakil bupati
20. Kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Dokter (Rumah Copel)
21. Pengadaan AC untuk Lingkup Setda
22. Rehab dan Penataan Kantor Bupati Barito Selatan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

.1. Pengadaan pakaian dinas KDH/ WKDH beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian hari-hari khusus PNS Setda

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2. Pelaksanaan Pembinaan, Penyusnan dan Evaluasi RENJA Kab.Barito Selatan
3. Pertemuan Teknis Wilayah FORSESDASI

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Lakip Setda, Kabupaten dan Monev Lakip SKPD, Penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja
2. Penyusunan SKM
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
4. Penyusunan Adminstrasi Pembukuan dan memverifikasi Lingkup Setda Kab. Barsel
5. Penyusunan Akuntansi dan Laporan Keuangan SKPD Setda Kab. Barsel
6. Penyusunan SPP dan SOP
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
8. Penataanusahaan keuangan pada Setda Kab.Barsel
9. Sensus Barang Milik Daerah Lingkup Setda
10. Penyusunan laporan barang milik Setda

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Penataan Kelembagaan Organisasi & Monitoring Evaluasi
2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
4. Publikasi Peraturan Perundang-undangan
5. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

6. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Dokumentasi dan Informasi Hukum
7. Penanganan Kasus-kasus Hukum dalam Peradilan maupun di luar Peradilan
8. Konsultasi, Evaluasi, Penyampaian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
9 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
10. Penyuluhan Kesadaran Hukum
11. Penyusunan Peta Program Pembentukan Perda (Properpemda)
12. Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Sosialisasi Raperda Inisiatif Pemkab dan DPRD Kab. Barsel
14. Pertemuan Teknis Penyusunan Legislasi Daerah Antara Pemkab Barsel dan DPRD Kab. Barsel
15. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Desa
16. Mou Kab. Barsel , RUTAN Negara Kelas II B Buntok dan LBH Barito Terbit
17. Rapat-rapat, Konsultasi Bidang Organisasi
18. Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
19. Penyusunan Raperda tentang Produk Hukum Daerah

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan Analisis Jabatan PNS
2. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Kab. Barsel
3. Pembinaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (Purna Praja)
4. Pelatihan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
5. Penyusunan Evaluasi Jabatan Sekretariat Daerah Kab. Barsel

8. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
   1. Penyusunan Profil Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
   2. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi
   3. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)

9. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru**
   1. Penataan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan

10. **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
    1. Penyediaan Bahan Bacaan, Koran dan Majalah
    2. Pembuatan Buku Kumpulan Pidato Bupati
    3. Dokumentasi Pembangunan, Pemerintahan Kemasyarakatan dan Kegiatan Bupati/Wakil Bupati Melalui Foto dan VCD

11. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah**
    1. Peningkatan Kapasitas Kegiatan KDH dan WKDH
    2. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri / Tamu Daerah Lainnya
    3. Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH dan WKDH
    4. Pelayanan Kegiatan Kedinasan KDH dan WKDH
    5. Pelaksanaan Kegiatan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Daerah
    6. Pengadaan Peralatan Keprotokolan
    7. Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama dan Keprotokolan
    8. Kerjasama Antar Kabupaten / Kota dan Provinsi
    9. Rapat Forum Pimpinan Daerah
    10. Rapat Pejabat Pemerintah Daerah

12. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan
2. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

13. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Penegasan Batas Daerah dan Desa
2. Pembakuan Nama Rupa Bumi / Toponimi

14. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Pelayanan Kegiatan urusan Haji
2. Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Ramadhan Ke Kec di Kab. Barsel
3. Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Nyepi Ke Kec di Kab. Barsel
4. Penyelenggaraan Kegiatan untuk Safari Natal Ke Kec di Kab. Barsel
5. Konsultasi & Sinkronisasi BIdang Kesra
6. Monev dalam daerah
7. Peningkatan Kapasitas Kegiatan Anggota DPR RI, DPD, MPR, DPRD Prov. DPRD Kab. (Protokol)
8. Kegiatan Kerjasama dengan UNS Solo dan IAIN Palangka Raya

15. Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Tunjangan Damang, Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan
2. Pembinaan Kedamangan
3. Honor Mantir Adat
4. Monev Kedemangan Kab.Barsel
5. Mengikuti Kegiatan Promosi Kebudayaan/Adat
6. Peningkatan Kapasitas DAD Kabupaten, Kecamatan dan Damang
7. Konsultasi dan Pertemuan Teknis Kedemangan ke luar daerah

16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1. Pembinaan Senam Massal Setda Kabupaten Barito Selatan

2. Pembinaan UKS dan LSS Kab.Barsel
3. Pertemuan teknis dengan SKPD terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan

17. Program Pembangunan Ekonomi

1. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perekonomian dan SDA
3. Kegiatan Penyalur Beras Sejahtera (Rastra) di Kab. Barsel
4. Pelaksanaan Rapat, Pemantauan dan Fasilitasi Bidang Ekonomi

18. Program Kerjasama Pembangunan

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah
2. Pemeliharaan PLTS Terpusat
3. Bimtek Pengelolaan PLTS Terpusat di Kabupaten Barito Selatan
4. Monitoring dan pertemuan teknis bidang kelistrikan
5. Satgas Saber Fungli dan TP4D
6. Satgas Anti Narkoba

19. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Peningkatan LAPOR SP4N Kabupaten Barito Selatan
2. Penyelenggaraan Rapat Bencana Alam, Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Pelayanan Umum, Trantib dan Linmas
3. Dukungan Pelaksanaa Pertemuaan Teknis Dalam Rangka Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil temuan Lembaga Pengawasan
4. Penanganan Kasus Pada Wiilayah Pemerintahan Dibawahnya
5. Pembinaan dan Pengawasan PATEN
6. Pengendalian Manajemen Pelaks Kebijakan KDH

20. Program Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Barsel
2. Pengelolaan e-Government di Setda Kab. Barsel
3. Dukungan Pengelolaan Data SDDKN Kab. Barsel
4. Pelaksanaan Raker LPSE Tingkat Prov. Kalimantan Tengah di Buntok
5. Penyediaan Sistem Informasi Administrasi Pembangunan
6. Pengadaan Aplikasi JDIH Sekretariat Daerah Kab.Barsel

21. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan
2. Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa
3. Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa
4. Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa

22. Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah

1. Pengelolaan Administrasi Pengadaan barang dan Jasa
2. Pelayanan Pengadaan barang dan Jasa
3. Penyediaan Informasi Pelaporan dan Dokumentasi Pengadaan Barang dan Jasa

23. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Pengolahan LHKPN

24. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo & Layanan Elektronik

1. Penyelenggaraan Bimtek dan Workshop Bidang Kominfo dan Layanan Elektronik

25. **Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastrutur TIK**

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat Jaringan
2. Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat Data Center

26. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan APBD Kabupaten Barito Selatan TA. 2018
2. Pelaksanaan TEPRA Setda Kab.Barito Selatan
3. Biaya administrasi dan Pertemuan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

27. Program Pengembangan data / Informasi

1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Renstra, Rencana Kerja dan Renja
2. Penyediaan Bahan Administrasi Pembangunan
3. Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan

28. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Pengendalian dan Verifikasi Rumah Ibadah Se Barito Selatan

29. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Expo

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan menetapkan **6 (enam) program** dan **51 (lima puluh satu) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Penyediaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
13 Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan
14 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
15 Pembuatan Dokumen Notulen Rapat – Rapat
16 Inventarisasi dan Verifikasi Data Aset
17 Peningkatan dan Penataan Administrasi Kepegawaian
18 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD
19 Biaya Publikasi
20 Cetak Kalender dan Buku Agenda
21 Pengadaan Plakat dan Cindera Mata
22 Penyusunan Dokumen Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan Legislatif
23 Peningkatan Kapasitas Kegiatan DPRD Kabupaten Barito Selatan
24 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

6 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Rumah Dinas Anggota DPRD di Sababilah
7 Pemeliharaan AC
8 Pemeliharaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi
9 Rehab Rumah Dinas DPRD di Sababilah
10 Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Rumah Dinas DPRD di Sababilah
11 Perbaikan Instalasi Air Bersih Serta Perbaikan Tower dan Tandon Air Rumah Dinas DPRD di Sababilah

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH
2 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
2 Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara
3 Penyusunan dan Pelaporan SKPD
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2 Kegiatan Reses
3 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
5 Peningkatan Sidang - Sidang dan Rapat DPRD
6 Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah
7 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang – Undangan

8 Konsultasi dan Sinkronisasi DPRD Luar Daerah
9 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD

3. Kecamatan Dusun Selatan

Pada tahun 2018 Kecamatan Dusun Selatan menetapkan **6 (enam) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
12 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebeleur
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5 Pemeliharaan AC
6 Penambahan Ruangan Gedung Kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Peningkatan Kapasitas RT/RW
2 Kegiatan PATEN
3 Peningkatan Kapasitas Kecamatan
4 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan
5 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan
6 Register Kependudukan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
2 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
3 Pembentukan Tim Peningkatan Kapasitas ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan
4 Pembuatan Profil Kecamatan dan Monografi

6 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penegasan Batas dan Toponomi

4. Kecamatan Dusun Hilir

Pada tahun 2018 Kecamatan Dusun Hilir menetapkan **5 (lima) program** dan **45 (empat puluh lima) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan makanan dan minuman
7 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah
8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
10 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan SKPD
11 Penyediaan Insentif Jasa Kantor

12 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tamu Tumah Jabatan Camat
13 Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat
14 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
4 Pengadaan Mubelair Aula
5 Rehabilitasi Plafon Aula
6 Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop
7 Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 (empat) dan Bahan Bakar
9 Pemeliharaan Sepeda Motor Dinas Roda 2 (Dua) dan Bahan Bakar
10 Penyebaran Informasi melalui sarana media cetak dan elektronik
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Speedboat dan Bahan Bakar
12 Pembuatan, Penyusunan Data Bazeting, Struktur Organisasi dan Nomenklatur

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2 Kegiatan PATEN
3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
4 Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan
5 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan
6 Peningkatan Kapasitas ADD
7 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
8 Antisipasi Penanggulangan Bencana
9 Peningkatan Kapasitas Kelurahan

10 Penetapan dan Penegasan Batas Desa
11 Pembuatan Profil
12 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
13 Pembinaan dan Pelatihan Linmas Desa Dan Kelurahan
14 Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional
15 Pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA

5. Kecamatan Dusun Utara

Pada tahun 2018 Kecamatan Dusun Utara menetapkan **6 (enam) program** dan **49 (empat puluh Sembilan) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 Penyediaan makanan dan minuman
11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
13 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
3 Pengadaan mebeleur kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
9 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
10 Pemeliharaan AC
11 Pengadaan GPS

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2 Peningkatan Kapasitas RT/RW
3 Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ
4 Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan
5 Kegiatan PATEN
6 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan
7 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan
8 Penanganan dan Pemeliharaan Kantibnas
9 Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)
10 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan
11 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan
12 Lomba TOGA, Kebun PKK dan GSI Tingkat Kecamatan
13 Rapat Kerja Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

14 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kemasyarakatan
15 Rapat Konsultasi dan Pelatihan TP-PKK se Kecamatan

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

6 Program Pemberdayaan Masyarakat
1 Pembinaan PKK
2 Pembinaan Posyandu
3 Pembinaan Paud
4 Biaya Pembinaan LPM dan KPM
5 Peringatan Hari Jadi Kelurahan
6 Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong
7 Biaya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat
8 Biaya Rapat – Rapat

6. Kecamatan Gunung Bintang Awai

Pada tahun 2018 Kecamatan Gunung Bintang Awai menetapkan **4 (empat) program** dan **35 (tiga puluh lima) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor
12 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
6 Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan GB Awai
7 Penimbunan dan Siring sekeliling Bangunan GPU
8 Pembuatan tempat parkir Kecamatan GB Awai

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2 Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ
3 Kegiatan PATEN
4 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan
5 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan
6 Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus
7 Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan Tim Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang Awai Tahap V.
8 Peningkatan Kapasitas Kecamatan
9 Forum Pertemuan Teknis Kecamatan
10 Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)
11 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
12 Kegiatan Tim Penyusunan ANJAB, ABK, dan SKP Kecamatan
13 Penyediaan Dana untuk Petugas Kebersihan Pasar Desa Tabak Kanilan, Patas I dan Ugang Sayu
14 Inventarisasi Aset Perangkat Daerah dan Jaringannya

7. Kecamatan Karau Kuala

Pada tahun 2018 Kecamatan Karau Kuala menetapkan 5 **(lima) program** dan **41 (empat puluh satu) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan makanan dan minuman
8 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah
9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
13 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6 Penataan Halaman Kantor Kecamatan
7 Pembangunan Aula Kantor Kecamatan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH
2 Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
2 Peningkatan Kapasitas RT/RW
3 Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan
4 Kegiatan PATEN
5 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan
6 Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan
7 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan
8 Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)
9 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan
10 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan
11 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
12 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan
13 Penetapan dan Penegasan Batas Desa
14 Paskibraka

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
5 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

8. Kecamatan Jenamas

Pada tahun 2018 Kecamatan Jenamas menetapkan **5 (lima) program** dan **38 (tiga puluh delapan) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
11 Honorarium Non PNS
12 Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan alat studio
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7 Penataan Halaman Rumah Dinas Camat
8 Penataan Halaman Kantor Kecamatan
9 Pembuatan Pagar Kantor Kecamatan
10 Rehab Atap Kantor Kecamatan

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Peningkatan Kapasitas RT/RW
3 Kegiatan PATEN
4 Pelaksanaan Musrembang Tingkat Kecamatan
5 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan
6 Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)

7 Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan
8 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan
9 Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan
10 Penetapan dan Penegasan Batas Desa

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
3 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
4 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2) Pengawasan

Pada tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Barito Selatan menetapkan **9 (sembilan) program** dan **45 (empat puluh lima) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Rapat-rapat Pertemuan Teknis dan konsultasi ke luar daerah
11 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
12 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Aparatur Pemerintah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan
5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
6 Sensus Barang Milik Daerah

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan Pakaian Olah Raga

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Standar Prosedur (SOP)
3 Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD
4 Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian
5 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kab. Barito Selatan
6 Penyusunan RKA-DPA APBD Murni dan RKA-DPA Perubahan

5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Reviu RKA Murni 2019 dan RKA Perubahan TA. 2018
2 Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
3 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
4 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
5 Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
6 Peningkatan Kapabilitas APIP
7 Pemutakhiran Database pada Aplikasi SIM-HP Pemda
8 Pengelolaan Data Hasil Pengawasan APFP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda
9 Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APFP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda
11 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APFP untuk Kepala Daerah

12 Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP_PKD)

6 Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017

7 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
2 Penilaian Angka Kredit Auditor
3 Telaah Sejawat
4 Workshop Penguatan Kapasitas SDM APIP
5 Program Pelatihan Mandiri (PPM)

8 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Khusus)

9 Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah

1 Rapat Pertemuan Teknis Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi, Regional dan Nasional

3) Perencanaan

Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan **17 (tujuh belas) Program** dan **91 (sembilan puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11 Penyediaan Jasa Administrasi
12 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
13 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebeleur
2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
3 Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7 Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop
8 Pemeliharaan AC
9 Pengadaan AC Kantor

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
3 Penyusunan LPPD dan IKK
4 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA)
5 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
6 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB)
7 Pelaksanaan Aksi Penanganan dan Pencegahan Korupsi Daerah (Aksi PPK) Kab. Barito selatan

5 Program pengembangan data/informasi

1 Penyusunan profile daerah
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4 Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan
5 Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel

6 Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan
7 Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)
8 Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2017
9 Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama
10 Rapat / Pertemuan Teknis / Konsultasi Bidang Litbang, Perencanaan Program & Pengendalian
11 Rapat Pertemuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)

6 Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3 Forum Gabungan SKPD
4 Penyusunan Perubahan RKPD
5 Penyusunan RKPD Tahun 2018
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD
7 Penyusunan KUPA dan PPAS

7 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
3 Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi
4 Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten
5 Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan
6 Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan
7 Inventarisasi Kawasan Potensi Wisata
8 Identifikasi Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat
9 Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
10 Pendataan dan Pengembangan Koperasi Berbasis Kerakyatan

11 Konsultasi, Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi

8 Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1 Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2 Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an
3 Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
5 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perhubungan
7 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
8 Pengendalian dan Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur

9 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1 Mengikuti Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis, Sinkronisasi rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana

10 Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra

1 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan
3 Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes
4 Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2018
5 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program Pembangunan Desa

12 Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Kepemerintahan

1 Monitoring dana DAK TA. 2018 dan Perencanaan DAK Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesra, Kependudukan

dan Pemerintahan

2 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa
3 Sosialisasi, Desiminasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
4 Monitoring Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
5 Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial
6 Asistensi Renja SKPD Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
7 Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
9 Rapat-Rapat, konsultasi, Pertemuan Teknis, dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan

13 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

14 Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Wilayah Blank Spot Layanan/Jaringan Telekomunikasi Seluler

15 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang

1 Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya
2 Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel
3 Lanjutan Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai dan Danau
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah
5 Penyelenggaraan Tematik Data Spasial dan Geospasial Pengembangan Wilayah (Simpul Jaringan/KSP)
6 Penyusunan Peninjauan Kembali / Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan

16 Program Pemerintahan dan Nakertrans

1 Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja

17 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

1 Penyusunan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Kab. Barito Selatan

4) Keuangan

Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan menetapkan **11 (sebelas) program** dan **94 (sembilan puluh empat) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7 Penyediaan makanan dan minuman
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
10 Honorarium Non PNS
11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan gedung kantor
2 Pengadaan penataan halaman kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6 Pengadaan Inventaris Kantor
7 Sensus Barang Milik Daerah
8 Pengadaan CCTV
9 Rehab Instalasi Listrik Kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
2 Pengadaan Pakaian Dinas / PDH

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Pengurusan Administrasi Belanja Gaji PNSD se Kab. Barsel
2 Pengelolaan dan Penerapan BUD dan Kuasa BUD
3 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat TAPD Kab. Barsel
5 Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah
6 Pengelolaan Administrasi Bendahara Umum Daerah (BUD)
7 Pelaporan Data Taperum dan BPJS Kesehatan PNSD
8 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018
9 Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD-P Kab. Barsel Tahun Anggaran 2018
10 Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2019
11 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang APBD Kab. Barsel Tahun Anggaran 2019
12 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengeloalan Keuangan Daerah
13 Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah
14 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2018
15 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Keuangan Daerah
16 Pemelharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji PNSD
17 Evaluasi Rancangan PERDA dan PERBUP Tentang APBD-P TA. 2018
18 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan PPKD
20 Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Dana DAK
21 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Keuangan Daerah

22 Penyusunan Perangkat Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
23 Asistensi Penggunaan Aplikasi SIMDA
24 Penatausahaan Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Pengasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2018

6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

1 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
2 Penyusunan Buku Standarisasi Harga
3 Pembuatan Bukti Kepemilikan Tanah / Aset Milik Pemda Barito Selatan
4 Apraisal / Penilaian Aset untuk Pelelangan BMD
5 Pengelolaan dan Penertiban Aset Daerah
6 Pengelolaan Sistem Pelaporan BMD
7 Sensus dan Pencatatan serta Penatausahaan BMD

7 Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan

1 Inetensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah
2 Peningkatan Pencapaian Target Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Daerah
3 Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan
4 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5 Pengolahan Data Target Teknis Rencana Penerimaan PAD
6 Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
7 Peningkatan Pencapaian Target Pajak Daerah
8 Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah
9 Pekan Panutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

8 Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi

1 Perencanaan Monitoring Evaluasi Kegiatan
2 Pameran Pembangunan / Expo

9 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

1 Konsultasi dan Pembinaan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
2 Pendataan Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
3 Penyediaan Formulir untuk Pelayanan dan Pengelolaan PBB dan BPHTB
4 Cetak Benda Berharga
5 Verifikasi Data PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan
6 Bimbingan dan Pelatihan Teknis PBB / BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7 Sosialisasi dan Penyuluhan PBB/BPHTB Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8 Pemeliharaan dan Pendampingan SISMIOP PBB P2
9 Pengelolaan dan Penataan Dokumen Data PAD

10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah

1 Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Perimbangan Keuangan
2 Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Daerah Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak
3 Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan Provinsi
4 Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target DAU Dan DAK
5 Penyusunan Laporan Target Dan Realisasi Perimbangan Keuangan Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
6 Rapat - Rapat Konsultasi Dan Singkronisasi Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
7 Peningkatan Pengelolaan Pencapaian Target Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
8 Pengolahan Data Teknis Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
9 Pemutahiran Data Penerimaan dari Dana Tranfer Pemerintah Pusat dan Propinsi

11 Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan

1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
2 Verifikasi dan Penilitian Spj Fungsional SKPD

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
4 Penyusunan Laporan Saldo Kas Daerah
5 Peningkatan Pelayanan Kegiatan Audit BPK-RI
6 Peningkatan Administrasi Pembukuan dan Verifikasi
7 Penyusunan Rancangan PERDA Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
8 Penyusunan Rancangan PERBUP Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
9 Evaluasi RAPERDA dan RAPERBUP Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
10 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD
11 Asistensi Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2017 Menggunakan Aplikasi SIMDA

5) Kepegawaian

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan menetapakan **9 (sembilan) program** dan **38 (tiga puluh delapan) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Rapat-rapat, Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke luar daerah
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 Program peningkatan disiplin aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengiriman ASN untuk Tugas Belajar
2 Pengiriman Peserta Ujian Dinas
3 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
4 Pengiriman Peserta Prajabatan Golongan II dan III

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 Program Pembinaan ASN Kabupaten

1 Penyelesaian Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin
2 Analisa, Evaluasi dan Pelaporan / Penyelesaian LP2P
3 Pengurusan Administrasi Karpeg, Karis, Karsu, Taspen ASN Kab. Barito Selatan
4 Pengusulan Satya Lencana Karya Syta ASN Kab. Barito Selatan
5 Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

7 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 Penyusunan dan Pengurusan Formasi ASN
2 Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat ASN (UKP)
3 Penyelesaian SK Pensiun ASN
4 Rapat / Konsultasi /Pertemuan Teknis Bidang Kepegawaian
5 Penyusunan Informasi Kepegawaian, DUK, dan Daftar Nominatif ASN Kab. Barito Selatan
6 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
7 Peningkatan Kegiatan Baperjakat
8 Seleksi Penerimaan Calon PNS / ASN dan Penetapan NIP

8 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

1 Pemutakhiran dan Pendokumentasian Data ASN /SAPK

2 Pemeliharaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian

9 Kelembagaan KORPRI/ Aparatur Sipil Negara (ASN)

1 Kegiatan Publikasi Hari KORPRI
2 Kegiatan Pembinaan Mental dan Kerohanian KORPRI / ASN
3 Kegiatan Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani bagi Anggota KORPRI / ASN

6) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan **17 (tujuh belas) Program** dan **91 (sembilan puluh satu)** Kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
11 Penyediaan Jasa Administrasi
12 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah
13 Rapat-Rapat dan Konsultasi Dalam Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan mebeleur
2 Pemeliharaan Rutin Peralatan Kantor
3 Pembangunan Mushola Bappeda kab. Barsel
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7 Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop
8 Pemeliharaan AC

9 Pengadaan AC Kantor

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
3 Penyusunan LPPD dan IKK
4 Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA)
5 Penyusunan RKA-DPA APBD dan DPA Perubahan
6 Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB)
7 Pelaksanaan Aksi Penanganan dan Pencegahan Korupsi Daerah (Aksi PPK) Kab. Barito selatan

5 Program pengembangan data/informasi

1 Penyusunan profile daerah
2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
3 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4 Pembuatan Buku Evaluasi Pembangunan
5 Pembuatan Buku Informasi Pembangunan Kab. Barsel
6 Penyusunan Buku Laporan Bulanan Berdasarkan Kegiatan dan Feedback Laporan Bulanan
7 Rapat Pertemuan Teknis dan Pengendalian (Rakordal)
8 Pembuatan Buku Pencapaian Pembangunan Kab. Barsel Tahun 2017
9 Konsolidasi Pelaporan DAK. Tugas Pembantuan Dekonsentrasi dan Urusan Bersama
10 Rapat / Pertemuan Teknis / Konsultasi Bidang Litbang, Perencanaan Program & Pengendalian
11 Rapat Pertemuan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Tim Evaluasi dan Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)

6 Program perencanaan pembangunan daerah

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
2 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
3 Forum Gabungan SKPD

4 Penyusunan Perubahan RKPD
5 Penyusunan RKPD Tahun 2018
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD
7 Penyusunan KUPA dan PPAS

7 Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 Sosialisasi, Desiminassi Perencanaan Program Bidang Ekonomi
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi
3 Asistensi Renja SKPD Bidang Ekonomi
4 Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di Kabupaten
5 Konreg PDRB Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan
6 Mengikuti Pelaksanaan Barsel Expo, Kalteng Expo dan Pawai Pembangunan
7 Inventarisasi Kawasan Potensi Wisata
8 Identifikasi Potensi Unggulan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat
9 Penyusunan Master Plan Pengembangan Penanaman Modal
10 Pendataan dan Pengembangan Koperasi Berbasis Kerakyatan
11 Konsultasi, Pertemuan Teknis dan Sinkronisasi Perencanaan Daerah Bidang Ekonomi

8 Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

1 Konsultasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
2 Pemantauan dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Bidang Ke PU an
3 Asistensi Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
5 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Pengembangan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perhubungan

7 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
8 Pengendalian dan Perencanaan DAK Bidang Infrastruktur

9 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

1 Mengikuti Rapat Konsultasi, Pertemuan Teknis, Sinkronisasi rencana Pembangunan Daerah Rawan Bencana

10 Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra

1 Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan penunjang Program Kota Sehat Kab. Barito Selatan
3 Peningkatan Kapasitas Penunjang Program sdGes
4 Monitoring Penyaluran Raskin Tahun 2018
5 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Program Pembangunan Desa

12 Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Kepemerintahan

1 Monitoring dana DAK TA. 2018 dan Perencanaan DAK Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
2 Pemutakhiran Data Rumah Ibadah dan Prasarana Pemerintahan Desa
3 Sosialisasi, Desiminasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
4 Monitoring Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS)
5 Monitoring Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik Sosial
6 Asistensi Renja SKPD Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan
7 Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
9 Rapat-Rapat, konsultasi, Pertemuan Teknis, dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan

13 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

14 Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

1 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Wilayah Blank Spot Layanan/Jaringan Telekomunikasi Seluler

15 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang

1 Pengadaan Peralatan Survey dan Alat Kantor Lainnya
2 Peningkatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kegiatan BKPRD Kab.Barsel
3 Lanjutan Survey dan Pemetaan Toponimi Sungai dan Danau
4 Verifikasi, Validasi dan Analisis Data Perencanaan Pemanfaatan Ruang Daerah
5 Penyelenggaraan Tematik Data Spasial dan Geospasial Pengembangan Wilayah (Simpul Jaringan/KSP)
6 Penyusunan Peninjauan Kembali / Revisi RTRW Kabupaten Barito Selatan

16 Program Pemerintahan dan Nakertrans

1 Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja

17 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

1 Penyusunan Kajian Pengembangan Produk Unggulan Kab. Barito Selatan

7) Fungsi Penunjang Lainnya

Pada Tahun 2018 Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan **8 (delapan) program** dan **30 (tiga puluh) kegiatan** sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

5 Penyediaan alat tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
12 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
13 Rapat - rapat Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
4 Sensus Barang Milik Daerah

3 Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian kerja lapangan
2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan

6 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1 Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi
2 Posko Siaga Bencana

7 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi
1 Pendataan Dampak Bencana
2 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3 Pertemuan Teknis Rehabilitas & Rekonstruksi Pasca Bencana

8 Program Kedaruratan dan Logistik
1 Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana
2 Pengadaan Logistik Tanggap Darurat

3 Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pelaksana Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

NO	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	SOPD Pelakasanan	Jumlah Pegawai
1	*2*	*3*	*4*
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	136
		Sekretariat DPRD	26
		Kecamatan Dusun Selatan	66
		Kecamatan Dusun Hilir	23
		Kecamatan Dusun Utara	25
		Kecamatan Gunung Bintang Awai	24
		Kecamatan Karau Kuala	22
		Kecamatan Jenamas	17
2	Pengawasan	Inspektorat	34
3	Perencanaan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	46
4	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81
5	Kepegawaian	Badan Kepegaawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	47
7	Penunjang Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19
		JUMLAH	**602**

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Realisasi Alokasi dan Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 76,267,352,286.00** (*tujuh puluh enam milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah*) realisasi **Rp.**

73,823,353,659.00 (*tujuh tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau sebesar **96,80 %** yang mana ini belum termasung Belanja Tidak Langsung.

Rincian Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	ANGGARAN			REALIASAI		%	SOPD
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	REALISASI		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	**Administrasi Pemerintahan**	**10,164,016,000.00**	**33,485,820,800.00**	**7,763,850,000.00**	**51,413,686,800.00**	**50,040,633,568.00**	**97.33**	
		6,551,216,000.00	17,326,008,800.00	2,197,790,000.00	26,075,014,800.00	25,035,316,102.00	96.01	SEKDA
		1,550,200,000.00	9,949,928,000.00	2,560,800,000.00	14,060,928,000.00	13,967,439,646.00	99.34	SETWAN
		600,900,000.00	1,662,388,000.00	204,700,000.00	2,467,988,000.00	2,412,641,477.00	97.76	Kec. Ds Selatan
		268,750,000.00	939,280,000.00	652,950,000.00	1,860,980,000.00	1,845,607,300.00	99.17	Kec. Ds Hilir
		320,130,000.00	1,178,814,000.00	171,700,000.00	1,670,644,000.00	1,598,644,122.00	95.69	Kec. Ds Utara
		316,650,000.00	645,530,000.00	638,000,000.00	1,600,180,000.00	1,550,652,268.00	96.90	Kec. GBA
		296,570,000.00	806,700,000.00	793,310,000.00	1,896,580,000.00	1,852,628,454.00	97.68	Kec. K Kuala
		259,600,000.00	977,172,000.00	544,600,000.00	1,781,372,000.00	1,777,704,199.00	99.79	Kec. Jenamas
2	**Pengawasan**	455,975,000.00	3,256,777,400.00	65,550,000.00	3,778,302,400.00	3,686,006,694.00	97.56	INSPEKTORAT
3	**Perencanaan**	855,800,000.00	3,805,929,461.00	631,969,000.00	5,293,698,461.00	5,159,759,097.00	97.47	BAPPEDA
4	**Keuangan**	2,165,084,000.00	6,089,672,200.00	2,003,950,000.00	10,258,706,200.00	9,507,726,009.00	92.68	BPKAD
5	**Kepegawaian**	596,650,000.00	2,848,460,025.00	97,500,000.00	3,542,610,025.00	3,470,285,078.00	97.96	BKPSDM
6	**Pendidikan dan Pelatihan**	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	29,787,500.00	99.29	BAPPEDA
7	**Penunjang Lainnya**	159,100,000.00	1,762,348,400.00	28,900,000.00	1,950,348,400.00	1,929,155,713.00	98,91	BPBD
	JUMLAH	**14,396,625,000.00**	**51,279,008,286.00**	**10,591,719,000.00**	**76,267,352,286.00**	**73,823,353,659.00**	**96.80**	

5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah mengacu pada dokumen perencanaan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022.

Pada sistem perencanaan daerah khususnya pada Kabupaten Barito Selatan yang menangani Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah, usulan tahun 2017 didasari pada usulan masyarakat di 93 Desa / Kelurahan yang ada melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 baik di tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Barito Selatan. Semua aspirasi masyarakat dirangkum dan kompilasi dengan berbagai aspek baik itu dari segi manfaat, biaya, sumber daya manusia sampai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan dari usulan tersebut.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. Pemenuhan akan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah terus dilakukan dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh masing-masing SOPP di Kabupaten Barito Selatan dengan pembinaan dan pengawasan dilaksnanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

7. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Dilaporkan

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentunya tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan pembangunan Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah yang handal.

C. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum (Kesabangpol)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan melaksanakan urusan pemerintahan umum terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Umum (Kesbangpol) terdiri dari 1 (satu) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan urusan umum (Kesbangpol), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

NO	Urusan	SOPD Pelakasanan
1	**Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**	Badan Kesbangpol
		Satpol PP dan Damkar

2. Progam dan Kegiatan

1) Tahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan **6 (enam) Program** dan **33 (tiga puluh tiga)** Kegiatan.

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4 Penyediaan alat tulis kantor
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman
10 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
11 Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
12 Rapat Pertemuan dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Pengadaan AC Kantor
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan Konsultasi dan bimtek perencanaan Badan Kesbangpol

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja Keuangan
2 Penyusunan RKA-DPA Murni dan RKA-DPA Perubahan

5 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1 Diklat Pemantapan Wawasan Kebangsaan
2 Pembinaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
3 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (D-FPK)
4 Pengembangan dan Pengawasan Sosial ekonomi Kemasyarakatan
5 Pengembangan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

6 Singkronisasi dan Konsultasi Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
7 Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara

6 Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik

1 Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing Lainnya
2 Diklat Deteksi Dini Dalam Upaya Stabilitas Daerah
3 Pengembangan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
4 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
5 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Konflik
6 Pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
7 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

7 Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik

1 Pengembangan Tim Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu
2 Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Barito Selatan
3 Penerbitan Buku Direktori Partai Politik di Kabupaten Barito Selatan
4 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan
5 Penerbitan Buku Direktori Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya di Kabupaten Barito Selatan
6 Mengikuti Rapat-rapat Konsultasi / Pertemuan Teknis Bidang Politik Kemasyarakatan

2) Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah menetapkan **7 (tujuh) Program** dan **41 (empat puluh satu) Kegiatan.**:

1 **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan alat tulis kantor
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7 Penyediaan bahan logistik kantor
8 Penyediaan makanan dan minuman
9 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
11 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur
12 Rapat Pertemuan dan konsultasi ke luar daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal
2 Pembinaan Keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja bagi Tenaga Kerja Kontrak
3 Peningkatan Kapasitas Kecamatan

4 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan
2 Inventarisasi Penyusunan Database Anggota Satlinmas

5 **Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**

1 Pencegahan Dini dan Penanganan Korban Bencana Alam
2 Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan Kebakaran
3 Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran
4 Premi Asuransi Anggota Pemadam Kebakaran
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemadam Kebakaran

6 **Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum**

1 Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok
2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet
3 Peningkatan Pengawasan PSK
4 Peningkatan Pengawasan Pedagang Kaki Lima
5 Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan
6 Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan
7 Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur HIjau
8 Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C
9 Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan
10 Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

7 **Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan**

1 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan PPNS
2 Penyuluhan Masyarakat untuk Tertib dan Mentaati Perda
3 Investigasi Pelaksanaan Perda / Perkada

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum (kesbangpol) seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel Jumlah Pegawai Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

NO	Urusan	SOPD Pelakasanan	Jumlah Pegawai
1	Pemerintahan Umum (Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98
		JUMLAH	**126**

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2018 Realisasi Alokasi dan Anggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 4,942,449,400.00** (*empat milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) realisasi **Rp. *4,878,575,424.00*** (*empat milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebesar **98,71 %** yang mana ini belum termasung Belanja Tidak Langsung.

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

Urusan		ANGGARAN				REALISASI		SOPD
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH	REALISASI	%	
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Pemerintahan Umum (Kesbangpol)**	472,750,000.00	1,067,010,300.00	5,450,000.00	1,545,210,300.00	1,526,240,000.00	98.77	Badan Kesban gpol
		1,931,189,600.00	1,332,849,500.00	133,200,000.00	3,397,239,100.00	3,352,335,424.00	98.68	Satpol PP dan Damkar
	JUMLAH	**2,403,939,600.00**	**2,399,859,800.00**	**138,650,000.00**	**4,942,449,400.00**	**4,878,575,424.00**	**98.71**	

4. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses perencanaan pembangunan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum (kesbangpol) mengacu pada dokumen perencanaan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 – 2022.

Pada sistem perencanaan daerah khususnya pada Kabupaten Barito Selatan yang menangani Urusan Pemerintahan Umum (kesbangpol), usulan tahun 2017 didasari pada usulan masyarakat di 93 Desa / Kelurahan yang ada melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 baik di tingkat desa, kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten Barito Selatan. Semua aspirasi masyarakat dirangkum dan kompilasi dengan berbagai aspek baik itu dari segi manfaat, biaya, sumber daya manusia sampai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan dari usulan tersebut.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugasnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. Pemenuhan akan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah terus dilakukan dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada. Adapun kondisi sarana dan prasarana tersebut dikelola oleh masing-masing SOPD di Kabupaten Barito Selatan dengan pembinaan dan pengawasan dilaksnanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh masing-masing SOPD.

7. Permasalahan dan Solusi

Secara umum tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Urusaan Pemerintahan Daerah

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan, sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang ditentukan.

8. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Dilaporkan

Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentunya tidak lepas dari permasalahan dan kendala namun hal itu menjadi sebuah tantangan untuk pemecahan dengan solusi-solusi kebijakan pembangunan Urusan Pemerintahan Umum (kesbangpol) yang handal.

D. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. **Tataran Pengambilaa Kebijakan (terlampir)**
2. **Tataran Pelaksana Kebijakan (terlampir)**
   1) **Administrasi Umum (8 Aspek)**
   2) **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**
   3) **Urusan Pemerintahan Umum**
3. **Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tiingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan**

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	Ada/tidak ada PERDA	Apabila ADA: Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung	Ada	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			2	Rasio Rumah ber IMB	Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah [1] seluruhnya	- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2018, sebanyak 2.245 unit. - Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2018, sebanyak 34.422Unit. $\frac{\mathbf{2.245}}{\mathbf{34.422}}$ X 10 %	6,52 %	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota atau Kantor PTSP
			3	Keberadaan PERDA RTRW	Ada/tidak ada PERDA RTRW	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor : 4 Tahun 2014 tentang RTRWK 2016 -2034 tanggal 9 Juni 2014	Ada	Sumber data dari Dinas/Bagian Tata Kota

[1] Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili di kawasan lindung.

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
			4	Pengurusan E-KTP	Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi Jumlah Penduduk yang wajib ber-KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP 94.456 - Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP 96.017 94.456 ——— 96.017	98,37 %	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan sipil.
			5	Biaya KTP	Biaya KTP dalam PERDA	Dasar hukum: • UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU 23 Tahun 2006 tentang ADMINDUK • PERDA Nomor : -4 Tahun -2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Tidak dipungut	Sumber data dari Kependudukan dan Catatan Sipil Bilamana Perda tidak mengatur biaya, dapat diperkuat dengan SOP.
		Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)	6	Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil Satpol PP pada akhir Tahun 2018 dibagi jumlah jumlah penduduk sampai dengan Tahun 2018 x 10.000	- Personil Satpol PP (PNS) pada Tahun 2018, sebanyak = 96 orang - Penduduk pada akhir Tahun 2018, berjumlah = 130.330 orang	7,3 per 10.000 penduduk	Sumber data dari Satpol PP
		Kebijakan bidang penanganan PSK, PKL, atau PMKS.	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL, atau PMKS	Ada atau tidak ada PERDA PSK dan PKL	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya. PERDA Nomor : - Tahun - tentang - (yang mengatur PSK, PKL, atau PMKS)	Tidak ada	Sumber data dari Dinas Sosial atau Biro Hukum
		Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten	Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA KAB. BARSEL Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Ada	Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup atau Badan yang menangani kebersihan
		Penyampaian		Ketepatan waktu	Tepat atau tidak tepat	Bukti Pengiriman :	Tepat	

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	laporan kepada pemerinatah	9	penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007,	penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	LPPD Tahun 2018 disampaikan pada tanggal .... Pebruari 2019 sesuai surat pengantar No. B-/SETDA/AS.I-PEM/130/02/2019. tanggal .... Pebruari 2019.		Sumber data dari Bagian Pemerintahan/Otonomi Daerah
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2008	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: - Laporan Keuangan 2018, disampaikan pada tanggal ..... sesuai surat	Tepat/tidak	Sumber data dari Bagian Keuangan (Belum disampaikan/Masih Audit BPK RI)
			11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8 Tahun 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman: -	Tepat	Normalisasi
		Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	12	Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan Penetapan oleh Menteri/ Pimpinan LPND.	Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 4 urusan, yang terdiri dari: 1) Urusan Kesehatan a. Dinas Kesehatan b. RSUD 2) Urusan Lingkungan Hidup 3) Urusan Perhubungan 4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KB	1 Urusan	SPM yang ditetapkan Pemerintah sampai dengan Tahun 2018,sebanyak 1 urusan.
		Hubungan antar daerah	13	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lainnya	Jumlah MOU yang masih berlaku per Tahun 2018	Jumlah MOU yang masih berlaku pada Tahun 2018, sebanyak 13-MOU yang terdiri dari: 1. Perjanjian Kemitraan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Barito Selatan dengan Cocacola Foundation Indonesia.	13 MOU	Sumber data dari Sub. Bagian Protokol dan Kerjasama

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						2. Penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah 2017-2022 Kab. Barsel Pemerintah Kab. Barsel (Bappeda) dengan Universitas Palangka Raya. 3. Pelayanan Kesehatan Kunjungan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah RSUD Jaraga Sasameh Barito Selatan dengan Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. 4. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif PT. Taspen (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan 5. Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Pemerintah Daerah Kab. Barito Selatan dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK. 6. Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Pemerintah Daerah Kab. Barito Selatan dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Buntok 7. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang didaftarkan oleh Pemkab Barito Selatan Pemkab Barito Selatan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Cabang Muara Teweh 8. Bidang Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara Pemkab Barito Selatan dengan Kejaksaan Negeri Buntok 9. Bidang Sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara Perusaan daerah Air Minum Kab. Barsel dengan Kejaksaan Negeri Buntok 10. Pembinaan dan Latihan Calon Peserta Seleksi		

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						Penerimaan Anggota Polri Tahun Anggaran 2018 Kepolisian Resor Barito Selatan Daerah Kalimantan Tengah dengan Pemkab Barito Selatan 11. Pelayanan Konsultasi Hukum Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Pemkab Barito Selatan dengan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Buntok Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit 12. Penugasan tenaga Residen Tingkat Akhir ke RSUD Jaraga Sasameh Buntok dalam rangka pemenuhan pelayanan spesialis Tahun 2017 RSUD Jaraga sasameh Buntok dengan Universitas Diponegoro Semarang 13. Penyelengaraan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Pembanguna Daerah Pemkab Barito Selatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Solo		
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional [2]	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 5 program. - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5 program prioritas. **5/5**	100,00 %	Sumber data dari BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Kewenangan	15	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2018 (APBD) = 26 urusan.	100 %	Sumber data : sesuaikan

[2] Program prioritas pembangunan nasional: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
					dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%	**(26 / 26) x 100 %**		dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2018.
		Keuangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan PERDA APBD 2018	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2018 Nomor 12 Tanggal 29 Desember 2017	Tepat	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			17	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak adanya PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah	Apabila TEPAT: Sebutkan Dasar Hukumnya. PERDA Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ada	Sumber data dari BAPPEDA/BPKAD
			18	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. 36.972.603.200,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 121.569.270.500,00 3) Urusan PU dan PR Rp. 178.351.234.322,70 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp. 11.467.978.950,00 5) Urusan Trantibum Rp. 4.942.449.400,00	33,05 %	Sumber data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang diambil merupakan realisasi belanja per-urusan(saat evaluasi menggunakan data laporan keuangan yang sudah diaudit).

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						6) Urusan Sosial Rp. 1.950.348.400,00 Total Belanja pelayanan dasar Rp. 355.253.884.772.70 Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. 1.074.873.941.586,00 **Rp. 355.253.884.772,70 / Rp. 1.074.873.941.586,00 X 100%**		
			19	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan dibagi Jumlah total belanja X 100%	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2018. 1) Urusan Pendidikan Rp. 36.972.603.200,00 2) Urusan Kesehatan Rp. 121.569.270.500,00 Total Belanja Pend & Kes Rp. **158.541.873.700,00** Total Belanja APBD 2017, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 158.541.873.700,00 / Rp. 1.074.873.941.586,00 X 100%**	14,75 %	Sumber data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data diambil dari : - Dinas Pendidikan - SKPD lain yang melaksanakan urusan pendidikan
		Pelayanan Publik	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik [3] sesuai dengan peraturan	Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik	Apabila ADA: Sebutkan hukumnya , - PERBUP No. 53 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Ada	Sumber data dari Bagian Hukum

[3] Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
				perundang-undangan		dilingkungan Pemkab. Barsel		
		Kepegawaian	21	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk	- Jumlah PNS kabupaten Tahun 2018 sebanyak 3.796 orang. - Jumlah penduduk kabupaten Tahun 2018 sebanyak 130.330 orang. 3.796 ——— 130.330	0,03	Pembilang : Sumber data dari BKSDM Penyebut : Sumber data dari Bagian Dukcapil
			22	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database: SIMPEG (tentang kepegawaian)	Ada	Sumber data dari BKD
		Kelembagaan	23	Penataan SKPD	Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016	Jumlah SKPD, sbb: 1) Sekretariat Daerah = 1 unit 2) Dinas = 16 unit 3) Badan = 5 unit 4) Rumah Sakit = 1 unit 5) Lembaga Teknis lainnya = 2 unit 6) Kecamatan/Distrik = 6 unit ——— Jumlah SKPD = 31 unit	31 unit	Sumber data dari Bagian Ortal
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	PERDA yang ditetapkan	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2018	PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2018, sebanyak 12 Perda (Daftar terlampir) 1. PERDA Nomor 1 Tahun 2018 ttg Restribusi Perizinan Tertentu. 2. PERDA Nomor 2 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2011 ttg Restrisbusi Jasa Usaha 3. PERDA Nomor 3 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2013 ttg Pajak Daerah.	12 PERDA	Sumber data dari Bagian Hukum

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						4. PERDA Nomor 4 Tahun 2018 ttg Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA BARITO 5. PERDA Nomor 5 Tahun 2018 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah. 6. PERDA Nomor 6 Tahun 2018 ttg Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017. 7. PERDA Nomor 7 Tahun 2018 ttg Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barito Selatan. 8. PERDA Nomor 8 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2015 ttg Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak. 9. PERDA Nomor 9 Tahun 2018 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. 10. PERDA Nomor 10 Tahun 2018 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 11. PERDA Nomor 11 Tahun 2018 ttg Restribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat. 12. PERDA Nomor 12 Tahun 2018 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.		
		RAPERDA yang diajukan Tahun berjalan	25	RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2018	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD Tahun 2018 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan Tahun 2018	- RAPERDA yang diusulkan Tahun 2018, sebanyak 26 RAPERDA - RAPERDA yang disetujui Tahun 2018, sebanyak 12 PERDA. 12	46,15 %	Sumber data dari Bagian Hukum

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
						$\frac{}{26}$ X 100 %		
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti.	Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam Tahun 2018 x 100%	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam Tahun 2018, sebanyak 32 keputusan. - Keputusan DPRD dalam Tahun 2018, sebanyak 32 keputusan. $\frac{32}{32}$ X 100 %	100 %	Sumber data dari Setwan DPRD
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindaklanjut keputusan Bupati	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam Tahun 2018 x 100%	- Keputusan Bupati Tahun 2018, sebanyak 443 keputusan. - Keputusan Bupati Tahun 2018 yang ditindaklanjuti, sebanyak 443 keputusan. $\frac{443}{443}$ X 100 %	100%	Sumber data dari Bagian Hukum
		Tindaklanjut Peraturan Bupati	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan Kabupaten dalam Tahun 2018 x 100%	- Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti ,sebanyak 37 Perbup. - Peraturan Bupati Tahun 2018, sebanyak 37 Perbup. $\frac{\mathbf{37}}{37}$ X 100 %	100%	Sumber data dari Bagian Hukum

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERDA yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan	Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%	Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: 1) Perda Nomor -------- Tahun 2018 tentang ----- 2) Perda Nomor -------- Tahun 2018 tentang ----- 3) Dst. Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 5 **0 / 5 x 100 %**	0 %	Sumber data dari Bagian Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	PERDA tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	Ada/tidak PERDA/PerBup	Apabila ADA, Sebutkan dasar hukumnya. PERDA atau Perbup Nomor Tahun -------- tentang ---------- (konsultasi publik)	Tidak Ada	Sumber data dari Bagian Hukum/BAPPEDA
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup	Apabila ADA, - Sebutkan Nama Medianya : 1. http//:baritoselatankab.go.id - Sebutkan Perbub nomor ……. Tahun …… tentang …..	Ada	Sumber data dari Dinas Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan Dana Perimbangan	32	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2018 sebesar Rp. **974.609.081.643,00** - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2018 sebesar Rp. **797.083.390.500,00** **Rp. 974.609.081.643,00** / **Rp. 797.083.390.500,00** **X 100 %**	81,78%	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	- Belanja Langsung APBD 2018, Rp 479.485.941.278.70 - DAU Tahun 2018, sebesar Rp. 576.041.341.000,00 **Rp. 479.485.941.278.70 / Rp. 576.041.341.000,00 X 100 %**	53,07 %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Alokasi Belanja pada APBD	34	Belanja Langsung terhadap total APBD	Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%	- Total Belanja langsung APBD Tahun 2018, sebesar Rp. **479.485.941.278.70** Total Belanja APBD Tahun 2017, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 479.485.941.278.70 / Rp. 1.074.873.941.586,00 X 100%**	44,60 %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD (realisasi) X 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. **70.472.162.793.53** - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. **1.111.155.890.988.48** **Rp. 70.472.162.793.53 / Rp. 1.111.155.890.988.48 X 100%**	6.34 %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 Tahun terakhir	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2017, dengan opini: WTP/ *qualified opinion*); - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan opini: Dalam Proses	Opini Tahun 2017 = WTP Opini Tahun 2018= PROSES	Opini,: 1) WTP/ *unqualified opinion*); 2) WDP/ *qualified opinion*); 3) TMP/ *disclaimer opinion*), atau 4) TIDAK WAJAR (TW/*adverse opinion*). Opini LHP Tahun 2017, diberikan kepada Evaluator Timda pada waktu kunjungan lapangan Timda

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Besaran SILPA	37	Rasio SILPA thdp total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	- SILPA Tahun 2018, sebesar Rp **30.708.109.821.85** - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2018, sebesar Rp. **1.111.155.890.988.48** **Rp. 30.708.109.821.85 / Rp. 1.111.155.890.988.48 X 100%**	2,76 %	Sumber data berasal dari Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (BPKAD).
		Realisasi belanja	38	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2018, sebesar Rp **957.844.999.126.95** - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2018, sebesar Rp. **1.111.155.890.988.48** **Rp. 957.844.999.126.95 / Rp. 1.111.155.890.988.48 X 100%**	86,20 %	Pembilang : Sumber data berasal dari Laporan Realisasi Belanja /LRA Penyebut : sumber data berasal dari total anggaran APBD
		Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2018	- Temuan BPK RI yang ditindaklannjuti pada Tahun 2018 sebanyak 12 temuan. - Jumlah Temuan BPK RI sampai dengan Tahun 2018, sebanyak 361 temuan. **12 / 361 X 100 %**	3,32 %	Sumber data dari Inspektorat. Data merupakan rekomendasi dari jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti
12	PENGELOLAAN POTENSI	Peta potensi daerah	40	Rasio realisasi PAD 2018 terhadap potensi PAD [4]	Jumlah realisasi PAD 2018 dibagi dengan potensi PAD	- Realisasi PAD Tahun 2018, sebesar Rp. **70.472.162.793.53**	92,93 %	Sumber data dari BPKAD , angka pembagi

[4] Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
	DAERAH				X 100%	- Potensi PAD pada APBD Tahun 2018 Rp. **997.227.591.027,81** **Rp. 70.472.162.793.53** **——————————— X 100%** **Rp. 997.227.591.027,81**		menggunakan potensi PAD dalam target Tahunan dalam RPJMD
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD Tahun lalu x 100% (PAD 2018- PAD 2017) : PAD 2017 X 100%	Total PAD pada Tahun 2018 sebesar Rp. **1.111.155.890.988.48** - Total PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. **913.611.934.601,82** **(Rp. 1.111.155.890.988.48- Rp. 913.611.934.601,82)** **——————————— X 100%** **Rp. 913.611.934.601,82**	21,62 %	Sumber data dari BPKAD
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2018.	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2018	Penghargaan yang diterima, sebanyak 5 yang terdiri dari 1) Anugrah Pendidikan Nasional (28 September 2018) 2) Kabupaten Peduli HAM (11 Desember 2018) 3) Elimirasi Malaria Tingkat Nasional (11 Oktober 2018) 4) Penghargaan PWI / Pin Emas (15 Maret 2018) 5) Penghargaan Pemenuhan Hak Sipil Anak Tahun 2018. (Kategori Pratama)	5 Penghargaan	Sumber data dari Bagian Humas dan SKPD yang menerima penghargaan
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan E-procurement	Ada/Tidak	Apabila ADA Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Januari Tahun 2017.	Ada	Sumber data dari ULP. Data berupa proses Eprocurement

NO	ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian KInerja	Keterangan
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah ijin investasi dalam Tahun 2018	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2018 ada 4 Buah 1. PT. Graha Kayu Manis 2. PT. Mareta Persada 3. PT. Pika Utama Resources 4. PT Sumber Alfaria Trijaya TBK	Ada 4	Sumber data dari Kantor PTSP

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PENDIDIKAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 6 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 8 program. $\frac{6}{8} \times 100\ \%$	75 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Melanjutkan Pendidikan SD dan SMP 2. SOP ttg Pengajuan NPSN	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 35 - Jabatan yang harus ada 35 orang 35 —— X 100 % 35	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Jabatan Guru 2. Jabatan Pengawas Sekolah 3. Jabatan Penilik.	Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 1.744 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 1.744 —— 3.796	0,46	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 26 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 34 org. $\frac{26}{34}$ X 100 %	76,47 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 34 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 34 jbtn $\frac{34}{34}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 9 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						$\frac{9}{9}$ X 100 %		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% .	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **234.958.578.346,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 234.958.578.346,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	21,86 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **15.964.166.476,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **234.958.574.346,00** **Rp. 15.964.166.476,00** ——————— X 100 % **Rp. 234.958.574.346,00**	6,79 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100% (161.200.000,00/ 15.964.166.476)	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **161.200.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **15.964.166.476,00** **Rp. 161.200.000,00** ——————— X 100 % **Rp. 15.964.166.476,00**	1,01 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **161.200.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **234.958.574.346,00** **Rp. 161.200.000,00** ——————— X 100 % **Rp. 234.958.574.346,00**	0,07 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset Perangkat Daerah yang ada sbb : 1. Rekapitulasi Daftar Mutasi	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. **0,00** - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **273.366.032.184,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 273.366.032.184,00** X 100 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. $\frac{3}{3} \times 100\ \%$	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pemeliharaan Asset Perlengkapan Kantor 2. SOP tttg Pemeliharaan Gedung, Listrik dan Air 3. SOP ttg Pemeliharaan ATK 4. SOP ttg Penanganan Surat Keluar 5. SOP ttg Penanganan Surat Masuk	Ada 5	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 26 - Jabatan yang harus ada 28 orang 26 X 100 % 28	92,86 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional yang ada sbb : 1. dokter umum = 12 2. Dokter Gigi = 4 3. Perawat = 162 4. Bidan = 123 5. Analis Laborataorium = 6 6. Asisten Apoteker = 13 7. Perawat Gigi = 17 8. Apoteker = 0 9. Penyuluh Kesmas = 5 10. Sanitarian = 7 11. Tenaga Gizi = 8 Total JFT = 357	Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 431 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 431 3.796	0,11	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 26 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 28 org. 26 / 28 X 100 %	92,86 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 28 jbtn 24 / 28 X 100 %	85,71 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 14 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 15 14 / 15 X 100 %	93,3 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						15		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. 15 / 15 X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 15 program. 15 / 15 X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **174.667.107.712,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 174.667.107.712,00** / **Rp. 1.074.873.941.586,00** X 100 %	16,25 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **35.064.999.289,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **133.704.033.587,60** **Rp. 35.064.999.289,00** / **Rp. 133.704.033.587,60** X 100 %	26,23 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100% 48.711.487.399,60	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **59.700.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **48.711.487.399,60** **Rp. 59.700.000,00** / **Rp. 48.711.487.399,60** X 100 %	0,12 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **59.700.000,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **133.704.033.587,60** **Rp. 59.700.000,00** / **Rp. 133.704.033.587,60** X 100 %	0,04 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. 87.531.725.627,82 **Rp. 0** / **Rp. 118.843.986.585,47** X 100 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas/prasarana informasi yang ada 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Pos Pengaduan 4. Mobil Pusling	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dipuskesmas	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : UPT DINAS KESEHATAN RSUD JARAGA SASAMEH
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 12 program. $\frac{0}{12} \times 100\ \%$	100%	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP bidang Keperawatan 2. SOP bidang Pelayanan Medik 3. SOP bidang Pelayanan Penunjang 4. SOP bagian Tata Usaha	100%	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada 14 orang 13 X 100 % 14	92,86 %	Sumber data DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Jabatan Fungsional yang ada sbb : - Dokter 13 Orang - Apoteker 6 Orang - Bidan 14 Orang - Perawat 91 Orang - Perawat Gigi 4 Orang - Perekam Medik 1 Orang - Sanitarian 2 Orang - Fisioterapis 2 Orang - Elektromedis 2 Orang - Radiografer 4 Orang - Analis 7 Orang - Gizi Nutrisionis 6 Orang - Refraksi Optisi 2 Orang	Ada	Sumber data DUK Perangkat Daerah
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 197 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak …….. personil		Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						197 X 100%		
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 3 X 100 % 18	23,07 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbtn 12 ——— X 100 % 14	85,71 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 3 program - Program Renja Perangkat Daerah	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **65,297,943,300,00** - Total APBD Rp.	6,07 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						1.074.873.941.586,00 **Rp. 65,297,943,300,00** ——————— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**		
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **34,370,415,000,00-** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **63,062,135,891,60** **Rp. 34,370,415,000,00** ——————— X 100 % **Rp. 63,062,135,891,60**	54,50 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1,661,646,312,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **24,717,208,300,00** **Rp 1,661,646,312,00** ——————— X 100 % **Rp. 24,717,208,300,00**	6,72 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1,661,646,312,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **63,062,135,891,60** **Rp. 1,661,646,312,00** ——————— X 100 % **Rp. 63,062,135,891,60**	2,63 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 % 70.368.831.591,97	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. **10,025.874,377,93** - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **61,725,497,034,96** **Rp. 10,025.874,377,93** ——————— X 100 % **Rp. 61,725,497,034,96**	16,24 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Fasilitas/prasarana informasi yang ada 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Pos Pengaduan 4. Kotak Saran 5. X - Banner	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada dokumen hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik diRumah Sakit	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh RS

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Urusan Pekerjaan Umum**
2. **Urusan Penataan Ruang**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 8 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program $\frac{2}{8}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{1}$ X 100 %	25 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak .. yang terdiri dari:	Apabila Ada, sebutkan ada banyak .. yang terdiri dari:	Ada … SOP	Ada … SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM 1 / 1 X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM 1 / 1 X 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 27 - Jabatan yang ada, sebanyak 27 27 / 27 X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 4 / 4 X 100 %	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Tidak Ada	Tidak ada	Sumber data BKD/ PerangkatDaerah. Mengacu kondisi PerangkatDaerah terakhir/updated Tahun 2018.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 87 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil 87 / 3.796	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil 10 / 3.796	0,023	0,002	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017/ BKD.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 27 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org. $\frac{27}{27}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 org. - Jabatan yang ada, sebanyak271 jbt. $\frac{27}{27}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 19 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 19 $\frac{19}{19}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 19 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 19 program. $\frac{19}{19}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. $\frac{1}{1}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 19 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 19 program. $\frac{19}{19}$ X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-S Perangkat Daerah KPD tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **175.190.534.323,00** - Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 175.190.534.323,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **11.854.698.360,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 11.854.698.360,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	16,30 %	1,10 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **132.601.469.355,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **153.596.762.061,00** - **Rp. 92.735.014.100,00** / **Rp 153.596.762.061,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **1.669.698.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 2.902.786.668,00** **Rp. 1.669.698.000,00** / **Rp. 2.902.786.668,00** X 100 %	86,33 %	57,52 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **8.219.800.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **13.491.595.082,00** **Rp. 8.219.800.000,00** / Rp. **13.491.595.082,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 981.538.668,00** **Rp. 0,00** / Rp. **981.538.668,00** X 100 %	60,92 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **8.219.800.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **141.088.665.521,00** **Rp. 8.219.800.000,00** / **Rp. 153.596.762.061,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.902.786.668,00** **Rp. 0** / **Rp. 2.902.786.668,00** X 100 %	2,66%	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 766.730.500,00** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 662.277.944.710,60** **Rp. 766.730.500,00** / **Rp. 662.277.944.710,60** X 100 % **(ASSET JADI SATU)**	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 0** **Rp. 0,00** / **Rp. 0,00** X 100 %	0,11 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfa atkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	Urusan (1) Pekerjaan Umum	Urusan (2) Penataan Ruang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan	Sebutkan jenisnya	Jumlah sebanya1 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (BAPPEDA)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Perencanaan Pembangunan
2. Pendikan dan Pelatihan

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 0 program. 0 / 0 x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 0 program. 0 / 0 x 100 %	0 %	0 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyusunan KUA dan PPAS 2. SOP ttg Penyusunan RKPD	Ada sebanyak ... yang terdiri dari:	Ada 2 SOP	Tida Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada 20 orang 20 — x 100 % 20	- Jabatan yang ada sebanyak 1 - Jabatan yang harus ada 1 orang 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, **Perencana**	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Ada	Tida Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 47 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{47}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{3}{3.796}$	0,012	0,0007	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 20 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 20 org. $\frac{20}{20}$	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 1 org. $\frac{1}{1}$	100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbtn $\frac{20}{20}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbtn $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 16 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16 $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						$\frac{16}{16}$ X 100 %	$\frac{1}{1}$ X 100 %			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **5.243.779.600,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 5.243.779.600,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **195.000.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 195.000.000,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0.49 %	0,002 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **631.969.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **5.189.546.597,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **5.189.546.597,00**	12,18 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. 631.969.000,00 / **Rp. 5.189.546.597,00** X 100 %	**Rp. 0,00** / **Rp. 5.189.546.597,00** X 100 %			
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **115.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **3.564.821.997,00** **Rp. 115.000.000,00** / **Rp. 3.564.821.997,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **187.405.600,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 187.405.600,00** X 100 %	3,23 %	0,0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **115.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **5.189.546.597,00** **Rp. 115.000.000,00** / **Rp. 5.189.546.597,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **5.189.546.597,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 5.189.546.597,00** X 100 %	2,22 %	0,0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										(Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **9.715.032.598,67** **Rp. 0** / **Rp. 9.715.032.598,67** X 100 % (ASSET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **9.715.032.598,67** **Rp. 0** / **Rp. 9.715.032.598,67** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	Urusan (1) Perencanaan Pembangunan	Urusan (2) Pendidikan dan Pelatihan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Urusan Perumahan**
2. **Urusan Pertanahan**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{3}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program $\frac{0}{0}$ X 100 %	33,3 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup sarana dan prasarana pemakaman bidang pertamanan dan pemakaman.	Tidak Ada	Ada 13 SOP	Ada 0 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
						2. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup perawatan tanaman . 3. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup penataan fasilitas umum kota.					

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						4. SOP ttg Menyampaikan Laporan Survey,Inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Ruang Terbuka Hijau, Perawatan tanaman, penataan fasilitas umum kota dan penataan pemakaman kepada Kepala Dinas. 5. SOP ttg Menyampaikan laporan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Perumahan dalam rangka Operasional dan koordinasi pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap sarana perumahan di Kab. Barito Selatan. 6. SOP ttg Menyampaikan laporan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang Permukiman , perkotaan dan pedesaan dalam rangka operasional dan koordinasi pimpinan terhadap pelaksanaan				Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						penataan permukiman, perkotaan dan pedesaan di Kab. Barito Selatan. 7. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan Kebijakan. 8. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 9. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan. 10. SOP ttg Membuat saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 11. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 12. SOP ttg Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam				

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						rangka pengambilan keputusan kebijakan. 13. SOP ttg Menyampaikan Laporan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis Bidang Kebersihan dalam Rangka Operasionalisasi dan Koordinasi Pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap pengelolaan Kebersihan dan Persampahan,sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 12 $\frac{11}{12}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	92 %	100 %	- Perda No.3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah **Urusan (1) Perumahan**: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										3. Kasubbag Umum 4. Kasubbag Perencanaan 5. Kepala Bidang Perumahan 6. Kasi Pembangunan da Rehabilitasi Rumah 7. Kasi Penataan Perumahan,Kawasan Pengembangan 8. Kasi Perumahan Kawasan Kumuh 9. Kabid. Kawasan Permukiman 10. Kasi Jalan Lingkungan. 11. Kasi Fasilitas Umum Kota/PJU. 12. Kasi Pertamanan dan Pemakaman. **Uruasan (2) Pertanahan :** 1. Kabid Pertanahan 2. Kasi Inventarisasi Tanah 3. Kasi Pengadaan Tanah 4. Kasi Permasalahan Tanah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	0 --- x 100 % 0	0 --- x 100 % 0	0%	0 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 37 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil **37**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil **9**	0,97 %	0,24 %	DUK, Daftar Nominatif Perda 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		relevan dengan urusan terkait				——— X 100 % 3.**796**	——— X 100 % **3.796**			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. 12 ——— X 100 % 12	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 4 ——— X 100 % 4	100 %	100,00 %	DUK, Struktur Organisasi Perrda 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt. 12 ——— X 100 % 12	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 4 ——— X 100 % 4	92 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perda 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah **Urusan (1) Perumahan dan Urusan (2) Pertanahan jadi satu. Dokumen** **Mengacu pada Renstra/Renja SKPD.**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Daerah - RKA Perangkat Daerah						
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 17 $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs. Terlampir Program di SKPD
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs. Terlampir Program di SKPD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. 17	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program. 4 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2018. **Urusan (1) Permukiman :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						——— X 100 % 17	4			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7. Program Peningkatan Kapasitas Bidang Perumahan 8. Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Pengembang 9. Program Penataan dan Pemeliharaan Makam 10. Program Perumahan dan Permukiman 11. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH 12. Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU 13. Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kawasan Permukiman 14. Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni 15. Program Peningkatan Perumahan Swadaya 16. Program Pentaan Prasarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh 17. Program Pembangunan Permukiman Perkotaan **Urusan (2) Pertanahan** 1. Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan 2. Program Penyusunan Aset Tanah Daerah 3. Program Pengadaan dan Pembebasan Tanah Milik Daerah 4. Program Permasalahan Pertanahan
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **15.056.255.903,00** - Total Belanja APBD, sebesar	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **1.270.712.515,00** - Total Belanja APBD, sebesar	1,40 %	0,12 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. **1.074.873.941.586,00** - **Rp. 15.056.255.903,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	Rp. **1.074.873.941.586,00** - **Rp. 1.270.712.515,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %			
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.713.355.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesa r Rp. **15.056.255.903,00** **Rp. 3.713.355.000,00** / - **Rp 15.056.255.903,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **15.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 1.270.712.515,00** **Rp. 15.500.000,00** / **Rp. 1.270.712.515,00** X 100 %	24,66 %	1,22 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **206.135.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **5.368.043.759,00** **Rp. 266.475.000,00** / Rp. **7.535.278.950,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 789.120.000,00** **Rp. 0** / Rp. **789.120.000,00** X 100 %	3.54 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **266.475.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **15.437.334.572,00** - **Rp. 266.475.000,00** / **Rp. 15.056.255.903,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **1.270.712.515,00** **Rp. 0** / **Rp. 1.270.712.515,00** X 100 %	1,77 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	KIB per 31 Desember 2018
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 35.108.547.896,66** asset. 0 / **35.108.547.896,66** X 100 (ASET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 35.108.547.896,66** asset. 0 / **35.108.547.896,66** X 100	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah sebanyak 2 jenis: -Papan Pengumuman -Internet Dinas DPKPP	Sebutkan jenisnya 2 -Papan Pengumuman -Internet Dinas DPKPP	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	**Urusan (1) Perumahan dan Urusan (2) Pertanahan jadi satu SKPD untuk Papan Pengumuman dan Internet**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	PARTISIPASI MASYARAKAT	partisipasi masyarakat		Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media			-Mobil Keliling			**Dinas DPKPP.**
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPORAPARBUD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Kepemudaan & Olah Raga**
2. **Budaya**
3. **Pariwisata**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100	75 %	25 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Administrasi Surat Masuk 2. SOP ttg Administrasi Surat Keluar 3. SOP ttg Penerbitan SPP/SPM 4. SOP ttg Kenaikan Pangkat 5. SOP ttg Usul Kenaikan Gaji Berkala	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan TDUP 2. SOP ttg Mengikuti KAlteng Expo	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan / Pengawasan Hotel, Restoran, Rumah Makan/Minum 2. SOP ttg Pelaksanaan Pameran Stasioner 3. SOP ttg Pelaksanaan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Ada 9 SOP	Ada 2 SOP	Ada 9 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						6. SOP ttg Administrasi Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) 7. SOP ttg Administrasi Pengadaan dan Penyusunan Barang Habis Pakai 8. SOP ttg Pembinaan / Pendataan Organisasi Kepemudaan 9. SOP ttg Pelaksanaan PASKIBRAKA Kab. Barito Selatan	-	4. SOP ttg Pelaksaan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional 5. SOP ttg Pagelaran Seni PAnggng Hiburan Wisata Sanggu 6. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS 7. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan dan Pemeliharaan Obyek Wisata 8. SOP ttg Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kab. Barito Selatan 9. SOP ttg Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13 $\frac{13}{13}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{2}{4}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 5 - Jabatan yang ada, sebanyak 5 $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	50 %	100 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ up date Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 25 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	0,006	0,001	0,001	DUK, Daftar Nominatif 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 10 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 1 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. 2 / 5 X 100 %	76,92 %	25 %	40 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt. 13 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 4 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt. 5 / 5 X 100 %	100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				- RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah		3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah				
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **2.079.477.090,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 2.079.477.090,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **624.451.300,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 624.451.300,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **297.614.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 297.614.000,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	0,19 %	0,05 %	0,02 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **29.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesa r Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 29.500.000,00** / **Rp 2.108.977.090,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 297.614.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	0.01 %	0,00 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / Rp. **2.108.977.090,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / Rp. **624.451.300,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / Rp. **297.614.000,00** X 100 %	7,22 %	14,54 %	8,73 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / **Rp. 2.108.977.090,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	5,89 %	2,99 %	0,85 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dim anfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penanaman Modal

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program $\frac{2}{3}$ X 100 %	66,67 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 2. SOP ttg Izin Trayek 3. SOP ttg Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 4. SOP ttg Perizinan Bidang Pariwisata 5. SOP ttg Izin Usaha Perikanana (IUP)	Ada 5 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 20 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 20 $\frac{20}{20}$ X 100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	tidak ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 38 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{38}{3.796}$	0,012	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/ BKSDM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 18 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 19 org. $\frac{18}{19}$ X 100 %	94,74 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 20 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt. $\frac{20}{20}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 13 $\frac{13}{13}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. $\frac{13}{13}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 13 program. $\frac{13}{13}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% 1.338.226.600,00	- Total anggaran Daerah, sebesar Rp, **1.338.226.600,00** - Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 1.338.226.600,00}}{\text{Rp. } \textbf{1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,012 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **186.790.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. **1.311.983.453,00**	0,01 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Rp. 186.790.000,00 ———————— X 100 % **Rp 1.311.983.453,00**		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar R**p. 20.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **740.739.453,00** **Rp. 20.000.000,00** ———————— X 100 % **Rp. 740.739.453,00**	2,70 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **25.000.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 1.311.983.453,00** **Rp. 25.000.000,00** ———————— X 100 % **Rp. 1.311.983.453,00**	0,002 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0,00** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah,	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					100 %	sebanyak **Rp. 2.244.755.592,00** asset. **Rp. 0,00** / **Rp. 2.244.755.592,00** X 100 %		Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan 2. Baleho 3. Papan Pengaduan	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KOPERASI
2. PERDAGANGAN
3. PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. $\frac{2}{5}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. $\frac{1}{3}$ x 100 %	40 %	25 %	33,33 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 (empat) yang terdiri dari: 1. SOP tentang pembentukan koperasi dan membantu proses pembuatan Badan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 (lima) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penanganan Surat Masuk. 2. SOP tentang Pembuatan Surat Keluar.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penyelenggaraan Pameran/ Promosi Produk Daerah. 2. SOP tentang Menyampaikan Saran	Ada 4	Ada 5	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Hukum Koperasi. 2. SOP tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Koperasi. 3. SOP tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Koperasi. 4. SOP tentang Pembinaan dan Pengembanngan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi	3. SOP tentang Pemeliharaan Aset Perlengkapan Kantor (Komputer, AC, Moubiler, Mesin Tik.) 4. SOP tentang Pemeliharaan/ Pencatatan dan Pembukuan ATK. 5. SOP tentang Pemeliharaan Gedung Kantor, Listrik, Air.	dan Pertimbangan kepada Pimpinan dalam Rangka Pengambilan Keputusan atau Kebijakan.				oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada 10 orang $\frac{9}{10} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\%$	100 %	90 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{23}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	0,002	0,007	0,002	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. $\frac{8}{9}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	88,89 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbtn 9	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	100 %	90 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						——— X 100 % 4	——— X 100 % 10	——— X 100 % 4				
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 2 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program 2 ———X 100 % 2	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program 6 ———X 100 % 6	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1 ———X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		RENJA Perangkat Daerah		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1				2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.135.993.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.135.993.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 4.742.599.614,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.129.459.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.129.459.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	0,11 %	0,44 %	0,11 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **147.000.000,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **375.430.000,00** - Realisasi Belanja	0 %	3,10 %	33,24 %	Sumber data dari realisasi APBD

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Daerah	100%	Perangkat Daerah Rp **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **147.000.000,00** **Rp. 5.450.000,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **1.129.459.699,00** **Rp. 375.430.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %				tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. 0,00 - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **368.050.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 368.050.000,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.555.002.300,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 1.555.002.300,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **490.400.000,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 490.400.000,00** X 100 %	0,00 %	3,03%	6,96%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %	0,00%	0,78%	2,17%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
												LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Kependudukan dan Catatan Sipil

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program. $\frac{2}{2} \times 100\ \%$	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan KTP Elektronik. 2. SOP ttg Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.	Ada 2 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada 16 orang 12 ——— X 100 % 16	75 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 28 ——— X 100 % 3.796	0,007	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. 8 ——— X 100 % 13	66,67 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbtn $\frac{12}{12}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 9 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						$\frac{9}{9}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **5.602.291.760,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.568,00** $\frac{\textbf{Rp. 5.602.291.760,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.568,00}}$ X 100 %	0,52 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **128.945.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **5.221.197.826,00** $\frac{\textbf{Rp. 128.945.000,00}}{\textbf{Rp. 5.221.197.826,00}}$ X 100 %	2,47 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **92.182.500,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp.	3,50 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					x 100%	**2.630.034.459,00** **Rp. 92.182.500,00** X 100 % **Rp. 2.630.034.459,00**		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **92.182.500,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **5.221.197.826,00** **Rp. 92.182.500,00** X 100 % **Rp. 5.221.197.826,00**	1,77 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **2.653.665.914,80** **Rp. 0** X 100 % **Rp. 2.653.665.914,80**	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Pengumuman di Mass Media 4. Pos Pengaduan/ Kotak saran	Ada 4 Jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Ketenagakerjaan
2. Urusan Transmigrasi

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Program Nasional berdasarkan RKP Tahun 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Ketenagakerjaan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:	Ada 1 SOP	Ada ... SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM	100 %	100 %	Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	UNDANGAN	Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	$\frac{1}{1}$ X 100 %	$\frac{1}{1}$ X 100 %			
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 12 - Jabatan yang ada, sebanyak 12 $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{22}{3.902}$	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{5}{3.902}$	0,005	0,001	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. - $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. - $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt. $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 10 / 10 X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 4 / 4 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10 / 10 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4 / 4 X 100 %	100,00 %	100,00 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. 10 / 10 X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. 4 / 4 X 100 % 134,696,000.00	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **4.830.706.771,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **134.696.000,00**	0,45 %	0,01 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						- Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 4.830.706.771,00** ———————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 134.696.000,00** ———————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% 110.206.000	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **74.892.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **4.641.887.771,00** **Rp. 74.892.000,00** ———————— X 100 % **Rp 4.641.887.771,00**	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 133.311.900,00** **Rp. 0** ———————— X 100 % **Rp. 133.311.900,00**	1,61 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **110.205.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **1.238.203.159,00** **Rp. 110.205.000,00** ———————— X 100 % Rp. **1.238.203.159,00**	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 126.811.900,00** **Rp. 0,00** ———————— X 100 % Rp. **126.811.900,00**	8,90 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **110.205.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **4.641.887.771,00** **Rp. 110.205.000,00** / **Rp. 4.641.887.771,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **133.311.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 133.311.900,00** X 100 %	2,38 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 5.998.164.971,00** asset. **Rp. 0** / **Rp. 5.998.164.971,00** X 100 % (ASSET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 5.998.164.971,00** asset. **Rp. 0** / Rp. **5.998.164.971,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KETAHANAN PANGAN
2. PERTANIAN
3. PERIKANAN DAN KELAUTAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1.SOP ttg Melakukan Analisis Distribusi dan Hagra Pangan. 2.SOP ttg Koordinasi Dewan Ketahanan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan Surat Permintaan Dana. 2. SOP ttg Penyusunan Program	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Surat keluar Bidang Perikanan	Ada 4 SOP	Ada 11 SOP	Ada1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Pangan. 3.SOP ttg Melakukan Analisis Ketersediaandan Cadangan Pangandan Pemerintah. 4.SOP ttg Petunjuk Teknis, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Panganlestari TA. 2018 5. SOP ttg Surat keluar Bidang Ketahanan Pangan.	Kelembagaan dan Prasarana Penyuluh. 3. SOP ttg Penyusunan Jadwal Bimbingan Teknis Di UPTD BPP. 4. SOP ttg Bimbingan Teknis di UPTD BPP. 5. SOP ttg Penyusunan Program Penyuluhan. 6. SOP ttg Pembuatan Laporan Penyelengaraan Pemerintah(LPPD). 7. SOP ttg Pembuatan laporan Akuntabilitas KinerjaIntansi Pemerintah(Lakip). 8. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja. 9. SOP ttg Penaganan surat Masuk. 10. SOP ttg Pembuatan Surat Keluar (Sekretariat) 11. SOP ttg Penilaian Kredit Point.					dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1	100 %	100 %	100 %	Normalisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	1	— x 100 % 1				
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada 4 orang 3 / 4 X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 30 - Jabatan yang harus ada 48 orang 30 / 48 X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 / 8 X 100%	75 %	62,50 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 8 / 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 159 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 159 / 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796personil 16 / 3.796	0,002	0,042	0,004	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org. $\frac{1}{3}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 40 org. $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{5}{8}$ X 100 %	33.33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbtn $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn $\frac{5}{8}$ X 100 %	33,33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1/1 X 100 %	10 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program 10/10 X 100 %	4 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program 4/4 X 100 %				RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10/10 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4/4 X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10/10	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4/4	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2017.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	——X 100 % 10	——X 100 % 4				
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% **2.972.113.000,-**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **555,000,000,,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 555,000,000,,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **9.954.655.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 9.954.655.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **2.972.113.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 2.972.113.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	0,05 %	0,92 %	0,27 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% **554.186.447,-** **198.470.000,-** **27.580.441.256**	- Realisasi Belanja Modal Rp. 0,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 0,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **554.186.447,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 554.186.447,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **198.470.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 198.470.000,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	0 %	2,00 %	0,71 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **555.000.000,00** **Rp. 30.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 555.000.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **9.979.655.000,00** **Rp. 100.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 9.979.655.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **2.947.113.000,00** **Rp. 84.903.105,00** ——— X 100 % **Rp. 2.947.113.000,00**	5,40 %	1,00 %	2,88%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **44.187.100,00** **Rp. 30.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **7.282.250.290,00** **Rp. 100.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 84.903.105,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	0,10 %	0,34 %	0,29 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh	Jumlah asset yang tidak digunakan	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 % (ASSET JADI SATU)	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %				berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2. **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program $\frac{4}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Keluarga Berencana	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Pengaduan Secara Langsung	Ada 1 SOP	Ada 1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya,	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,	100 %	100 %	Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	UNDANG-UNDANGAN	menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		harus dilaksanakan menurut PERMEN	PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %			
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 - Jabatan yang ada, sebanyak 17 $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{3}{4}$ X 100 %	100 %	75,00 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018.
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Petugas Keluarga Berencana	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ up date Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{23}{3.796}$ X 100 %	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{5}{3.796}$ X 100 %	0,007 %	0,0008 %	DUK, Daftar Nominatif 2018
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org. $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt. $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					SKPD x 100%	Daerah, sebanyak 8 program. 8 ——— X 100 % 8	Daerah, sebanyak 4 program. 4 ——— X 100 % 4			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. 8 ——— X 100 % 8	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. 4 ——— X 100 % 4	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **6.595.470.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 6.595.470.000,00** ——————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **349.725.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 349.725.000,00** ——————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	0,69 %	0,04 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **505.747.400,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **6.595.470.040,00** **Rp. 505.747.400,00** ——————— X 100 % **Rp 6.595.470.040,00**	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 349.725.000,00** **Rp. 0,00** ——————— X 100 % **Rp. 349.725.000,00**	7,67 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **179.347.742,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.572.633.443,00** **Rp. 179.347.742,00** / Rp. **2.572.633.443,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 349.725.000,00** **Rp. 0** / Rp. **349.725.000,00** X 100 %	6,970 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **179.347.742,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **6.595.470.040,00** **Rp. 179.347.742,00** / **Rp. 6.595.470.040,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **349.725.000,00** **Rp. 0** / **Rp. 349.725.000,00** X 100 %	2,78%	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 3.550.746.271,22** **Rp. 0,00** / **Rp. 3.550.746.271,22** X 100 % (ASET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 3.550.746.271,22** asset. **Rp. 0,00** / **Rp. 3.550.746.271,22** X 100 %	0,00 %	0,00 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Bilboard 3. X-Banner 4. Poster 5. Baliho 6. Leaflet 7. Buku-buku 8. Mobil Unit Penerangan KB	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet 2. Buku-buku 3. Stiker	Jumlah sebanyak 8 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
2. **Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 4 program $\frac{4}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Keluarga Berencana	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Pengaduan Secara Langsung	Ada 1 SOP	Ada 1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya,	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya,	100 %	100 %	Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	UNDANG-UNDANGAN	menurut Peraturan Menteri (PERMEN)		harus dilaksanakan menurut PERMEN	PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %			
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 17 - Jabatan yang ada, sebanyak 17 $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{3}{4}$ X 100 %	100 %	75,00 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018.
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional Petugas Keluarga Berencana	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ up date Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{23}{3.796}$ X 100 %	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{5}{3.796}$ X 100 %	0,007 %	0,0008 %	DUK, Daftar Nominatif 2018
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org. $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 16 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 16 jbt. $\frac{16}{16}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 3 jbt. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					SKPD x 100%	Daerah, sebanyak 8 program. 8 ——— X 100 % 8	Daerah, sebanyak 4 program. 4 ——— X 100 % 4			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 8 program. 8 ——— X 100 % 8	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. 4 ——— X 100 % 4	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **6.595.470.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 6.595.470.000,00** ——————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **349.725.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 349.725.000,00** ——————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	0,69 %	0,04 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **505.747.400,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **6.595.470.040,00** **Rp. 505.747.400,00** ——————— X 100 % **Rp 6.595.470.040,00**	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 349.725.000,00** **Rp. 0,00** ——————— X 100 % **Rp. 349.725.000,00**	7,67 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **179.347.742,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.572.633.443,00** **Rp. 179.347.742,00** / Rp. **2.572.633.443,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 349.725.000,00** **Rp. 0** / Rp. **349.725.000,00** X 100 %	6,970 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **179.347.742,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **6.595.470.040,00** **Rp. 179.347.742,00** / **Rp. 6.595.470.040,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **349.725.000,00** **Rp. 0** / **Rp. 349.725.000,00** X 100 %	2,78%	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	Urusan (1) PPPA	Urusan (2) KB & KS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 3.550.746.271,22** **Rp. 0,00** / **Rp. 3.550.746.271,22** X 100 % (ASET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 3.550.746.271,22** asset. **Rp. 0,00** / **Rp. 3.550.746.271,22** X 100 %	0,00 %	0,00 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Bilboard 3. X-Banner 4. Poster 5. Baliho 6. Leaflet 7. Buku-buku 8. Mobil Unit Penerangan KB	Sebutkan jenisnya 1. Leaflet 2. Buku-buku 3. Stiker	Jumlah sebanyak 8 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PERHUBUNGAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 6 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 6 program. $\frac{6}{6} \times 100\ \%$	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 (lima) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Perhubungan SDPL & Udara 2. SOP ttg Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Kelengkapan (STK) 3. SOP ttg Pelayanan Penerbitan Surat-Surat Kapal BAwah GT.7 4. SOP ttg Pelayanan Sewa Bus 5. SOP ttg Ijin Penggunaan Kaca Berwarna	Ada 5	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 26 - Jabatan yang harus ada 30 orang 26 —— X 100 % 30	53,33 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 53 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 53 —— 3.796	0,014	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 22 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 26 org. 22 —— X 100 %	84,62 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					ada x 100%	26		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 26 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 26 jbtn 26 / 26 X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 12 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12 12 / 12 X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						12		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. $\frac{12}{12}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. $\frac{12}{12}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **7.967.415.528,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 7.967.415.528,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,74 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp.**0,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **7.590.056.988,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 7.590.056.988,00** X 100 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100% 1.491.969.632,00	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **210.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.491.969.632,00** **Rp. 210.000.000,00** / **Rp. 1.491.969.632,00** X 100 %	14,08 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **210.000.000,00** Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **7.590.056.988,00** **Rp. 210.000.000,00** / **Rp. 7.590.056.988,00** X 100 %	2,11 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset Perangkat Daerah yang ada sbb : 1. Buku Inventaris	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)		
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **14,115,745,838.00** **Rp. 0** / **Rp. 14,115,745,838.00** X 100 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Keliling 4. Website	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
2. STATISTIK

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program. $\frac{1}{2} \times 100\ \%$	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	50 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	Ada sebanyak ... yang terdiri dari:	Ada 1 SOP	Tidak Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1/1 x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1/1 x 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8/8 X 100 %	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang 4/4 X 100 %	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Daerah					Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil $\frac{19}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil $\frac{12}{3.796}$	0,010	0,010	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{7}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{3}{4}$ X 100 %	60 %	60 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbtn $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn $\frac{4}{4}$ X 100 %	60 %	60 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 3 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						$\frac{6}{6}$ X 100 %	$\frac{3}{3}$ X 100 %			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 1**.561.225.800,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 1.561.225.800,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 1**.388.240.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 1.388.240.000,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,85 %	0,85 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. 92.**000.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **4.312.114.392,00** **Rp. 92.000.000,00** / **Rp. 4.312.114.392,00** X 100 %	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **1.368.575.957,00** **Rp. 0** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %	3,03 %	3,03 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **192.347.743.00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. 2.798.714.644,00 **Rp. 192.347.743.00** / **Rp.** 2.798.714.644,00 X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **0** **Rp. 0,00** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% (ASET JADI SATU)	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **192.347.743.00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **4.312.114.392,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **1.368.575.957,00**	0,00 %	0,00 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. 192.347.743.00 / **Rp. 4.312.114.392,00** X 100 %	**Rp. 0** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %			
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **1. 783,720,900,00** **Rp. 0** / **Rp. 1. 783,720,900,00** X 100 % (ASET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **1. 783,720,900,00** **Rp. 0** / **Rp. 1. 783,720,900,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Koran 3. Booklet 4. Pamflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Koran 3. Booklet 4. Pamflet	Ada 4	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Urusan Perumahan**
2. **Urusan Pertanahan**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{3}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program $\frac{0}{0}$ X 100 %	33,3 %	0 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 13 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup sarana dan prasarana pemakaman bidang pertamanan dan pemakaman.	Tidak Ada	Ada 13 SOP	Ada 0 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
						2. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup perawatan tanaman . 3. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan terkait lingkup penataan fasilitas umum kota.					

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						4. SOP ttg Menyampaikan Laporan Survey,Inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Program Ruang Terbuka Hijau, Perawatan tanaman, penataan fasilitas umum kota dan penataan pemakaman kepada Kepala Dinas. 5. SOP ttg Menyampaikan laporan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis Bidang Perumahan dalam rangka Operasional dan koordinasi pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap sarana perumahan di Kab. Barito Selatan. 6. SOP ttg Menyampaikan laporan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis bidang Permukiman , perkotaan dan pedesaan dalam rangka operasional dan koordinasi pimpinan terhadap pelaksanaan				Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						penataan permukiman, perkotaan dan pedesaan di Kab. Barito Selatan. 7. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan Kebijakan. 8. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 9. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan. 10. SOP ttg Membuat saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 11. SOP ttg Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan. 12. SOP ttg Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada Pimpinan dalam				

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						rangka pengambilan keputusan kebijakan. 13. SOP ttg Menyampaikan Laporan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategis Bidang Kebersihan dalam Rangka Operasionalisasi dan Koordinasi Pimpinan dalam pelaksanaan kebijakan terhadap pengelolaan Kebersihan dan Persampahan,sarana dan prasarana kebersihan serta pengelolaan air limbah di Kabupaten Barito Selatan				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 11 - Jabatan yang ada, sebanyak 12 $\frac{11}{12}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	92 %	100 %	- Perda No.3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah **Urusan (1) Perumahan**: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										3. Kasubbag Umum 4. Kasubbag Perencanaan 5. Kepala Bidang Perumahan 6. Kasi Pembangunan da Rehabilitasi Rumah 7. Kasi Penataan Perumahan,Kawasan Pengembangan 8. Kasi Perumahan Kawasan Kumuh 9. Kabid. Kawasan Permukiman 10. Kasi Jalan Lingkungan. 11. Kasi Fasilitas Umum Kota/PJU. 12. Kasi Pertamanan dan Pemakaman. **Uruasan (2) Pertanahan :** 1. Kabid Pertanahan 2. Kasi Inventarisasi Tanah 3. Kasi Pengadaan Tanah 4. Kasi Permasalahan Tanah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	0 --- x 100 % 0	0 --- x 100 % 0	0%	0 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 37 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil **37**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil **9**	0,97 %	0,24 %	DUK, Daftar Nominatif Perda 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		relevan dengan urusan terkait				——— X 100 % 3.**796**	——— X 100 % **3.796**			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. 12 ——— X 100 % 12	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 4 ——— X 100 % 4	100 %	100,00 %	DUK, Struktur Organisasi Perrda 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt. 12 ——— X 100 % 12	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 4 ——— X 100 % 4	92 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perda 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah **Urusan (1) Perumahan dan Urusan (2) Pertanahan jadi satu. Dokumen** **Mengacu pada Renstra/Renja SKPD.**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Daerah - RKA Perangkat Daerah						
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 17 $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs. Terlampir Program di SKPD
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 17 program. $\frac{17}{17}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan Renja-SKPD ybs. Terlampir Program di SKPD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 15 program. 17	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 1 program. 4 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2017 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2018. **Urusan (1) Permukiman :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						——— X 100 % 17	4			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7. Program Peningkatan Kapasitas Bidang Perumahan 8. Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Pengembang 9. Program Penataan dan Pemeliharaan Makam 10. Program Perumahan dan Permukiman 11. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH 12. Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU 13. Program Peningkatan Kapasitas Bidang Kawasan Permukiman 14. Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni 15. Program Peningkatan Perumahan Swadaya 16. Program Pentaan Prasarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh 17. Program Pembangunan Permukiman Perkotaan **Urusan (2) Pertanahan** 1. Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan 2. Program Penyusunan Aset Tanah Daerah 3. Program Pengadaan dan Pembebasan Tanah Milik Daerah 4. Program Permasalahan Pertanahan
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **15.056.255.903,00** - Total Belanja APBD, sebesar	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **1.270.712.515,00** - Total Belanja APBD, sebesar	1,40 %	0,12 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. **1.074.873.941.586,00** - **Rp. 15.056.255.903,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	Rp. **1.074.873.941.586,00** - **Rp. 1.270.712.515,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %			
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.713.355.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesa r Rp. **15.056.255.903,00** **Rp. 3.713.355.000,00** / - **Rp 15.056.255.903,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **15.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 1.270.712.515,00** **Rp. 15.500.000,00** / **Rp. 1.270.712.515,00** X 100 %	24,66 %	1,22 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **206.135.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **5.368.043.759,00** **Rp. 266.475.000,00** / Rp. **7.535.278.950,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 789.120.000,00** **Rp. 0** / Rp. **789.120.000,00** X 100 %	3.54 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 266.475.000,00 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 15.437.334.572,00 - **Rp. 266.475.000,00** / **Rp. 15.056.255.903,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.270.712.515,00 **Rp. 0** / **Rp. 1.270.712.515,00** X 100 %	1,77 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	KIB per 31 Desember 2018
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 35.108.547.896,66** asset. 0 / **35.108.547.896,66** X 100 (ASET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 35.108.547.896,66** asset. 0 / **35.108.547.896,66** X 100	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Jumlah sebanyak 2 jenis: -Papan Pengumuman -Internet Dinas DPKPP	Sebutkan jenisnya 2 -Papan Pengumuman -Internet Dinas DPKPP	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	**Urusan (1) Perumahan dan Urusan (2) Pertanahan jadi satu SKPD untuk Papan Pengumuman dan Internet**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	Urusan (1) Perumahan	Urusan (2) Pertanahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	PARTISIPASI MASYARAKAT	partisipasi masyarakat		Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media			-Mobil Keliling			**Dinas DPKPP.**
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (KESBANGPOL)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. $\frac{1}{2} \times 100\ \%$	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah. 2. SOP ttg Surat Masuk dan Surat Keluar.	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 13 - Jabatan yang harus ada 14 orang 13 — X 100 % 14	92,86 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 25 ——— 3.796	0,007	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 12 _____X 100 % 13	92,31 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbtn $\frac{14}{14}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 7 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					Perangkat Daerah x 100%	$\frac{7}{7}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **4.126.014.340,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 4.126.014.340,00}}{\textbf{Rp. 916.680.252.548,27}}$ X 100 %	0,38 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **5.450.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.973.820.328,00** $\frac{\textbf{Rp. 5.450.000,00}}{\textbf{Rp. 3.973.820.328,00}}$ X 100 %	0,14 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **19.257.385,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.244.880.000,00** **Rp. 19.257.385,00** / **Rp. 1.244.880.000,00** X 100 %	1,55 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **19.257.385,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.973.820.328,00** **Rp. 19.257.385,00** / **Rp. 3.973.820.328,00** X 100 %	0,48 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. .	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	**1.129.338.379,00** **Rp. 0** / **Rp. 1.129.338.379,00** X 100 %		Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN (SATPOL PP DAN DAMKAR)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program. $\frac{0}{2}$ x 100 %	0 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 (satu) yang terdiri dari: 1. SOP ttgPetunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Parja Kab. Barito Selatan.	Ada 1	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 15 - Jabatan yang harus ada 16 orang 15 —— X 100 % 16	94 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 97 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 97 —— 3.796	0,026	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 15 org. - Pejabat yang ada, sebanyak15 org. 15 —— X 100 % 15	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 15 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 15 jbtn $\frac{15}{15}$ X 100 %	100,00 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 7 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						$\frac{7}{7}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 7 program. $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **11.127.545.400,00** - Total APBD Rp. 1.**074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 11.127.545.400,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	1,04 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **126.122.200,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **11.127.545.400,00** $\frac{\textbf{Rp. 126.122.200,00}}{\textbf{Rp. 10.414.184.658,00}}$ X 100 %	1,21 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100% 53,968,708.00	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. 53.968.708,00 - Realsiasi Barang dan jasa Rp. 3.352.335.424,00 **Rp. 53.968.708,00** ——————— X 100 % **Rp. 3.352.335.424,00**	1,61 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **53.968.708,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **1-10.414.184.658,00** **Rp. 53.968.708,00** ——————— X 100 % **Rp. 10.414.184.658,00**	0,52 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	4.216.258.520,69 **Rp. 0** / **Rp. 4.216.258.520,69** X 100 %		Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DAERAH (SETDA)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 3 — x 100 % 3	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 17 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Koordinasi dan Konsultasi Program/Kegiatan Pembangunan. 2. SOP ttg Laporan Triwulan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan BL Lingkup Setda. Kab. Barito Selatan 3. SOP ttg Tindak Lanjut LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). 4. SOP ttg Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan BL Lingkup Setda. Kab. Barito Selatan 5. SOP ttg Pengumpulan Dokumen Anjab SOPD	Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						6. SOP ttg Penyusunan/Pembuatan Buku Inventaris Jabatan Kab. Barito Selatan. 7. SOP ttg Penyampaian Data Wajib Lapor LHKPN 8. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Setda Kab. Barito Selatan. 9. SOP ttg Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Setda Kab. Barito Selatan. 10. SOP ttg Pengajuan Mengikuti Bimtek dan Pencairan Dana Mengikuti Bimtek. 11. SOP ttg Pengumpulan LAKIP SKPD 12. SOP ttg Penyusunan LAKIP Kabupaten. 13. SOP ttg Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah. 14. SOP ttg Permintaan User ID / Password Anggota POKJA ULP 15. SOP ttg Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) 16. SOP ttg Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) 17. SOP ttg Pemelihan Penyedia Barang/Jasa (METC Pascakualifikassi 1 Sampul)		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x	- Jabatan yang ada sebanyak 43 - Jabatan yang harus ada 43 orang	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					100%	43 —— X 100 % 43		
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 131 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil 131 —— **3.902**	0,034	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 43 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 43 org. 43 —— X 100 % 43	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 43 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 43 jbtn 43 —— X 100 % 43	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 29 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 29 $\frac{29}{29}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 29 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 29 program. $\frac{29}{29}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 29 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 29 program. $\frac{29}{29}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **38.481.631.139,16** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 38.481.631.139,16}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	3,58 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **2.168.552.051,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **37.394.555.601,00** $\frac{\textbf{Rp. 2.168.552.051,00}}{\textbf{Rp. 37.394.555.601,00}}$ X 100 %	7,89 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1.714.627.879,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **21.740.457.051,00**	4,59 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 1.714.627.879,00 / **Rp. 21.740.457.051,00** X 100 %		
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1.714.627.879,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **37.394.555.601,00** **Rp. 1.714.627.879,00** / **Rp. 37.394.555.601,00** X 100 %	13,59 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. . **9.215.730.260,12** - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **109.074.235.676,58** **Rp. 9.215.730.260,12** / **Rp. 109.074.235.676,58** X 100 %	8,45 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Website	Ada 3 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Rumah RSUD Jaraga Sasameh dan Pelayanan Puskesmas Buntok	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program $\frac{0}{3}$ X 100 %	0 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Fasilitasi rapat paripurna DPRD 2. SOP ttg Fasilitasi keputusan DPRD	Ada 2 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang disi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 10 $\frac{10}{10}$ X 100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	tidak ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Daerah , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{25}{3.796}$	0,007	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018 / BKSDM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org. $\frac{7}{10}$ X 100 %	70 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbt. $\frac{10}{10}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, **16.577.586.520,00** - Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 16.577.586.520,00** ——————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	1.54 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah sebesar Rp. **2.531.813.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. **16.291.727.573,00** **Rp. 2.531.813.000,00** ——————— X 100 % **Rp 16.291.727.573,00**	15.54%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah , sebesar Rp. **364.549.435,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **9.905.961.646,00** **Rp. 364.549.435,00** ——————— X 100 % **Rp. 9.905.961.646,00**	3.49 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **364.549.435,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 16.291.727.573,00** **Rp. 364.549.435,00** / **Rp. 16.291.727.573,00** X 100 %	2,24 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp.0,00** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 50.432.660.118,24** asset. **Rp. 0,00** / **Rp. 50.432.660.118,24** X 100 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Banner/Baleho 2. Kliping Koran	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 3 — x 100 % 3	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penagihan Pajak Dan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2. 2.SOP tttg Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah 3. SOP ttg Penagihan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 27 - Jabatan yang harus ada 29 orang 27 —— X 100 % 29	93,10 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 75 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 75 —— 3.796	0,026	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 201 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 27 org. 21	77,78 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					Perangkat Daerah yang ada x 100%	—— X 100 % 27		
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 27 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 27 jbtn 27 —— X 100 % 27	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 11 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 11 11 —— X 100 % 11	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA Perangkat	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Daerah, sebanyak 11 program. $\frac{11}{11}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. $\frac{11}{11}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **31.976.359.097,70** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 31.976.359.097,70}}{\textbf{Rp. 916.680.252.548,27}}$ X 100 %	2,97 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **2.003.950.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **10.258.706.200,00** $\frac{\textbf{Rp. 2.003.950.000,00}}{\textbf{Rp. 10.258.706.200,00}}$ X 100 %	19,53 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **55.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **6.089.672.200,00** **Rp. 55.000.000,00** / **Rp. 6.089.672.200,00** X 100 %	0,53%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **55.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **10.258.706.200,00** **Rp. 55.000.000,00** / **Rp. 10.258.706.200,00** X 100 %	0,53 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. . **0,00** Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **38.735.487.635,46**	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 0,00 / **Rp. 38.735.487.635,46** X 100 %		2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Ada 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKSDM)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 3 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 3 — x 100 % 3	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2017 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan Surat Dinas 2. SOP ttg Pembuatan Nota Dinas 3. SOP ttg Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (LPPD) 4. SOP ttg Pembuatan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 5. SOP ttg Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Ada 5	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada 12 orang $\frac{10}{12} \times 100\ \%$	83,3 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 36 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil $\frac{\mathbf{36}}{\mathbf{3.796}}$	0,95 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak - org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. 0 / 0 X 100 %	0%	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbtn 10 / 10 X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada 3 jenis Dokumen: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 9 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 9 / X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						9		
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2017.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **3.542.610.025,-** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.542.610.025,-}}{\textbf{Rp.1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,33 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah	- Realisasi Belanja Modal Rp. **97.500.000,-**	2,98 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				Daerah	x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.470.285.078** **Rp. 97.500.000,00** ——————— X 100 % **Rp. 3.270.100.475**		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. 70.000.000,- - Realsiasi Barang dan jasa Rp. 2.782.735.078 **Rp. 70.000.000** ——————— X 100 % **Rp. 2.782.735.078**	2,08 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **70.000.000,-** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.470.285.078** **Rp. 70.000.000,-** ——————— X 100 % **Rp. 3.470.285.078,-**	2,52 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb :	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	DAERAH			Perangkat Daerah	asset Perangkat Daeah	1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)		dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, - Rp. 3.052.673.460,- **Rp. 0** / **Rp. 3.052.673.460** X 100 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papa Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Website	Ada 2	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA PD : INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO SELATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 2 program $\frac{2}{4}$ X 100 %	50,00 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 20 yang terdiri dari: 1. SOP tentang pemeriksaan reguler; dan 2. SOP tentang Penanganan Kasus dan Pengaduan Masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 3. SOP tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi 4. SOP tentang Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan 5. SOP tentang Pelaksanaan Reviu Periodik Anggaran Operasional 6. SOP tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Ada 20 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						SOPD Kabupaten Barito Selatan 7. SOP tentang Peta Kompetensi 8. SOP tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan 9. SOP tentang Inventarisasi Data dan Desk TLHP APFP 10. SOP tentang Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 11. SOP tentang Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas 12. SOP tentang Administrasi Penanganan Surat Masuk 13. SOP tentang Administrasi Pengusulan Kenaikan pangkat PNS Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 14. SOP tentang Kepegawaian PNS Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 15. SOP tentang Penangan Barang Milik Daerah 16. SOP tentang Penanganan Administrasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 17. SOP tentang Pengamanan dan Penyimpanan Berkas Pengawasan 18. SOP tentang Pengusulan Anggaran Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 19. SOP tentang Penyusunan LaKIP 20. SOP tentang Crash Program Inspektorat Kabupaten Barito Selatan		

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 7 $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisas Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, **Auditor**	Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 36 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{36}{3.796}$ X 100 %	0,009	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 7 org. $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 orang. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 orang. $\frac{7}{7}$ X 100 %	100 %	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA -RENJA -RKA	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	0 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp **3.778.302.400,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp **1.074.873.941.586,00** **Rp. 3.778.302.400,00** / **Rp. 1.074.873.941.586,00** X 100 %	0,35 %	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **65.550.000,00** - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp **3.686.006.694,00** **Rp. 65.550.000,00** / **Rp. 3.686.006.694,00** X 100 %	1,78 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **94.951.002,00** - Total realisasi belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.186.631.694,00** **Rp. 94.951.002,00** / **Rp. 3.186.631.694,00** X 100 %	2,98 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **94.951.002,00** - Total realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp **3.686.006.694,00** **Rp. 94.951.002,00** / **Rp. 3.686.006.694,00** X 100 %	2,58 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. LO 3. LPE 4. Neraca 5. CaLK	Ada sebanyak 5 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Kartu Inventaris Barang
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,00 - Asset yang dikuasai SOPD, sebanyak Rp.**3.626.219.739**	0%	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pos pengaduan (tromol pos 5000)	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : BADAN PENANGULANGA BENCANA DAERAH (BPBD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 0 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 0 — x 100 % 3	0 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengelolaan Naskah Dinas Masuk 2. SOP ttg Penyusunan LAKIP 3. SOP ttg Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencegahan Tanggap Darurat 4. SOP ttg Pengarahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik 5. SOP ttg Penyaluran Bahan Logistik Tanggap Darurat Bencana 6. SOP ttg Koordinasi dan Pemantauan	Ada 6 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Pelaporan pada saat Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 5 - Jabatan yang harus ada 5 5 —— X 100 % 5	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 20 —— 3.796	0,005	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbtn $\frac{5}{5}$ X 100 %	40,00 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 8 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 $\frac{8}{8}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **2.980.456.129,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 2.980.456.129,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,28 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **28.900.00,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **2.953.524.636,00**	0,98 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 28.900.000,00 / **Rp. 2.953.524.636,00** X 100 %		
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **89.509.900,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.301.944.200,00** **Rp. 89.509.900,00** / **Rp. 1.301.944.200,00** X 100 %	13,39 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **89.509.900,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **2.953.524.636,00** **Rp. 89.509.900,00** / **Rp. 2.953.524.636,00** X 100 %	4,22 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. KIB	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp.	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	0000000 **Rp. 0** ——————— X 100 % **Rp. 1.700.06 0.098,00**		Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Ada 1	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN DUSUN SELATAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program $\frac{0}{3}$ X 100 %	0 %	3 Progaram terlampir di Renstra Kecamatan
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Perencanaan dan Keuangan 2. SOP ttg Pengelolaan Keuangan Kantor 3. SOP ttg Penyusunan Rencana Program Kecamatan.	Ada 3 SOP	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	0 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 23 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 23 $\frac{23}{23}$ X 100 %	100%	Sumber data BKSDM/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisas Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------. 1. Jabatan Fungsional Umum	tidak ada	Data SK Jabatan Fungsional Umum Terlampir di Lampiran.
4S	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 69 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{69}{3.796}$	0,023	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 23 org. $\frac{8}{23}$ X 100 %	39,13 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2017.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 23 jbt. $\frac{23}{23}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 2. RKA	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	0 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 7.483.010.720,00,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 7.483.988,000,00,-}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,52 %	Mengacu APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat x 100% - 204.700.000.00,-	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 204.700.000,00,-** - Total Belanja Daerah, sebesar Rp. **7.483.010.720,00** $\frac{\textbf{Rp. 204.700.000,,00,-}}{\textbf{Rp 7.483.010.720,00}}$ **X 100 %**	2,44 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100% 333.650.000	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **545.750.000,00,-** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. **1.662.388.000,00** **Rp. 545.750.000,00** / **Rp. 1.662.388.000,00** X 100 %	8,29 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100% 333.650.000	total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **545.750.000,00,-** - Total belanja SKPD, sebesar **Rp. 7.483.010.720,00** **Rp. 545.750.000,00** / **Rp. 7.483.010.720,00** X 100 %	1,79%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. Lapaoran Operasional (LO) 5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Ada sebanyak 5 jenis	
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB - KIR	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0,00** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 4.758.319.355,00,-** asset.	0,00 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Rp. 0,00 / **Rp. 4.758.319.355,00,-** X 100 %		Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN DUSUN UTARA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. 1 — x 100 % 4	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Tentang Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Dusun Utara. 2. SOP ttg mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Dusun Utara. 3. SOP ttg Tentang Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Dusun Utara.	Ada 3	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 10 - Jabatan yang harus ada 13 orang 10 —— X 100 % 13	76,9 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 18 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 18 —— 3.796	0,005	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org. 8 —— 10	80,00 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					ada x 100%			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbtn $\frac{10}{13}$ X 100 %	76,92 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 4 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **4.134.277.680,00** - Total APBD Rp. **1.074.566.941.586** $\frac{\textbf{Rp. 4.134.277.680,00}}{\textbf{Rp. 1.074.566.941.586}}$ X 100 %	0,38 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **171.700.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.530.466.938,34** $\frac{\textbf{Rp. 171.700.000,00}}{\textbf{Rp. 3.530.466.938,34}}$ X 100 %	4,86 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **69.911.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.326.944,122,00** **Rp. 69.911.000,00** / **Rp. 1.326.944,122,00** X 100 %	5,27 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **69.911.000,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.530.466.938,34** **Rp. 69.911.000,00** / **Rp. 3.530.466.938,34** X 100 %	1,98 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. **501.567.666,67** . - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **1.619.353.536.31**	30,93 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 501.567.666,67 / **Rp. 1.619.353.536.31** X 100 %		2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Ada 1	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN DUSUN HILIR
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4} \times 100\ \%$	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Perekaman KTP-el Di Kecamatan Dusun Hilir dengan Perangkat Statis (ONLINE)	Ada 1	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 —— X 100 % 8	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil 16 —— 3.902	0,005	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org. 8 —— 8	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2017.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
					ada x 100%			
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbtn 8 / 8 X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 6 / 6 X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Daerah		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **3.113.107.148,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.113.107.148,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,28 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **640.400.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.168.172.060,00** $\frac{\textbf{Rp. 640.400.000,00}}{\textbf{Rp. 3.168.172.060,00}}$ X 100 %	20 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1.205.207.300,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **3.719.189.824,00** **Rp. 1.205.207.300,00** ——————— X 100 % **Rp. 3.719.189.824,00**	32 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **1.205.207.300,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.168.172.060,00** **Rp. 1.205.207.300,00** ——————— X 100 % **Rp. 3.168.172.060,00**	38 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. 2. 858.952.699, 73 **Rp. 0** ——————— X 100 % **Rp. 2.858.952.699,73**	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Ada 1	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN KARAU KUALA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ x 100 %	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Sekretariat 2. SOP ttg Kasi 3. SOP ttg Rekomendasi dari Kasi PPM	Ada 3	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 —— X 100 % 8	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 22 —— 3.796	0,006	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. 6 —— 8	37,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn $\frac{8}{8}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						$\frac{6}{6}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **3.914.118.327,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.914.118.327,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,36 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **780.800.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.842.944.304,00** $\frac{\textbf{Rp. 780.800.000,00}}{\textbf{Rp. 3.842.944.304,00}}$ X 100 %	20,32 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **79.360.400,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **780.758.454,00** **Rp. 79.360.400,00** / **Rp. 780.758.454,00** X 100 %	10,16 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **79.360.400,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.842.944.304,00** **Rp. 79.360.400,00** / **Rp. 3.842.944.304,00** X 100 %	2,06 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. **1.006.130.657,14** - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **2.760.675.567,00**	3,65 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 1.006.130.657,14 / **Rp. 2.760.675.567,00** X 100 %		2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di media massa melalui Musolah & Gereja 4.Kotak Saran	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN KARAU KUALA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ x 100 %	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Sekretariat 2. SOP ttg Kasi 3. SOP ttg Rekomendasi dari Kasi PPM	Ada 3	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 —— X 100 % 8	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ---------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 22 —— 3.796	0,006	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 6 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. 6 —— 8	37,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn $\frac{8}{8}$ X 100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						$\frac{6}{6}$ X 100 %		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **3.914.118.327,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.914.118.327,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,36 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **780.800.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.842.944.304,00** $\frac{\textbf{Rp. 780.800.000,00}}{\textbf{Rp. 3.842.944.304,00}}$ X 100 %	20,32 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **79.360.400,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **780.758.454,00** **Rp. 79.360.400,00** / **Rp. 780.758.454,00** X 100 %	10,16 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **79.360.400,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.842.944.304,00** **Rp. 79.360.400,00** / **Rp. 3.842.944.304,00** X 100 %	2,06 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. **1.006.130.657,14** - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **2.760.675.567,00**	3,65 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						Rp. 1.006.130.657,14 / **Rp. 2.760.675.567,00** X 100 %		2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Pengumuman di media massa melalui Musolah & Gereja 4.Kotak Saran	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4} \times 100\ \%$	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 13 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pemeliharaan Aset Perlengkapan Kantor (Komputer, Mesin Tik, AC, Mebeler dll) 2. SOP ttg Usul Kenaikan Pangkat 3. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala 4. SOP ttg Usul Pengajuan Cuti Tahunan 5. SOP ttg Penanganan Surat Keluar 6. SOP ttg Penerbitan SPP/SPM 7. SOP ttg Penyusunan Renja 8. SOP ttg Pemilihan Kepala Desa 9. SOP ttg Pemilihan BPD	Ada 13 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						10. SOP ttg Pemilihan Aparat Desa 11. SOP ttg LINMAS 12. SOP ttg Proporsal Bantuan Desa 13. SOP ttg Penanganan dan Vertifikasi ADD dan DD		
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada 9 orang 9 —— X 100 % 9	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 27 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 27 —— 3.796	0,007	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org.	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
				pendidikan pelatihan kepemimpinan	pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang ada, sebanyak 7 org. 7 —— 7		terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 7 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbtn 7 —— X 100 % 7	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Ada	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 4 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 4 —— X 100 % 4	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Program RENJA Perangkat Daerah		dalam RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %		dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **3.445.406.760,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.445.406.760,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,32 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. **602.700.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **3.385.636.581,00** $\frac{\textbf{Rp. 602.700.000,00}}{\textbf{Rp. 3.385.636.581,00}}$ X 100 %	17,80 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **59.345.500,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **642.402.268,00** **Rp. 59.345.500,00** / **Rp. 642.402.268,00** X 100 %	9,24 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **59.345.500,00** - Realisasi belanja SKPD Rp. **3.385.636.581,00** **Rp. 59.345.500,00** / **Rp. 3.385.636.581,00** X 100 %	1,75 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. KIB (A-F)	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **3.029.760.033,57** **Rp. 0**	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
						——————— X 100 % **Rp. 3.029.760.033,57**		digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos/Kotak Pengaduan 3. Pelayanan PATEN	Ada 3	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : KECAMATAN JENAMAS
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat dan Fungsi Penunjang lainnya)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 - Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ X 100 %	25 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelayanan Pembuatan E-KTP	Ada 1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 6 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 9 $\frac{6}{9}$ X 100 %	66,6 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	tidak ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 10 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{10}{3.796}$ X 100%	0,002	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 6 org. $\frac{3}{6}$ X 100 %	50,00 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2016.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 6 jbt. $\frac{5}{6}$ X 100 %	83,3 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah **Rp. 3.547.706.400,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 3.547.706.400,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,33 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar **Rp. 54.350.000,00** - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. **3.382.528.500,00** $\frac{\textbf{Rp. 54.350.000,00}}{\textbf{Rp 3.382.528.500,00}}$ **X 100 %**	1,61 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **209.110.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **974.604.199,00** **Rp 209.110.000,00** / **Rp. 974.604.199,00** X 100 %	5,58 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **209.110.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 3.382.528.500,00** **Rp. 209.110.000,00** / **Rp. 3.382.528.500,00** X 100 %	1,60 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0,00** asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak **Rp. 2.244.412.228,57** asset. **Rp. 0,00** / X 100 %	0,00 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Rp. 2.244.412.228,57		tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Informasi 2. Spanduk/Baleho	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DESA (DINSOSPMDes)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Sosial

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 2 — x 100 % 3	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 5 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. 5 — x 100 % 5	66,67 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyempurnaan Data Profil Desa/Kelurahan Se-	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks	Ada 7 SOP	Ada 7 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Kabupaten Barito Selatan 2. SOP ttg Lomba Pasar Desa Tingkat Kabupaten 3. SOP ttg Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat Kabupaten 4. SOP ttg Pendukung Musrenbang Desa/Kelurahan 5. SOP ttg Pembinaan dan Pengendalian ADD dan DD / Bagi Hasil Pajak / Retribusi	Penyandang Penyakit Sosial 2. SOP ttg Peningkatan Kemampuan (Kapacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 3. SOP ttg pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 4. SOP ttg pengembangan model kelembagaan sosial (LK3) 5. SOP ttg penyelenggaraan Hari Pahlawan 6. SOP ttg pengadaan sarana dan prasarana UEP Karang Taruna 7. SOP ttg Penanganan Masalah Strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada 13 orang 12 — x 100 % 13	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada 8 orang 7 — x 100 % 8	92,31 %	87.5 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ------.	Tidak Ada	Tida Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 28	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 20	0,007	0,005	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		dengan urusan terkait				—— 3.796	—— 3.796			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 13 —— 13	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. 7 —— 8	100 %	87,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbtn 13 —— X 100 % 13	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn 8 —— X 100 % 8	100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Daerah - RKA Perangkat Daerah						
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 8 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 8 / 8 X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 / 6 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% 1074873941586	- Total belanja SKPD, sebesar Rp, **8.476.473.622,00** - Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. , 8.476.473.622,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	- Total belanja SKPD, sebesar Rp, **619.504.200,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 619.504.200,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	0,79 %	0,006 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. **149.450.000,00** - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. **8.476.473.622,00** **Rp. 149.450.000,00** / **Rp 8.476.473.622,00** X 100	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. **0** - Total Belanja SKPD, sebesar **Rp. 619.504.200,00** **Rp. 0** / **Rp. 619.504.200,00** X 100 %	1,76 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **55.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. **3.350.388.200,00** **Rp. 55.000.000,00** / Rp. **3.350.388.200,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar **Rp. 619.504.200,00** **Rp. 0,00** / Rp. **619.504.200,00** X 100 %	1,64 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **55.000.000,00** - Total belanja SKPD, sebesar Rp. **8.476.473.622,00** **Rp. 55.000.000,00** / **Rp. 8.476.473.622,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. **619.504.200,00** **Rp. 0** / **Rp. 619.504.200,00** X 100 %	0,65 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. **7.728.852.644,00** **Rp. 0** / **Rp. 7.728.852.644,00** X 100 % **ASET JADI SATU**	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. **7.728.852.644,00** **Rp. 0** / **Rp. 7.728.852.644,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPORAPARBUD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Kepemudaan & Olah Raga**
2. **Budaya**
3. **Pariwisata**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100	75 %	25 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Administrasi Surat Masuk 2. SOP ttg Administrasi Surat Keluar 3. SOP ttg Penerbitan SPP/SPM 4. SOP ttg Kenaikan Pangkat 5. SOP ttg Usul Kenaikan Gaji Berkala	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan TDUP 2. SOP ttg Mengikuti KAlteng Expo	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan / Pengawasan Hotel, Restoran, Rumah Makan/Minum 2. SOP ttg Pelaksanaan Pameran Stasioner 3. SOP ttg Pelaksanaan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Ada 9 SOP	Ada 2 SOP	Ada 9 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						6. SOP ttg Administrasi Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) 7. SOP ttg Administrasi Pengadaan dan Penyusunan Barang Habis Pakai 8. SOP ttg Pembinaan / Pendataan Organisasi Kepemudaan 9. SOP ttg Pelaksanaan PASKIBRAKA Kab. Barito Selatan	-	4. SOP ttg Pelaksaan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional 5. SOP ttg Pagelaran Seni PAnggng Hiburan Wisata Sanggu 6. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS 7. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan dan Pemeliharaan Obyek Wisata 8. SOP ttg Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kab. Barito Selatan 9. SOP ttg Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13 $\frac{13}{13}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{2}{4}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 5 - Jabatan yang ada, sebanyak 5 $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	50 %	100 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ up date Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 25 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	0,006	0,001	0,001	DUK, Daftar Nominatif 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 10 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 1 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. 2 / 5 X 100 %	76,92 %	25 %	40 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt. 13 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 4 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt. 5 / 5 X 100 %	100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				- RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah		3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah				
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **2.079.477.090,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 2.079.477.090,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **624.451.300,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 624.451.300,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **297.614.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 297.614.000,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	0,19 %	0,05 %	0,02 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **29.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesa r Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 29.500.000,00** / **Rp 2.108.977.090,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 297.614.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	0.01 %	0,00 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / Rp. **2.108.977.090,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / Rp. **624.451.300,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / Rp. **297.614.000,00** X 100 %	7,22 %	14,54 %	8,73 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / **Rp. 2.108.977.090,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	5,89 %	2,99 %	0,85 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dim anfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DESA (DINSOSPMDes)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Pemberdayaan Masyarakat Desa
2. Sosial

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. 2 / 3 x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 5 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. 5 / 5 x 100 %	66,67 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penyempurnaan Data Profil Desa/Kelurahan Se-	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks	Ada 7 SOP	Ada 7 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Kabupaten Barito Selatan 2. SOP ttg Lomba Pasar Desa Tingkat Kabupaten 3. SOP ttg Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) Tingkat Kabupaten 4. SOP ttg Pendukung Musrenbang Desa/Kelurahan 5. SOP ttg Pembinaan dan Pengendalian ADD dan DD / Bagi Hasil Pajak / Retribusi	Penyandang Penyakit Sosial 2. SOP ttg Peningkatan Kemampuan (Kapacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 3. SOP ttg pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 4. SOP ttg pengembangan model kelembagaan sosial (LK3) 5. SOP ttg penyelenggaraan Hari Pahlawan 6. SOP ttg pengadaan sarana dan prasarana UEP Karang Taruna 7. SOP ttg Penanganan Masalah Strategi yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa			yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 12 - Jabatan yang harus ada 13 orang 12 — x 100 % 13	- Jabatan yang ada sebanyak 7 - Jabatan yang harus ada 8 orang 7 — x 100 % 8	92,31 %	87.5 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ------.	Tidak Ada	Tida Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 28 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 28	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 20 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 20	0,007	0,005	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		dengan urusan terkait				—— 3.796	—— 3.796			
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 13 —— 13	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. 7 —— 8	100 %	87,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbtn 13 —— X 100 % 13	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn 8 —— X 100 % 8	100 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Daerah - RKA Perangkat Daerah						
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 8 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 7 $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 8 program. 8 / 8 X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 / 6 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% 1074873941586	- Total belanja SKPD, sebesar Rp, **8.476.473.622,00** - Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. , 8.476.473.622,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	- Total belanja SKPD, sebesar Rp, **619.504.200,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 619.504.200,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	0,79 %	0,006 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. **149.450.000,00** - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. **8.476.473.622,00** **Rp. 149.450.000,00** / **Rp 8.476.473.622,00** X 100	- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. **0** - Total Belanja SKPD, sebesar **Rp. 619.504.200,00** **Rp. 0** / **Rp. 619.504.200,00** X 100 %	1,76 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **55.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. **3.350.388.200,00** **Rp. 55.000.000,00** / Rp. **3.350.388.200,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar **Rp. 619.504.200,00** **Rp. 0,00** / Rp. **619.504.200,00** X 100 %	1,64 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. **55.000.000,00** - Total belanja SKPD, sebesar Rp. **8.476.473.622,00** **Rp. 55.000.000,00** / **Rp. 8.476.473.622,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 0 - Total belanja SKPD, sebesar Rp. **619.504.200,00** **Rp. 0** / **Rp. 619.504.200,00** X 100 %	0,65 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa	Urusan (2) Sosial	Urusan (1) Pembedayaan Masy Desa	Urusan (2) Sosial	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Rp. **7.728.852.644,00** **Rp. 0** / **Rp. 7.728.852.644,00** X 100 % **ASET JADI SATU**	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah Rp. **7.728.852.644,00** **Rp. 0** / **Rp. 7.728.852.644,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
2. STATISTIK

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 2 program. 1 — x 100 % 2	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	50 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Ada sebanyak ... yang terdiri dari:	Ada sebanyak ... yang terdiri dari:	Tidak Ada	Tidak Ada	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang $\frac{8}{8} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\ \%$	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Daerah					Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 19 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil 19 / 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 12 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.902 personil 12 / 3.796	0,010	0,010	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. 7 / 8 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 3 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 3 / 4 X 100 %	60 %	60 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbtn 8 / 8 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4 / 4 X 100 %	60 %	60 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA 4. DPA	Ada 4 Jenis	Ada 4 Jenis	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 3 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						$\frac{6}{6}$ X 100 %	$\frac{3}{3}$ X 100 %			
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 1**.561.225.800,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 1.561.225.800,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. 1**.388.240.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** $\frac{\textbf{Rp. 1.388.240.000,00}}{\textbf{Rp. 1.074.873.941.586,00}}$ X 100 %	0,85 %	0,85 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggran)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Modal Rp. 92.**000.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **4.312.114.392,00** **Rp. 92.000.000,00** / **Rp. 4.312.114.392,00** X 100 %	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **1.368.575.957,00** **Rp. 0** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %	3,03 %	3,03 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **192.347.743.00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. 2.798.714.644,00 **Rp. 192.347.743.00** / **Rp.** 2.798.714.644,00 X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **0** **Rp. 0,00** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% (ASET JADI SATU)	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **192.347.743.00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **4.312.114.392,00** **Rp. 192.347.743.00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **1.368.575.957,00** **Rp. 0** / **Rp. 1.368.575.957,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Rp. 4.312.114.392,00				
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan yang ada sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daeah	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Inventaris barang atau asset SKPD yang ada sbb : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **1. 783,720,900,00** **Rp. 0** / **Rp. 1. 783,720,900,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **1. 783,720,900,00** **Rp. 0** / **Rp. 1. 783,720,900,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	Urusan (1) Kominfo	Urusan (2) Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Koran 3. Booklet 4. Pamflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Koran 3. Booklet 4. Pamflet	Ada 4	Ada 4	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Urusan Perpustakaan**
2. **Urusan Kearsipan**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{2}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program $\frac{0}{0}$ X 100 %	50 %	0 %	**Urusan (1) Perpustakaan** 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 2. Program Pengembangan Nilai Budaya **Urusan (2) Kearsipan** :

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) 2. SOP ttg Pelayanan Bahan Pustaka 3. SOP ttg Pelayanan Informasi dan Referensi 4. SOP ttg Pengembangan Bahan Pustaka / Koleksi 5. SOP ttg Pengolahan Bahan Pustaka 6. SOP ttg Peyimpanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 7. SOP ttg Pelayanan Perpustakaan Keliling	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peminjaman Dokumen/Arsip/Naskah Dinas 2. SOP ttg Pembuatan Daftar Isian Pemusnahan Arsip 3. SOP ttg Pemusnahan Dokumen/Arsip 4. SOP ttg Penanganan Dokumen/Arsip/Naskah Dinas Masuk	Ada 7 SOP	Ada 4 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 8 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	PERBUP No. 34 Tahun 2016, Struktur Organisasi Perbup tahun 2016. **Urusan (1) Perpustakaan** : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kasubbag Umum &

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						$\frac{8}{8}$ X 100 %	$\frac{4}{4}$ X 100 %			Kepegawaian 4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 5. Kepala Bidang Perpustakaan 6. Kasi Pengembangan Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan 7. Kasi Layanan dan Pengembangan Perpustakaan 8. Kasi Pelestarian dan Pemudayaan Gemar membaca **Uruasan (2) Kearsipan :** 1. Kabid Kearsipan 2. Kasi Pembinaan Kearsipan 3. Kasii Akusisisi dan Pengolahan Arsip 4. Kasi Preservasi dan Layanan Arsip
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional **Pustakawan Pelaksana Lanjutan**	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Ada	Tidak ada	**Urusan (1) Perpustakaan** : JFK Pustakawan Pelaksana Lanjutan **Urusan (2) Kearsipan :** -
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.902** personil $\frac{16}{3.796}$	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.902** personil $\frac{7}{3.796}$	0,004	0,001	DUK, Daftar Nominatif Perarda 2018. **Urusan (1) Perpustakaan :** 1. Kepala Dinas 1 Org 2. Sekretaris 1 Org 3. Kasubbag Umum & Kepegawaian 1 Org, 3 Staf 4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 1 Org, 2 Staf 5. Kepala Bidang Perpustakaan 1 Org

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		urusan terkait								6. Kasi Pengembangan Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan 1 Org, 1 Staf 7. Kasi Layanan dan Pengembangan Perpustakaan 1 Org , 1 Staf 8. Kasi Pelestarian dan Pemudayaan Gemar membaca 1 Org, 1 Staf **Urusan (2) Kearsipan :** 1. Kabid Kearsipan 1 Org 2. Kasi Pembinaan Kearsipan 1 Org, 1 Staf 3. Kasii Akusisisi dan Pengolahan Arsip 1 Org, 1 Staf 4. Kasi Preservasi dan Layanan Arsip 1 Org, 1 Staf
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	DUK, Struktur Organisasi Perarda 2018 **Urusan (1) Perpustakaan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Diklatpim III 2. 7 Pjb. Eselon Iva / Diklatpim IV **Urusan (2) Kearsipan** 1. 4 Pjb Eselon Iva / Diklatpim IV
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perarda 2018. **Urusan (1) Perpustakaan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Pembina Utama Muda= 1 org 2. 1 Pjb. Eselon IIIa / Pembina Tk I= 2 org 3 Pjb Eselon/Iva Penata Tk. I /III d = 4 org 4. Pjb Eselon/Iva Penata /III c = 1

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										org **Urusan (2) Kearsipan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Penata Tk I / III d= 1 org 2. Pjb Eselon/Iva Penata Tk. I /III d = 3 org
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah **Urusan (1) Perpustakaan dan Urusan (2) Kearsipan jadi satu. Dokumen Mengacu pada Renstra/Renja SKPD.**
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah. RPJMD = 5 Program RENSTRA _ Perangkat Daerah = 11 Program RENJA- Perangkat Daerah 2018 = 8 Program
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah,	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah,	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Program RENJA Perangkat Daerah		RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %			Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2018. **Urusan (1) Perpustakaan :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan **Urusan (2) Kearsipan** 7. Program Sistem Administrasi Kearsipan 8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 9. Program Penigkatan Kualitas Pelayanan Informasi 10. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranan dan Praarana Kearsipan.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **3.650.511.120,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **212.200.000,00**	0,34 %	0,02 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					100%	- Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 3.650.511.120,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 212.200.000,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **12.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.426.829.910,00** **Rp. 12.500.000,00** / **Rp 3.426.829.910,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 209.718.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 209.718.900,00** X 100 %	0,36 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **79.199.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **759.663.300,00** **Rp. 79.199.000,00** / Rp. **759.663.300,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 209.718.900,00** **Rp. 0,00** / Rp. **209.718.900,00** X 100 %	10,43 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **79.199.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.426.829.910,00** **Rp. 79.199.000,00** / **Rp. 3.426.829.910,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **209.718.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 209.718.900,00** X 100 %	2,31%	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
		Laporan keuangan	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3	Ada sebanyak	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	1. LRA 2. Neraca 3. CALK	1. LRA 2. Neraca 3. CALK	jenis	jenis	**satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	KIB per 31 Desember 2018
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 6.094.619.899,00** asset. **Rp. 0** / **Rp. 6.094.619.899,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 50.757.500,00** asset. **Rp. 0** / Rp. **50.757.500,00** X 100 %	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	**Urusan (1) Perpustakaan dan Urusan (2) Kearsipan jadi satu SKPD.**
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Urusan Perpustakaan**
2. **Urusan Kearsipan**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 2 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{2}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 0 program $\frac{0}{0}$ X 100 %	50 %	0 %	**Urusan (1) Perpustakaan** 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 2. Program Pengembangan Nilai Budaya **Urusan (2) Kearsipan** :

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 7 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) 2. SOP ttg Pelayanan Bahan Pustaka 3. SOP ttg Pelayanan Informasi dan Referensi 4. SOP ttg Pengembangan Bahan Pustaka / Koleksi 5. SOP ttg Pengolahan Bahan Pustaka 6. SOP ttg Peyimpanan dan Pelestarian Bahan Pustaka 7. SOP ttg Pelayanan Perpustakaan Keliling	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Peminjaman Dokumen/Arsip/Naskah Dinas 2. SOP ttg Pembuatan Daftar Isian Pemusnahan Arsip 3. SOP ttg Pemusnahan Dokumen/Arsip 4. SOP ttg Penanganan Dokumen/Arsip/Naskah Dinas Masuk	Ada 7 SOP	Ada 4 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 8 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	PERBUP No. 34 Tahun 2016, Struktur Organisasi Perbup tahun 2016. **Urusan (1) Perpustakaan** : 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kasubbag Umum &

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						$\frac{8}{8}$ X 100 %	$\frac{4}{4}$ X 100 %			Kepegawaian 4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 5. Kepala Bidang Perpustakaan 6. Kasi Pengembangan Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan 7. Kasi Layanan dan Pengembangan Perpustakaan 8. Kasi Pelestarian dan Pemudayaan Gemar membaca **Uruasan (2) Kearsipan :** 1. Kabid Kearsipan 2. Kasi Pembinaan Kearsipan 3. Kasii Akusisisi dan Pengolahan Arsip 4. Kasi Preservasi dan Layanan Arsip
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional **Pustakawan Pelaksana Lanjutan**	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, ----.	Ada	Tidak ada	**Urusan (1) Perpustakaan** : JFK Pustakawan Pelaksana Lanjutan **Urusan (2) Kearsipan :** -
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.902** personil $\frac{16}{3.796}$	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 3 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.902** personil $\frac{7}{3.796}$	0,004	0,001	DUK, Daftar Nominatif Perarda 2018. **Urusan (1) Perpustakaan :** 1. Kepala Dinas 1 Org 2. Sekretaris 1 Org 3. Kasubbag Umum & Kepegawaian 1 Org, 3 Staf 4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 1 Org, 2 Staf 5. Kepala Bidang Perpustakaan 1 Org

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		urusan terkait								6. Kasi Pengembangan Pengolahan dan Pembinaan Perpustakaan 1 Org, 1 Staf 7. Kasi Layanan dan Pengembangan Perpustakaan 1 Org , 1 Staf 8. Kasi Pelestarian dan Pemudayaan Gemar membaca 1 Org, 1 Staf **Urusan (2) Kearsipan :** 1. Kabid Kearsipan 1 Org 2. Kasi Pembinaan Kearsipan 1 Org, 1 Staf 3. Kasii Akusisisi dan Pengolahan Arsip 1 Org, 1 Staf 4. Kasi Preservasi dan Layanan Arsip 1 Org, 1 Staf
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	DUK, Struktur Organisasi Perarda 2018 **Urusan (1) Perpustakaan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Diklatpim III 2. 7 Pjb. Eselon Iva / Diklatpim IV **Urusan (2) Kearsipan** 1. 4 Pjb Eselon Iva / Diklatpim IV
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt. $\frac{8}{8}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perarda 2018. **Urusan (1) Perpustakaan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Pembina Utama Muda= 1 org 2. 1 Pjb. Eselon IIIa / Pembina Tk I= 2 org 3 Pjb Eselon/Iva Penata Tk. I /III d = 4 org 4. Pjb Eselon/Iva Penata /III c = 1

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										org **Urusan (2) Kearsipan** 1. 1 Pjb. Eselon IIIb / Penata Tk I / III d= 1 org 2. Pjb Eselon/Iva Penata Tk. I /III d = 3 org
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah **Urusan (1) Perpustakaan dan Urusan (2) Kearsipan jadi satu. Dokumen Mengacu pada Renstra/Renja SKPD.**
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah. RPJMD = 5 Program RENSTRA _ Perangkat Daerah = 11 Program RENJA- Perangkat Daerah 2018 = 8 Program
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah,	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah,	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Program RENJA Perangkat Daerah		RKA Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	sebanyak 6 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %			Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. $\frac{6}{6}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2018 dan dokumen DPA-SKPD tahun 2018. **Urusan (1) Perpustakaan :** 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 6. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan **Urusan (2) Kearsipan** 7. Program Sistem Administrasi Kearsipan 8. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 9. Program Penigkatan Kualitas Pelayanan Informasi 10. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Saranan dan Praarana Kearsipan.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **3.650.511.120,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **212.200.000,00**	0,34 %	0,02 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					100%	- Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 3.650.511.120,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %	- Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 212.200.000,00** / Rp. **1.074.873.941.586,00** X 100 %			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **12.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.426.829.910,00** **Rp. 12.500.000,00** / **Rp 3.426.829.910,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 209.718.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 209.718.900,00** X 100 %	0,36 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **79.199.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **759.663.300,00** **Rp. 79.199.000,00** / Rp. **759.663.300,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 209.718.900,00** **Rp. 0,00** / Rp. **209.718.900,00** X 100 %	10,43 %	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **79.199.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **3.426.829.910,00** **Rp. 79.199.000,00** / **Rp. 3.426.829.910,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **209.718.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 209.718.900,00** X 100 %	2,31%	0 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018
		Laporan keuangan	17	Keberadaan laporan keuangan	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada sebanyak 3	Ada sebanyak	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi**

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	1. LRA 2. Neraca 3. CALK	1. LRA 2. Neraca 3. CALK	jenis	jenis	**satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	KIB per 31 Desember 2018
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 6.094.619.899,00** asset. **Rp. 0** / **Rp. 6.094.619.899,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 50.757.500,00** asset. **Rp. 0** / Rp. **50.757.500,00** X 100 %	0 %	0 %	
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan 2. Leaflet 3. Mobil Keliling	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	**Urusan (1) Perpustakaan dan Urusan (2) Kearsipan jadi satu SKPD.**
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KETAHANAN PANGAN
2. PERTANIAN
3. PERIKANAN DAN KELAUTAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1.SOP ttg Melakukan Analisis Distribusi dan Hagra Pangan. 2.SOP ttg Koordinasi Dewan Ketahanan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan Surat Permintaan Dana. 2. SOP ttg Penyusunan Program	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Surat keluar Bidang Perikanan	Ada 4 SOP	Ada 11 SOP	Ada1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Pangan. 3.SOP ttg Melakukan Analisis Ketersediaandan Cadangan Pangandan Pemerintah. 4.SOP ttg Petunjuk Teknis, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Panganlestari TA. 2018 5. SOP ttg Surat keluar Bidang Ketahanan Pangan.	Kelembagaan dan Prasarana Penyuluh. 3. SOP ttg Penyusunan Jadwal Bimbingan Teknis Di UPTD BPP. 4. SOP ttg Bimbingan Teknis di UPTD BPP. 5. SOP ttg Penyusunan Program Penyuluhan. 6. SOP ttg Pembuatan Laporan Penyelengaraan Pemerintah(LPPD). 7. SOP ttg Pembuatan laporan Akuntabilitas KinerjaIntansi Pemerintah(Lakip). 8. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja. 9. SOP ttg Penaganan surat Masuk. 10. SOP ttg Pembuatan Surat Keluar (Sekretariat) 11. SOP ttg Penilaian Kredit Point.					dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1	100 %	100 %	100 %	Normalisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	1	— x 100 % 1				
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada 4 orang 3 ——— X 100 % 4	- Jabatan yang ada sebanyak 30 - Jabatan yang harus ada 48 orang 30 ——— X 100 % 48	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 ——— X 100% 8	75 %	62,50 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 8 ——— 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 159 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 159 ——— 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796personil 16 ——— 3.796	0,002	0,042	0,004	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org. $\frac{1}{3}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 40 org. $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{5}{8}$ X 100 %	33.33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbtn $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn $\frac{5}{8}$ X 100 %	33,33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1/1 X 100 %	10 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program 10/10 X 100 %	4 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program 4/4 X 100 %				RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10/10 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4/4 X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2017.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	——X 100 % 10	——X 100 % 4				
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% **2.972.113.000,-**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **555,000,000,,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 555,000,000,,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **9.954.655.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 9.954.655.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **2.972.113.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 2.972.113.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	0,05 %	0,92 %	0,27 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% **554.186.447,-** **198.470.000,-** **27.580.441.256**	- Realisasi Belanja Modal Rp. 0,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 0,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **554.186.447,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 554.186.447,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **198.470.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 198.470.000,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	0 %	2,00 %	0,71 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **555.000.000,00** **Rp. 30.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 555.000.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **9.979.655.000,00** **Rp. 100.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 9.979.655.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **2.947.113.000,00** **Rp. 84.903.105,00** ——— X 100 % **Rp. 2.947.113.000,00**	5,40 %	1,00 %	2,88%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **44.187.100,00** **Rp. 30.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **7.282.250.290,00** **Rp. 100.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 84.903.105,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	0,10 %	0,34 %	0,29 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh	Jumlah asset yang tidak digunakan	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 % (ASSET JADI SATU)	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %				berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN (DISPORAPARBUD)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. **Kepemudaan & Olah Raga**
2. **Budaya**
3. **Pariwisata**

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{4}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100	75 %	25 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 9 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Administrasi Surat Masuk 2. SOP ttg Administrasi Surat Keluar 3. SOP ttg Penerbitan SPP/SPM 4. SOP ttg Kenaikan Pangkat 5. SOP ttg Usul Kenaikan Gaji Berkala	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan TDUP 2. SOP ttg Mengikuti KAlteng Expo	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pelaksanaan Pembinaan / Pengawasan Hotel, Restoran, Rumah Makan/Minum 2. SOP ttg Pelaksanaan Pameran Stasioner 3. SOP ttg Pelaksanaan Teknis Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Ada 9 SOP	Ada 2 SOP	Ada 9 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						6. SOP ttg Administrasi Penerbitan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) 7. SOP ttg Administrasi Pengadaan dan Penyusunan Barang Habis Pakai 8. SOP ttg Pembinaan / Pendataan Organisasi Kepemudaan 9. SOP ttg Pelaksanaan PASKIBRAKA Kab. Barito Selatan	-	4. SOP ttg Pelaksaan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi dan Nasional 5. SOP ttg Pagelaran Seni PAnggng Hiburan Wisata Sanggu 6. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Bentuk POKDARWIS 7. SOP ttg Pelaksanaan Peningkatan dan Pemeliharaan Obyek Wisata 8. SOP ttg Pemilihan Putra Putri Pariwisata Kab. Barito Selatan 9. SOP ttg Penggalian dan Dokumentasi Tempat Wisata				
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 13 $\frac{13}{13}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 2 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{2}{4}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 5 - Jabatan yang ada, sebanyak 5 $\frac{5}{5}$ X 100 %	100 %	50 %	100 %	Mengacu kondisi SKPD terakhir/ up date Tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ up date Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 25 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.976** personil 7 **3.976**	0,006	0,001	0,001	DUK, Daftar Nominatif 2018.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 10 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. 10 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. 1 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 2 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 5 org. 2 / 5 X 100 %	76,92 %	25 %	40 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt. 13 / 13 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. 4 / 4 X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 5 jbt. 5 / 5 X 100 %	100 %	100 %	100 %	DUK, Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2018
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Renstra, Renja, RKA dan DPA Perangkat Daerah

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				- RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah		3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah	3. RKA Perangkat Daerah				
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 9 $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	Mengacu dokumen RKA-Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. $\frac{9}{9}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 3 program. $\frac{3}{3}$ X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **2.079.477.090,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 2.079.477.090,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **624.451.300,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 624.451.300,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **297.614.000,00** - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.477.090,00** **Rp. 297.614.000,00** / Rp. **1.074.873.477.090,00** X 100 %	0,19 %	0,05 %	0,02 %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2018
		Besaran belanja mod al	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **29.500.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesa r Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 29.500.000,00** / **Rp 2.108.977.090,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 297.614.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	0.01 %	0,00 %	0,00 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perarda tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / Rp. **2.108.977.090,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / Rp. **624.451.300,00** X 100 %	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / Rp. **297.614.000,00** X 100 %	7,22 %	14,54 %	8,73 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **152.300.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **2.108.977.090,00** **Rp. 140.871.550,00** / **Rp. 2.108.977.090,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **90.809.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **624.451.300,00** **Rp. 90.809.000,00** / **Rp. 624.451.300,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **26.000.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **297.614.000,00** **Rp. 24.992.500,00** / **Rp. 297.614.000,00** X 100 %	5,89 %	2,99 %	0,85 %	Mengacu Laporan Keuangan Perangkat Daerah Perda tahun 2018
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Neraca, **LRA,CaLK Urusan (1) dan Urusan (2) jadi satu.**
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Daftar Inventaris	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 43.274.467.341,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 43.274.467.341,00** X 100 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dim anfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	Urusan (1) Kepemudaan & OR	Urusan (2) Budaya	Urusan (3) Pariwisata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pengumuman di Media Massa	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KETAHANAN PANGAN
2. PERTANIAN
3. PERIKANAN DAN KELAUTAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 1 program. 1 — x 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1.SOP ttg Melakukan Analisis Distribusi dan Hagra Pangan. 2.SOP ttg Koordinasi Dewan Ketahanan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 11 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan Surat Permintaan Dana. 2. SOP ttg Penyusunan Program	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Surat keluar Bidang Perikanan	Ada 4 SOP	Ada 11 SOP	Ada1 SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Pangan. 3.SOP ttg Melakukan Analisis Ketersediaandan Cadangan Pangandan Pemerintah. 4.SOP ttg Petunjuk Teknis, Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Panganlestari TA. 2018 5. SOP ttg Surat keluar Bidang Ketahanan Pangan.	Kelembagaan dan Prasarana Penyuluh. 3. SOP ttg Penyusunan Jadwal Bimbingan Teknis Di UPTD BPP. 4. SOP ttg Bimbingan Teknis di UPTD BPP. 5. SOP ttg Penyusunan Program Penyuluhan. 6. SOP ttg Pembuatan Laporan Penyelengaraan Pemerintah(LPPD). 7. SOP ttg Pembuatan laporan Akuntabilitas KinerjaIntansi Pemerintah(Lakip). 8. SOP ttg Penyusunan Rencana Kerja. 9. SOP ttg Penaganan surat Masuk. 10. SOP ttg Pembuatan Surat Keluar (Sekretariat) 11. SOP ttg Penilaian Kredit Point.					dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1 — x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 1	100 %	100 %	100 %	Normalisasi

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	1	— x 100 % 1				
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 3 - Jabatan yang harus ada 4 orang 3 ——— X 100 % 4	- Jabatan yang ada sebanyak 30 - Jabatan yang harus ada 48 orang 30 ——— X 100 % 48	- Jabatan yang ada sebanyak 8 - Jabatan yang harus ada 8 orang 8 ——— X 100% 8	75 %	62,50 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 8 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 8 ——— 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 159 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil 159 ——— 3.796	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 16 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796personil 16 ——— 3.796	0,002	0,042	0,004	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 3 org. $\frac{1}{3}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 40 org. $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 5 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8 org. $\frac{5}{8}$ X 100 %	33.33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn $\frac{3}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 7 jbtn $\frac{21}{40}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 5 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbtn $\frac{5}{8}$ X 100 %	33,33 %	52,50 %	62,50 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
					jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1/1 X 100 %	10 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 program 10/10 X 100 %	4 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 program 4/4 X 100 %				RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10/10 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4/4 X 100 %	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1/1 X 100 %	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2017 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2017.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						1	——X 100 % 10	——X 100 % 4				
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100% **2.972.113.000,-**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **555,000,000,,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 555,000,000,,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **9.954.655.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 9.954.655.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **2.972.113.000,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586** **Rp. 2.972.113.000,00** ——— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586**	0,05 %	0,92 %	0,27 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% **554.186.447,-** **198.470.000,-** **27.580.441.256**	- Realisasi Belanja Modal Rp. 0,00 - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 0,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **554.186.447,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 554.186.447,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	- Realisasi Belanja Modal Rp. **198.470.000,00** - Realisasi Belanja Perangkat Daerah Rp **27.580.441.256,00** **Rp. 198.470.000,00** ——— X 100 % **Rp. 27.580.441.256,00**	0 %	2,00 %	0,71 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **555.000.000,00** **Rp. 30.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 555.000.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **9.979.655.000,00** **Rp. 100.000.000,00** ——— X 100 % **Rp. 9.979.655.000,00**	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **2.947.113.000,00** **Rp. 84.903.105,00** ——— X 100 % **Rp. 2.947.113.000,00**	5,40 %	1,00 %	2,88%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **30.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **44.187.100,00** **Rp. 30.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **100.000.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **7.282.250.290,00** **Rp. 100.000.000,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **84.903.105,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 84.903.105,00** / **Rp. 27.580.441.256,00** X 100 %	0,10 %	0,34 %	0,29 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh	Jumlah asset yang tidak digunakan	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	Urusan (1) Ketahanan Pangan	Urusan (2) Pertanian	Urusan (3) Perikanan & Kelautan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Perangkat Daerah	Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 % (ASSET JADI SATU)	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %	Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **20.090.623.316,00** **Rp. 0** / **Rp. 45.201.394.675,74** X 100 %				berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumumanran 2. Koran/Tabloid 3. Poster 4. Leaflet	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Jumlah sebanyak 4 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ------	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KOPERASI
2. PERDAGANGAN
3. PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. $\frac{2}{5}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. $\frac{1}{3}$ x 100 %	40 %	25 %	33,33 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 (empat) yang terdiri dari: 1. SOP tentang pembentukan koperasi dan membantu proses pembuatan Badan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 (lima) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penanganan Surat Masuk. 2. SOP tentang Pembuatan Surat Keluar.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penyelenggaraan Pameran/ Promosi Produk Daerah. 2. SOP tentang Menyampaikan Saran	Ada 4	Ada 5	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Hukum Koperasi. 2. SOP tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Koperasi. 3. SOP tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Koperasi. 4. SOP tentang Pembinaan dan Pengembanngan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi	3. SOP tentang Pemeliharaan Aset Perlengkapan Kantor (Komputer, AC, Moubiler, Mesin Tik.) 4. SOP tentang Pemeliharaan/ Pencatatan dan Pembukuan ATK. 5. SOP tentang Pemeliharaan Gedung Kantor, Listrik, Air.	dan Pertimbangan kepada Pimpinan dalam Rangka Pengambilan Keputusan atau Kebijakan.				oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada 10 orang $\frac{9}{10} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\%$	100 %	90 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{23}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	0,002	0,007	0,002	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. $\frac{8}{9}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	88,89 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbtn 9	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	100 %	90 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						——— X 100 % 4	——— X 100 % 10	——— X 100 % 4				
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 2 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program 2 ———X 100 % 2	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program 6 ———X 100 % 6	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1 ———X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		RENJA Perangkat Daerah		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1				2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.135.993.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.135.993.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 4.742.599.614,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.129.459.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.129.459.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	0,11 %	0,44 %	0,11 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **147.000.000,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **375.430.000,00** - Realisasi Belanja	0 %	3,10 %	33,24 %	Sumber data dari realisasi APBD

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Daerah	100%	Perangkat Daerah Rp **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **147.000.000,00** **Rp. 5.450.000,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **1.129.459.699,00** **Rp. 375.430.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %				tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. 0,00 - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **368.050.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 368.050.000,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.555.002.300,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 1.555.002.300,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **490.400.000,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 490.400.000,00** X 100 %	0,00 %	3,03%	6,96%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %	0,00%	0,78%	2,17%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
												LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2017

KABUPATEN : BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. KOPERASI
2. PERDAGANGAN
3. PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional [1] (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 2 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. $\frac{2}{5}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. $\frac{1}{4}$ x 100 %	- Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebanyak 1 program - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. $\frac{1}{3}$ x 100 %	40 %	25 %	33,33 %	Lihat Program Nasional RKP 2018 untuk masing-masing urusan, terlampir;
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 4 (empat) yang terdiri dari: 1. SOP tentang pembentukan koperasi dan membantu proses pembuatan Badan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 5 (lima) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penanganan Surat Masuk. 2. SOP tentang Pembuatan Surat Keluar.	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 (dua) yang terdiri dari: 1. SOP tentang Penyelenggaraan Pameran/ Promosi Produk Daerah. 2. SOP tentang Menyampaikan Saran	Ada 4	Ada 5	Ada 2	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana,

[1] Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						Hukum Koperasi. 2. SOP tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Koperasi. 3. SOP tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan Koperasi. 4. SOP tentang Pembinaan dan Pengembanngan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi	3. SOP tentang Pemeliharaan Aset Perlengkapan Kantor (Komputer, AC, Moubiler, Mesin Tik.) 4. SOP tentang Pemeliharaan/ Pencatatan dan Pembukuan ATK. 5. SOP tentang Pemeliharaan Gedung Kantor, Listrik, Air.	dan Pertimbangan kepada Pimpinan dalam Rangka Pengambilan Keputusan atau Kebijakan.				oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 $\frac{1}{1} \times 100\ \%$	100 %	100 %	100 %	Normalisasi
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 9 - Jabatan yang harus ada 10 orang $\frac{9}{10} \times 100\ \%$	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada 4 orang $\frac{4}{4} \times 100\%$	100 %	90 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 25 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 23 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{23}{3.796}$	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 3.796 personil $\frac{7}{3.796}$	0,002	0,007	0,002	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018 / BKSDM
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org. $\frac{8}{9}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	88,89 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jbtn 9	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbtn 4	100 %	90 %	100 %	Sumber data mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
						——— X 100 % 4	——— X 100 % 10	——— X 100 % 4				
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA.	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA 2. RENJA 3. RKA	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 2 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2 program 2 ———X 100 % 2	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 6 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program 6 ———X 100 % 6	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak program 1 program - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1 program 1 ———X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2017 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		RENJA Perangkat Daerah		Daerah	Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1				2018 dan Renja-Perangkat Daerah
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. 2 ——X 100 % 2	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program. 6 ——X 100 % 6	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. 1 ——X 100 % 1	100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah tahun 2018.
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.135.993.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.135.993.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 4.742.599.614,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	- Total Anggaran Perangkat Daerah Rp. **1.129.459.699,00** - Total APBD Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 1.129.459.699,00** ———— X 100 % **Rp. 1.074.873.941.586,00**	0,11 %	0,44 %	0,11 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x	- Realisasi Belanja Modal Rp. **0,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **147.000.000,00** - Realisasi Belanja	- Realisasi Belanja Modal Rp. **375.430.000,00** - Realisasi Belanja	0 %	3,10 %	33,24 %	Sumber data dari realisasi APBD

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Daerah	100%	Perangkat Daerah Rp **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **147.000.000,00** **Rp. 5.450.000,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	Perangkat Daerah Rp **1.129.459.699,00** **Rp. 375.430.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %				tahun 2018.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. 0,00 - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **368.050.000,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 368.050.000,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realsiasi Barang dan jasa Rp. **1.555.002.300,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 1.555.002.300,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** Realsiasi Barang dan jasa Rp. **490.400.000,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 490.400.000,00** X 100 %	0,00 %	3,03%	6,96%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **0,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **135.993.699,00** **Rp. 0,00** / **Rp. 135.993.699,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **47.085.900,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **4.742.599.614,00** **Rp. 47.085.900,00** / **Rp. 4.742.599.614,00** X 100 %	- Realisasi Belanja pemeliharaan Rp. **34.150.000,00** - Realisasi belanja Perangkat Daerah Rp. **2.040.439.740,00** **Rp. 34.150.000,00** / **Rp. 1.129.459.699,00** X 100 %	0,00%	0,78%	2,17%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah(Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Ada 3 sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca,

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
												LRA,CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat daerah	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Apabila ada sebutkan jenis dokumennya : 1. Buku Inventaris 2. Rekapitulasi Mutasi 3. KIB (A-F)	Ada	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0. - Asset yang dikuasai SKPD, Rp. **70.976.439.434,00** **Rp. 0** / **Rp. 70.976.439.434,00** X 100 %	0 %	0 %	0 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. PapaPengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Media massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Jumlah sebanyak 1 jenis	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No.	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	Urusan (1) Koperasi	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Perindustrian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda

LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN : KABUPATEN BARITO SELATAN
NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. Urusan Ketenagakerjaan
2. Urusan Transmigrasi

Diisi oleh Perangkat Daerah Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1.	**KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**	Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 3 program $\frac{3}{3}$ X 100 %	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1 program $\frac{1}{1}$ X 100 %	100 %	100 %	Program Nasional berdasarkan RKP Tahun 2018
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Ketenagakerjaan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak ... yang terdiri dari:	Ada 1 SOP	Ada ... SOP	SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	**KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-**	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah menurut Peraturan	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang sehatusnya, sebanyak 1 SPM	100 %	100 %	Normalisasi

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
	UNDANGAN	Menteri (PERMEN)		menurut PERMEN	dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	$\frac{1}{1}$ X 100 %	$\frac{1}{1}$ X 100 %			
3	**PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH**	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 12 - Jabatan yang ada, sebanyak 12 $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4 $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah`
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, --------.	Tidak Ada	Tidak Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018
4	**PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) , sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{22}{3.902}$	- PNS yang menangani urusan (2) , sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak **3.796** personil $\frac{5}{3.902}$	0,005	0,001	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 12 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org. - $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org. - $\frac{4}{4}$ X 100 %	100,00 %	100,00 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt. $\frac{12}{12}$ X 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt. $\frac{4}{4}$ X 100 %	100 %	100 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018/BKD
5	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Rentra Perangkat Daerah 2. Renja Perangkat Daerah 3. RKA Perangkat Daerah	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 10 10 / 10 X 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 4 / 4 X 100 %	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. 10 / 10 X 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. 4 / 4 X 100 %	100,00 %	100,00 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program. 10 / 10 X 100 %	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 4 program. 4 / 4 X 100 % 134,696,000.00	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2018 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2018
6	**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **4.830.706.771,00**	- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, **134.696.000,00**	0,45 %	0,01 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (Total anggran)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						- Total Belanja APBD, sebesar **1.074.873.941.586,00** **Rp. 4.830.706.771,00** ———————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**	- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. **1.074.873.941.586,00** **Rp. 134.696.000,00** ———————— X 100 % Rp. **1.074.873.941.586,00**			
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100% 110.206.000	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **74.892.000,00** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **4.641.887.771,00** **Rp. 74.892.000,00** ———————— X 100 % **Rp 4.641.887.771,00**	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 133.311.900,00** **Rp. 0** ———————— X 100 % **Rp. 133.311.900,00**	1,61 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **110.205.000,00** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. **1.238.203.159,00** **Rp. 110.205.000,00** ———————— X 100 % Rp. **1.238.203.159,00**	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **0** - Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 126.811.900,00** **Rp. 0,00** ———————— X 100 % Rp. **126.811.900,00**	8,90 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah (realisasi)	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. **110.205.000,00** - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **4.641.887.771,00** **Rp. 110.205.000,00** / **Rp. 4.641.887.771,00** X 100 %	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. **133.311.900,00** **Rp. 0** / **Rp. 133.311.900,00** X 100 %	2,38 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (LRA, Neraca, CaLK)
7	**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - KIB	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 5.998.164.971,00** asset. **Rp. 0** / **Rp. 5.998.164.971,00** X 100 % (ASSET JADI SATU)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak **Rp. 0** asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak **Rp. 5.998.164.971,00** asset. **Rp. 0** / Rp. **5.998.164.971,00** X 100 %	0 %	0 %	Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/ Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Ketenagkerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	Urusan (1) Ketenagakerjaan	Urusan (2) Transmigrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	**PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT**	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumunan	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah

LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA RPJPD	Ada/Tidak	Ada	Sumber data dari BAPPEDA(Perda Nomor 4 Tahun 2009)
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidakl	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan 5 ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 5	100 .%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	1 buah	Sumber data dari Dinas Kominfo (www.baritoselatankab .go.id)
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM/SETDA
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	2 .Keg.	Sumber data dari Kantor

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2018

KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	**Pendidikan**	**1**	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Kelompok Bermain 13.119 ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0 – 6 tahun = 13.276	98.82 %	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dpt baca tulis 96,984 ---------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 th ke atas = 100,399	96,90 %	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A 12.881 ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn = 12.289	104,81 %	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 5.346 ---------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn = 6.876	77,75 %	Pembilang berasal dari Dinas Pendidikan, Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil
		5	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 7 ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya = 15.365	0,05 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 48 ---------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs = 7.620	0,62 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 2.701 ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya = 2.701	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 2.069 ---------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya = 2.069	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 1.839 ---------- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya 2.297	80,06 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
		10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 2.402 ---------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 3.506	68,51 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**	**11**	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu 296 ---------- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama 296	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 1.901 ---------- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama 2.987	63,6 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan
		13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI 82 ---------- x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 93	88,2 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan
		14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu 8 ---------- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 8	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari lap SPM tahun 2107 DInas Kesehatan
		15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn 168 ---------- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama 187	89,83 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan
		16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai satu wilayah dalam waktu satu tahun 77 ---------- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama 77	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan
		17	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 2 2.750 ---------- x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota 19.445	14,14 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan
		18	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu 1.873 ---------- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd	97,4 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari DInas Kesehatan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Kurun waktu yang sama 1.923		
3	**Lingkungan Hidup**	**19**	Penanganan Sampah	Volume Sampah yang ditangani (M3) 26.500 M3 ---------- x 100 % Volume produksi sampah (M3) 29.200 M3	90,75 %	Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan
		20	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional tergolong baik 23 ---------- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional 51	45,10%	Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan. Tergolong baik sesuai kriteria Adipura
		21	Tempat Pembuangan sampah (TPS) per 1000 Penduduk	Jumlah daya tampung TPS (M3) 70 m3 ---------- x 1000 Jumlah Penduduk Jiwa 130.330	53,70 %	Pembilang berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah/Dinas Kebersihan dan Penyebut berasal dari Dinas/Bagian Dukcapil kemendagri
		22	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 6 ---------- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada 6	100 %	Pembilang dan Penyebut berasal dari Badan Lingkungan Hidup Daerah
4	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**23**	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik) 212,96 ---------- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten 1.035,04	20,57%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (klasifikasi kondisi seluruh panjang jalan)
		24	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 7.186 ---------- x 100 % Luas irigasi kabupaten 10.816	28,12%	Pembilang dan Penyebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		25	Rumah Tangga Per-sanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi 9.872 ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga 34.283	26,48%	yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) sumber data berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		26	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh 48,02 Ha ---------- x 100 % Luas Wilayah 29.000 Ha	0,16 %	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		27	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau 17,21 Ha ---------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB 443,37 Ha	3,88 %	Sumber data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	**28**	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 34.422 ---------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga 40.516	84.95 %	Pembilang (satuan KK yaitu jumlah KK yang tinggal dirumah bersanitasi) dan Penyebut (jumlah seluruh KK yang tinggal di Kab/Kota) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum
		29	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan pemukiman kumuh 48,02 Ha ---------- x 100 % Luas wilayah 29.000,00 Ha	0,17 %	Pembilang dan penyebut berasal dari dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
		30	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni 30.977 ---------- x 100%	90 %	Sumber data dari Dinas PU

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah seluruh rumah di Barsel 34.422		
6	**Kepemudaan & Olahraga**	**31**	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten 2 ---------- x 1000 Jumlah penduduk 130.330	1,4%	Gelanggang dan balai remaja di Kab. Barito Pembilang Sumber data dari Dispora Penyebut sumber data dari Dukcapil
		32	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 310 ---------- x 1000 Jumlah penduduk 130.330 Lapangan Olah Raga adalah : 1. Lap. Sepak bola = 61 lap. 2. Lap. Basket = 8 lap. 3. Lap. Volley = 135 lap. 4. Lap. Bulutangkis = 106 lap. 5. Lap. Renang = 0 lap. Jumlah = 310 lap.	2,37%	Jumlah sarana Olah Raga yg dikelola pemerintah termasuk yg dikelola oleh Sekolah Negeri
7	**Penanaman Modal**	**33**	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN thn 2018 – Realisasi PMDN 2017 (1.851.811.500.000–1.763.630.920.630) ---------- x 100 % Realisasi PMDN 2017 (1.763.630.920.630)	88,18 %	Sumber data dari Dinas/ Badan Penanaman Modal daerah (BPMD)
8	**Koperasi & UKM**	**34**	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif 209 ---------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi 209	100 %	Sumber data Dinas Koperasi
		35	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil 3.105 ---------- x 100 % Jumlah seluruh UKM 3.105	100%	Sumber data dari Pelayanan Administrasi Terpadau Kecamatan (PATEN) dengan melampirkan rekap SIUP

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						kecil
9	**Kependudukan & Catatan Sipil**	**36**	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 91.637 ---------- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) 96.017	95,4%	Sumber data Dinas Duk Capil
		37	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 35.591 ---------- x 1000 Jumah _penduduk 130.330	273,09	Sumber data Dinas Duk Capil
		38	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sumber data Dinas Duk Capil
10	**Tenaga Kerja**	**39**	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah Pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif 4.262 ---------- x 100 % Jumlah pekerja/buruh 4.262	100 %	Sumber data dari Dinas Ketenagakerjaan
		40	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 18 ---------- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar 1.755	30,16 %	Sumber data dari Dinas Tenaga Kerja (melampirkan rekap Surat Pengantar Rekrut)
11	**Pangan**	**41**	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada	1. SK Bupati no. 188.45/156 tahun 2018 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan 2. Perbup barsel no. 188.45/221 tahun 2018 tentang Penetapan Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Produksi Peternakan, Luas Areal Dan Produksi

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Perkebunan Dan Produksi Perikanan Kabupaten Barito Selatan
		42	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 118,27 ---------- x 100% Jumlah penduduk 130.330	0,9 %	Sumber data pembilang dari Dinas Ketahanan Pangan Jenis pangan utama : padi, jagung, Sagu, Umbi), sedangkan sumber data penyebut dari Dinas/Bagian Dukcapil
12	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**43**	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 4,097 ---------- x 100 % Jumlah pekerja perempuan 11.797	34,72 %	Melampirkan rekap data pekerja perempuan DPPKBP3A
		44	Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 5.189 ---------- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun 5.199	99,81 %	Sumber data dari Dinas PPA/Dinas Pendidikan
		45	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 11. 408 ---------- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan 32.976	34,59 %	Sumber data dari Dinas PPA/Dukcapil
13	**Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana**	**46**	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif 12,968 ---------- x 100 % Jumlah pasangan usia subur 17,288	75,01 %	Sumber data dari BKKBN
		47	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan 93 ---------- x 100 % PLKB/PKB 16	5,81 %	Sumber data dari BKKBN/ DInas Sosial/ Dinas PPPA/ KBKS

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	**Perhubungan**	**48**	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat 6 ---------- Jumlah penumpang angkutan darat 22.655	0,0002	Sumber data dari dinas Perhubungan
15	**Komunikasi & Informatika**	**49**	Web site milik pemerintah daerah	Ada www.baritoselatankab.go.id	Ada	Sumber Data dari Biro Humas/ Dinas Kominfo
		50	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun=1	1 kali	Sumber Data dari (Penyelenggara Kegiatan) Biro Humas/ Dinas Kominfo
16	**Pertanahan**	**51**	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 108.842.810 m2 ---------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 250.174.888 m²	42.04 %	Sumber Data dari Dinas Pertanahan (dengan melampirkan rekap Sertifikat)
		52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan 3 kasus ---------- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar 5 kasus	60 %	Sumber data dari Dinas Pertanahan dengan melampirkan rekap surat permasalahan
		53	Penyelesian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi 71 ijin ---------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi 107 Ijin	66.36%	Sumber data dari Dinas Pertanahan
17	**Pemberdayaan Masyarakat & Desa**	**54**	PKK aktif	Jumlah PKK aktif 100 PKK ---------- x 100 % Jumlah PKK 100 PKK	100 %	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		55	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif 169 ---------- x 100 % Total Posyandu Balita dan Lansia yg ada 224	75,45 %	Sumber data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	**Sosial**	**56**	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	2 buah	Sumber data dari Dinas Sosial
		57	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun 65 ---------- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun 301	21.59 %	Sumber data dari Dinas Sosial
		58	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 4.120 ---------- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 8.255	49.90 %	Data Litbangdal Dinsoskertrans Kab. BarselSumber data dari Dinas Sosial
19	**Kebudayaan**	**59**	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Kegiatan	2 kali	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		60	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 buah	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
		61	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 9 situs, 1 cagar budaya ---------- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 10 Buah	100 %	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata / instansi yang menangani
20	**Statistik**	**62**	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada atau tidak	Ada	Sumber data dari Bappeda (Fc Cover Barito Selatan dalam angka 2018)
		63	Buku ”PDRB kabupaten”	Ada atau tidak	Ada	Sumber data dari Bappeda (Fc Cover PDRB Kab. Barito Selatan 2018)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	**Kearsipan**	**64**	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku 32 SKPD ---------- x 100 % Jumlah SKPD 32	100 %	• Sumber data pembilang dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip • Sumber data penyebut dari Bagian Organisasi
		65	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	2	Sumber data dari Kearsipan / instansi yang menangani arsip
22	**Perpustakaan**	**66**	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah **16.384** Judul ---------- Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah **32.767** Buku	50 %	Sumber data dari Kantor perpustakaan daerah
		67	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun **5.356** Pengunjung ---------- Jlh orang dlm populasi yg harus dilayani (10-58 th) **101.399** Orang	5,28 %	• Sumber data pembilang dari Kantor perpustakaan daerah • Sumber data penyebut dari Dukcapil
URUSAN PILIHAN.						
1	**Kelautan dan Perikanan**	**1**	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) 14.735,19 ---------- x 100% Target Daerah (Ton) 14.733,30	100,01 %	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		2	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 5.650.806 ---------- x 100% Target Daerah (Kg) 5.045.067,30	11,12 %	Sumber data dari Dinas Kelautan dan Perikanan
		3	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) 13.662,28	24,95%	Sumber data dari Dinas

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	**Pertanian**			---------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) 5.474		Pertanian
		4	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian 1.020,2 milyar ---------- x 100% Jumlah total PDRB 5.428,6 milyar	18.79 %	Sumber data dari Dinas Pertanian atau dari buku PDRB Sektor pertanian (harga berlaku)
3	**Pariwisata**	**5**	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun (2018)	2.852 orang	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata
		6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata Rp. 114,8 milyar ---------- x 100% Jumlah total PDRB Rp. 5.428,6 milyar	2.11 %	Sumber data dari Dinas Budaya dan Pariwisata atau buku PDRB sub sector Perdagangan (jasa, hotel, restoran) dg menggunakan harga berlaku
4	**Perindustrian**	**7**	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2017**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri Rp. 357 (milyar) ---------- x 100% Jumlah total PDRB Rp 5.428,6 (milyar)	6,58 %	Sumber data dari Dinas Perindustrian atau buku PDRB sector Industri Pengolahan (harga Berlaku
		8	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2018-jumlah industry tahun 2018 (618 – 562) ---------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2018 (618)	0,1 %	Sumber data dari Dinas Perindustrian
5	**Perdagangan**	**9**	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan 445,3 (milyar) ---------- x 100% Jumlah total PDRB Rp. 5.428,6 (milyar)	8,20 %	Sumber data dari Dinas Perdagangan atau buku PDRB sub sector Perdagangan (harga berlaku)

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		10	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor 2018 - nilai impor 2018 (11,92 milyar – 8,32 Milyar)	3,6 milyar	Sumber data dari Dinas Perdagangan
6	**Transmigrasi**	**11**	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa 1.113 KK ---------- x 100% Jumlah transmigran 2.989 KK	37,24 %	Sumber data dari Dinas Transmigrasi
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
		1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA RPJPD	Ada/Tidak	Ada	Sumber data dari BAPPEDA(Perda Nomor 4 Tahun 2009)
		2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/Tidakl	Ada	Sumber data dari BAPPEDA
		4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan 17 ---------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan 17	100 .%	Sumber data pembilang dan Penyebut dari BAPPEDA
		5	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs	1 buah	Sumber data dari Dinas Kominfo (www.baritoselatankab.go.id)
		6	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Tidak ada	Sumber data dari Kantor PTSP / BP2TPM/SETDA

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KETETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik di daerah	2 .Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Keg.	Sumber data dari Kantor Kesbangpol (kegiatan pembinaan politik yang didanai dari APBD)

NO	URUSAN	KETERANGAN	JUMLAH	KET
1	Koperasi	Jumlah Koperasi	209	
		Jumlah Koperasi Aktif	209	
2	Usaha kecil dan menengah	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3.105	
		Jumlah Seluruh UKM	3.105	

Buntok, ……

(……)

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018

Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) merupakan dokumen yang digunakan untuk melksanakan Rencana Kerja Jangka Panjang Daearh (RPJMD) dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasran pembangunan tiap tahun dalam RKPD.

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupten Barito Selatan disusun secara kongkrit dan sistematis, berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang RKPD, baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun Musrenbang Tingkat Kabupaten Barito Selatan.

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2017.

Program dan Kegiatan prioritas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2018 merupakan tahun awal Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih oleh sebab itu program dan kegiatan prioritas diarahkan selain untuk melanjutkan dan menyelesaikan program dan kegiatan yang menjadi komitmen pada Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan sebelumnya dan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih, program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

Bidang	Indikasi Rencana Program Prioritas
1	*2*
1. Pendidikan	a. Mengembangkan pendidikan gratis (dasar-menengah), mengembangkan sekolah kejuruan. b. Memberikan beasiswa, ikatan dinas (dokter spesialis, dokter gigi dann medis lainnya). c. Peningkatan kapasitas guru (S1/S2) dan sertifikasi guru. d. Pengembangan sekolah satu atap (SD-SMP-SMA).

Bidang	Indikasi Rencana Program Prioritas
1	*2*
2. Kesehatan	a. Menyediakan pengobatan gratis bagi warga miskin, diperoleh data yang valid tentang data warga miskin yang sebenarnya. b. Meningkatakan kebutuhan akan dokter baik umum, spesialis dan penunjang (paramedic) terpenuhi di RSUD Jaraga Sasameh. c. Melanjutkan pengembangan RSUD persiapan peningkatan kelas rumah sakit dari kelas C ke kelas B.
3. Ekonomi Kerakyatan	a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru b. Penambahan aktivitas ekonomi kreatif masyarakat di perdesaan (selain menyadap karet juga beternak, mengembangkan kerajinan, mengolah makanan local, peningktan pasca panen) c. Peningkatan KUMKM dalam mengembangkan usaha.
4. Reformasi Birokrasi	a. Meningkatnya pelayanan prima di semua bidang pelayanan. b. Peningkatan kualitas SDM aparatur. c. Penataan Struktur organisasi pemerintah yang efektif. d. Pemekaran Kecamatan dari 6 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan. e. Meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Kehidupan Masyarakat yan aman dan dinamis	a. Peningkatan kualitas kehiduppan beragama dengan penyediaan sarana kenyamanan pelaksanaan ibadah dan kerukunan antar umuat beragama. Untuk melaksanakan kondisi tersebut rencananya akan dilaksanakan pembangunan Tahap I (pertama) Islamic Center Kabupaten Barito Selatan. b. Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan meningktkan jumlah siswa, mahasiswa, ormas/LSM.
6. Pengelolaan SDA	a. Revitalisasi lingkungan pertambangan dan sector perkebunan. b. Program program pengembangan ekonomi local berbasis potensi SDA. c. Pengembangan dan pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. d. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hutan tanaman hutan lestari.

Bidang	Indikasi Rencana Program Prioritas
1	*2*
7. Infrastruktur	a. Peningkatan infrastruktur jaringan jalan, terminal dan dermaga baik jalan kabupaten, jalan antar kecamatan maupun jalan antar desa. b. Peningkatan taman kota dan peningkatan sarana prasarana wisata. c. Peningkatan listrik masuk desa dan optimalisasi PLTD dan PLTS berbasis masyarakat. d. Peningkatan fasilitas terminal angkutan. e. Peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPA yang ramah lingkungan. f. Peningkatan kapasitas PDAM.

Kemudian secara lengkap pada bagian ini disajikan Realiasasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 per Urusan sebagaimana berikut ini :

1. Urusan Wajib Pendidikan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 36,972,603,200.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 35,662,820,968.00** atau sebesar **96,46 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kesehatan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.491.380.000,00	3.102.770.826,00	88.86
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	810.860.000,00	800.788.500,00	98,79
3	Program peningkatan disiplin aparatur	4.800.000,00	4.800.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	100.000.000,00	100
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.908.931.500,00	1,881,546,400,00	98,57
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.365.490.700,00	20.903.736.842,00	97,84
7	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	160.799.000,00	147.236.000,00	91,57

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.767.443.00000	6.390.929.000,00	94.44
9	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.598.049.000,00	1.566.163.400,00	98,00
10	Program Pendidikan Tinggi	764.850.000,00	764.850.000,00	100
	Jumlah	**36,972,603,200.00**	**35,662,820,968.00**	**96.46**

2. Urusan Wajib Kesehatan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 121.596.270.500,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 96.850.339.570,00** atau sebesar **79,67 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kesehatan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.809.370.000,00	9701341.909,00	98,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.824.648.870,00	5753048.743,00	78,84
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	312.000.000,00	245981.000,00	84,30
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	337.080.000,00	314849.000,00	93,40
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.434.546.000,00	2132214.186,00	87,58
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	24.655.900.000,00	23759283.787,00	96,36
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	28.000.000,00	27648.000,00	98,74
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	385.000.000,00	326431.650,00	84,79
12	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	420.000.000,00	387044.900,00	92,15
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.045.000.000,00	859470.373,00	82,25
14	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	15.320.000,00	9060.000,00	59,14
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	93.000.000,00	90222.500,00	97,01
16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	15.000.000,00	14.999.000,00	99,99
17	Program Peningkatan Mutu Layanan FKTP PUSKESMAS	41.114.500,00	40.866.500,00	99,40
18	Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana FKTP PUSKESMAS	22.000.000,00	21.825.998,00	99,21

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
19	Program Kesehatan Ibu dan Anak , Gizi dan Kesehatan Keluarga,	150.000.000,00	137.257.000,00	91,50
20	Program Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	64.000.000,00	59.994.000,00	93,74
21	Program Kegiatan DAK Fisik	29.773.755.450,00	28.980.027.299,00	97,33
22	Program Kegiatan DAK Non Fisik	12.144.728.000,00	9.607.688.721,00	79,11
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH				
24	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	30.247.208.300,00	14.381.085.004.60	47.55
25	Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat)	2,622,541,810.00	0,00	0 %
	Jumlah	**121.569.270.500,00**	**96.850.339.570,00**	**79,67 %**

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 7.171.229.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.040.866.534,00** atau sebesar **98,18 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Kesehatan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.109.440.400,00	1.097.784.479,00	98,95
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.000.000,00	29.820.000,00	67,77
3	Program peningkatan disiplin aparatur	37.650.000,00	37.644.000,00	99,44
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	22.479.000,00	89,92
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.350.000,00	40.350.000,00	100
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	309.700.000,00	308.247.700,00	99,53
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	61.600.000,00	61.600.000,00	100
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	35.000.000,00	35.000.000,00	100
9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	160.000.000,00	150.241.455,00	93,90
10	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	40.000.000,00	39.861.000,00	99,65

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	25.000.000,00	25.000.000,00	100
12	Program Adiwiyata	75.000.000,00	74.000.000,00	99,20
13	Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan	4244.050.000,00	4.160.403.000,00	98,03
14	Program Sarana dan Prasarana Kebersihan	460.839.000,00	455.122.200,00	98,76
15	Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	411.600.000,00	411.143.700,00	99,89
16	Program Penataan Hukum / Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidu.p	92.000.000,00	91.974.000,00	99,97
	Jumlah	**7.171.229.400,00**	**7.040.866.534,00**	**98,18 %**

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 175.190.534.322,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 148.744.301.105,70** atau sebesar **96,95 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pekerjaan Umum

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178.351.234.322,70	148.744.301.105,70	94,02
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	252.400.000,00	252.000.000,00	99,84
3	Program peningkatan disiplin aparatur	124.000.000,00	123.614.440,00	99,69
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.000.000,00	110.424.540,00	84,94
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	230.000.000,00	223.112.890,00	99,61
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100
7	Program pembangunan jalan dan jembatan	139.136.278.322,70	111.523.751.616,70	80,16
8	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.538.746.000,00	2.476.688.000,00	97,56
9	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1.150.000.000,00	1.148.200.000,00	99,84
10	Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	779.600.000,00	775.731.070,00	99,50
11	Program Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	5.835.000.000,00	5.619.016.024,00	96,30
12	Program Pengembangan Air Minum	3.738.800.000,00	3.675.632.346,00	98,31
13	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi	2.728.000.000,00	2.184.934.953,00	80,09

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
14	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)	3.566.120.000,00	3.563.519.977,00	99,93
15	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	646.800.000,00	643.482.000,00	99,43
16	Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air	99.500.000,00	99.500.000,00	100
17	Program Bina Teknik / Program	2.505.450.000,00	1.857.854.736,00	75,15
18	Program Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas	8.707.200.000,00	8.704.212.000,00	99,97
	Jumlah	**175.190.534.322,00**	**148.744.301.105,70**	**96,95 %**

5. Urusan Wajib Penataan Ruang

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.160.700.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.902.786.668,00** atau sebesar **91,84 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Penataan Ruang

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Penataan Ruang Kabupaten	3.160.700.000,00	2.902.786.668,00	91.84

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.293.698.461,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.159.759.097,00** atau sebesar **97,47 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.029.956.595,00	1.012.031.295,00	98,25
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	692.000.000,00	670.085.719,00	96,83
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.809.866,00	33.809.866,00	100

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	202.300.000,00	195.745.300,00	96,76
5	Program pengembangan data/informasi	587.000.000,00	556.443.281,00	94,79
6	Program perencanaan pembangunan daerah	520.000.000,00	509.352.358,00	97,95
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	524.562.000,00	514.224.628,00	98,03
8	Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	326.300.000,00	325.682.300,00	99,81
9	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	20.000.000,00	19.591.632,00	97,96
10	Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra	205.000.000,00	201.041.023,00	98,07
12	Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Kepemerintahan	332.770.000,00	328.484.595,00	98,71
13	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	40.000.000,00	39.991.000,00	99,98
14	Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	40.000.000,00	39.995.000,00	99,99
15	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	535.000.000,00	510.204.000,00	95,37
16	Program Pemerintahan dan Nakertrans	40.000.000,00	39.659.000,00	99,15
17	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	165.000.000,00	163.418.100,00	99,04
	Jumlah	**5.293.698.461,00**	**5.159.759.097,00**	**97,47 %**

7) Urusan Wajib Perumahan Rakyat

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 11.467.978.950,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.128.593.100,00** atau sebesar **97,04 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Perumahan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.269.898.950,00	2.022.555.297,00	89,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.000.000,00	64.867.000,00	81,08
3	Program peningkatan disiplin aparatur	84.770.000,00	84.770.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	47.733.456,00	95,47

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.650.000,00	11.650.000,00	100
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	67.200.000,00	67.200.000,00	100
7	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Perumahan	372.260.000,00	366.429.265,00	98,43
8	Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Pengembang	400.000.000,00	399.600.000,00	99,90
9	Program Penataan dan Pemeliharaan Makam	1.529.000.000,00	1.513.939.900,00	99,02
10	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH	1.518.400.000,00	1.515.532.900,00	99,81
11	Program Penataan Fasilitas Umum Kota / PJU	1.585.500.000,00	1.555.796.492,00	98,13
12	Program Peningkatan kapasitas Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	77.722.790,00	97,15
13	Program Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	500.000.000,00	499.621.000,00	99,92
14	Program Peningkatan Perumahan Swadaya	152.400.000,00	152.195.000,00	99,87
15	Program Penataan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh	500.000.000,00	499.200.000,00	99,84
16	Program Pembangunan Permukiman Perkotaan	2.266.900.000,00	2.249.780.000,00	99,24
	Jumlah	**11.467.978.950,00**	**11.128.593.100,00**	**97,04 %**

8) Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.138.048.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.108.977.090,00** atau sebesar **98,64 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	918.288.900,00	898.215.290,00	97,81
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	152.300.000,00	151.991.700,00	99,80
3	Program peningkatan disiplin aparatur	42.950.000,00	42.855.000,00	99,78
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	25.000.000,00	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.500.000,00	62.471.100,00	98,38

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
6	Program peningkatan peran serta kepemudaan	804.660.000,00	799.827.000,00	99,40
7	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	50.000.000,00	49.277.000,00	98,55
8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	81.350.000,00	79.840.000,00	98,14
	Jumlah	**2.138.048.900,00**	**2.108.977.090,00**	**98,64 %**

9) Urusan Penanaman Modal

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.338.226.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.311.983.453,00** atau sebesar **98,04 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Penanaman Modal

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641.064.600,00	616.363.153,00	96,15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	211.000.000,00	210.790.000,00	99,90
3	Program peningkatan disiplin aparatur	28.000.000,00	27.792.000,00	99,26
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.400.000,00	13.400.000,00	100
5	Program Pameran Promosi Investasi	60.000.000,00	59.971.800,00	99,95
6	Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi	30.387.500,00	29.637.500,00	97,53
7	Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi	21.000.000,00	20.991.000,00	99,96
8	Program Pengawasan dan Pengendalian	116.887.500,00	116.679.000,00	99,82
9	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	28.000.000,00	27.985.000,00	99,95
10	Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan	81.500.000,00	81.387.000,00	99,86
11	Program Pengaduan dan Informasi Layanan	50.887.000,00	50.887.00000	100
12	Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan	18.100.000,00	18.100.000,00	100
13	Program Pelaporan dan Peningkatan Layanan	38.000.000,00	38.000.000,00	100
	Jumlah	**1.338.226.600,00**	**1.311.983.453,00**	**98,04 %**

10) Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Koperasi Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.538.462.300,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.528.070.352,00** atau sebesar **99,32 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Usaha Mikro Kecil

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	989.376.400,00	979.281.120,00	98,98
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	69.085.900,00	69.085.900,00	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur	40.000.000,00	39.997.332,00	99,99
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000,00	44.960.000,00	99,91
5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM	110.000.000,00	109.984.000,00	99,99
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan , Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM	285.000.000,00	284.763.000,00	99,92
	Jumlah	**1.538.462.300,00**	**1.528.070.352,00**	**,99,32**

11) Urusan Wajib Kependudukan dan Cacatan Sipil

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Kependudukan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.767.975.459,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.771.341.320,00** atau sebesar **99,98 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	774.160.320,00	774.060.035,00	99,99
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255.339.000,00	254.155.500,00	99,54
3	Program peningkatan disiplin aparatur	37.850.000,00	37.850.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	307.565.000,00	307.564.800,00	100

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.000.000,00	49.971.500,00	99,94
6	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatatn Sipil	380.580.000,00	379.858.000,00	99,81
7	Program Pengelolaan Data Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan	108.760.000,00	108.685.000,00	99,93
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan	724.429.000,00	723.172.624,00	99,83
9	Program Pertemuan Teknis Pelayanan Kebijakan Kependudukan	132.658.000,00	132.658.000,00	100
	Jumlah	**2.771.341.320,00**	**2.767.975.459,00**	**99,88**

12) Urusan Wajib Ketenaga Kerjaan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.895.719.300,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.821.145.159,00** atau sebesar **96,07 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Ketenagakerjaan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	828.217.900,00	798.200.904,00	96,38
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	187.620.000,00	164.400.000,00	87,62
3	Program peningkatan disiplin aparatur	28.800.000,00	28.500.000,00	98,96
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	61.600.000,00	52.608.831,00	85,40
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000,00	29.613.000,00	98,71
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	213.750.000,00	211.847.500,00	99,11
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	114.100.000,00	111.795.424,00	97,98
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	15.761.000,00	15.729.600,00	99,80
9	Program Pengembangan Data dan Informasi	71.742.400,00	66.191.400,00	92,26
10	Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	155.309.000,00	155.052.100,00	99,83
	Jumlah	**1.895.719.300,00**	**1.821.145.159,00**	**96,07**

13) Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.091.347.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.951.928.904,00** atau sebesar **97,26 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Ketahanan Pangan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.497.597.000,00	2.430.454.130,00	97,31
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	225.000.000,00	219.895.807,00	97,73
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	390.500.000,00	370.788.432,00	94,95
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	555.000.000,00	538.965.879,00	97,11
6	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan	1.423.250.000,00	1.391.824.656,00	97,79
	Jumlah	**5.091.347.000,00**	**4.951.928.904,00**	**97,26**

14) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 429,725,000.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 429,715,000.00** atau sebesar **99,99 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14.625.000,00	14.625.000,00	100
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	110.000.000,00	110.000.000,00	100
3	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	71.900.000,00	71.900.000,00	100
4	Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak	153.200.000,00	153.200.000,00	100
	Jumlah	**429,725,000.00**	**429,715,000.00**	**99,99**

15) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.763.290.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.612.528.586,00** atau sebesar **95,99 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	981,570,600,00	962,489,443,00	98,06
2	Program peningkatan disiplin aparatur	23,800,000,00	23.800.000,00	100
3	Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi	1.269,380,000,00	1.268.987.000,00	99,97
4	Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	70.000,000,00	69.584.000,00	99,41
5	Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	115.000,000,00	114.833.000,00	99,85
6	Program keserasian dan kebijakan pendataan kependudukan	80.000.000,00	79.990.000,00	99,99
	Jumlah	**3.763.290.600,00**	**3.612.528.586,00**	**95,99**

16) Urusan Wajib Perhubungan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.009.071.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.929.319.632,00** atau sebesar **97,35 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Perhubungan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.255.871.200,00	1.220.363.412,00	97,35
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	79645.300,00	79,95
3	Program peningkatan disiplin aparatur	50.000.000,00	49.140.000,00	98,28
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	87.572.000,00	87,57
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.900.000,00	66.875.000,00	99,96
6	Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU	110.000.000,00	109.639.000,00	99,67

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
7	Program peningkatan pelayanan angkutan	375.000.000,00	374.342.000,00	99,82
8	Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ / LLASDPLU	80.000.000,00	79.671.000,00	99,59
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Trtansportasi Publik LLAJ / LLASDPU	165.000.000,00	163.850.000,00	99,30
10	Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan	706.300.000,00	698.221.920,00	98,86
	Jumlah	**3.009.071.200,00**	**2.929.319.632,00**	**97,35**

17) Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Komunikasi dan Informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 2,784,765,800.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2,626,023,830.00** atau sebesar **94,30 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	679.425.800,00	664.147.387,00	97,75
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.371.840.000,00	1.241.045.143,00	97,47
3	Program peningkatan disiplin aparatur	45.000.000,00	45.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	79.447.300,00	99,31
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	226.000.000,00	221.434.000,00	97,98
6	Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran	382.500.000,00	374.950.000,00	98,03
	Jumlah	**2,784,765,800.00**	**2,626,023,830.00**	**94,30**

18) Urusan Wajib Pertanahan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 792.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 743.419.200,00** atau sebesar **93,87 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pertanahan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pertanahan	142.000.000,00	141.138.000,00	99,39
2	Program Penyusunan Aset Tanah Daerah	245.000.000,00	244.317.200,00	99,72
3	Program Pengadaan dan Pembebasan Tanah Daerah	280.000.000,00	243.776.000,00	87,06
4	Program Permasalahan Pertanahan	125.000.000,00	114.188.000,00	91,35
	Jumlah	**792.000.000,00**	**743.419.200,00**	**93,87**

19) Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.545.210.300,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.526.240.000,00** atau sebesar **98,77 %** dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.397.239.100,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.352.335.424,00** atau sebesar **98,68 %.**

a. Tabel Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	742.660.300,00	726.485.415,00	97,82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.500.000,00	25.757.385,00	97,20
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	59.677.900,00	99,46
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26.050.000,00	26.050.000,00	100
5	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	260.000.000,00	259.517.300,00	99,81
6	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik	220.000.000,00	219.056.000,00	99,57
7	Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik	210.000.000,00	209.696.000,00	99,86
	Jumlah	**1.545.210.300,00**	**1.526.240.000,00**	**98,77**

b. Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.682.060.500,00	1.650.162.125,00	98,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.900.000,00	90.538.708,00	97,46
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	363.200.000,00	362.930.000,00	99,93
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.000.000,00	79.938.000,00	99,92
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	924.829.600,00	915.700.591,00	99,01
6	Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum	153.249.000,00	152.150.000,00	99,28
7	Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan	101.000.000,00	100.916.000,00	99,22
	Jumlah	**3.397.239.100,00**	**3.352.335.424,00**	**98,68**

20) Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan **urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum** terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat dan 6 Kecamatan dengan Program Prioritas dalam Rencana Kerja diuraikan sebagaimana berikut dibawah ini :

a. Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Administrasi Pemerintahan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah Administrasi Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan dan 6 Kecamatan yang ada dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 51,413,686,800.00** dengan realisasi sebesar **Rp. 50,040,633,568.00** atau sebesar **98,33 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Administrasi Pemerintahan)

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	**SEKRETARIAT DAERAH**	26,075,014,800.00	25,035,316,102.00	96.01
2	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	14,060,928,000.00	13,967,439,646.00	99.34
3	**KECAMATAN DUSUN SELATAN**	2,467,988,000.00	2,412,641,477.00	97.76
4	**KECAMATAN DUSUN HILIR**	1,860,980,000.00	1,845,607,300.00	99.17
5	**KECAMATAN DUSUN UTARA**	1,670,644,000.00	1,598,644,122.00	95.69
6	**KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**	1,600,180,000.00	1,550,652,268.00	96.90
7	**KECAMATAN KARAU KUALA**	1,896,580,000.00	1,852,628,454.00	97.68
8	**KECAMATAN JENAMAS**	1,781,372,000.00	1,777,704,199.00	99.79
	Jumlah	**51,413,686,800.00**	**50,040,633,568.00**	**97.33**

1. Sekretariat Daerah

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,241,300,000.00	7,099,966,830.00	98.05
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,339,941,000.00	5,281,913,309.00	98.91
3	Program peningkatan disiplin aparatur	400,000,000.00	398,051,000.00	99.51
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	220,000,000.00	200,315,688.00	91.05
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	570,000,000.00	541,468,380.00	94.99
6	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	791,997,000.00	768,177,163.00	96.99
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	180,000,000.00	123,126,009.00	68.40
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	130,000,000.00	84,111,788.00	64.70
9	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	355,000,000.00	352,061,500.00	99.17
10	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	420,000,000.00	419,255,000.00	99.82
11	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	2,945,500,000.00	2,749,452,053.00	93.34
12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	95,000,000.00	94,935,909.00	99.93
13	Program Perencanaan Tata Ruang	180,000,000.00	178,826,400.00	99.35
14	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1,680,000,000.00	1,550,382,174.00	92.28
15	Program Pengembangan Nilai Budaya	1,880,280,000.00	1,709,907,565.00	90.94

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	125,000,000.00	102,387,000.00	81.91
17	Program Pembangunan Ekonomi	588,369,000.00	586,526,564.00	99.69
18	Program Kerjasama Pembangunan	738,244,000.00	737,751,200.00	99.93
19	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	335,000,000.00	323,912,287.00	96.69
20	Program Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	350,000,000.00	339,021,830.00	96.86
21	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	70,643,600.00	70,627,600.00	99.98
22	Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah	973,740,200.00	903,721,472.00	92.81
23	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	35,000,000.00	26,413,200.00	75.47
24	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo & Layanan Elektronik	45,000,000.00	35,015,000.00	77.81
25	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastrutur TIK	75,000,000.00	69,822,624.00	93.10
26	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	105,000,000.00	98,156,557.00	93.48
27	Program Pengembangan data / Informasi	45,000,000.00	44,148,000.00	98.11
28	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	60,000,000.00	46,476,000.00	77.46
29	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	100,000,000.00	99,386,000.00	99.39
	Jumlah	**26,075,014,800.00**	**25,035,316,102.00**	**96.01**

2. Sekretariat DPRD

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.260.760.000,00	6.208.674.679,00	99,17
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.970.915.000,00	2.938.876.285,00	99,92
3	Program peningkatan disiplin aparatur	318.378.000,00	318.243.000,00	99,96
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	48.674.000,00	97,35
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	205.800.000,00	204.198.000,00	99,22
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	4.255.075.000,00	4.248.773.682,00	99,85
	Jumlah	**14.060.928.000,00**	**13.967.439.646,00**	**99.34**

3. Kecamatan Dusun Selatan

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.231.438.000,00	1.202.563.977,00	97,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	545.750.000,00	544.488.500,00	99,77
3	Program peningkatan disiplin aparatur	98.200.000,00	98.200.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	485.160.000,00	459.949.000,00	94,80
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	62.440.000,00	62.440.000,00	100
6	Program Perencanaan Tata Ruang	45.000.000,00	45.000.000,00	100
	Jumlah	**2.467.988.000,00**	**2.412.641.477,00**	**97,76**

4. Kecamatan Dusun Hilir

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	533.900.000,00	532.065.100,00	99,66
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	833.000.000,00	819.810.000,00	98,42
3	Program peningkatan disiplin aparatur	35.000.000,00	34.789.000,00	99,40
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	449.080.000,00	448.944.000,00	99,97
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	9.999.200,00	99,99
	Jumlah	**1.860.980.000,00**	**1.845.607.300,00**	**97.17**

5. Kecamatan Dusun Utara

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi.	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	846.300.000,00	813.662.722,00	96,14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.980.000,00	292.072.400,00	97,04
3	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000,00	18.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434.864.000,00	410.409.000,00	94,38
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.500.000,00	6.500.000,00	100
6	Program Pemberdayaan Masyarakat	64.000.000,00	58.000.000,00	90,63
	Jumlah	**1.670.644.000,00**	**1.598.644.122,00**	**95,69**

6. Kecamatan Gunung Bintang Awai

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	846.300.000,00	813.662.722,00	96,14
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.980.000,00	292.072.400,00	97,04
3	Program peningkatan disiplin aparatur	18.000.000,00	18.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	434.864.000,00	410.409.000,00	94,38
	Jumlah	**1.670.644.000,00**	**1.598.644.122,00**	**95,69**

7. Kecamatan Karau Kuala

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710.700.000,00	708.717.054,00	99,72
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	874.380.000,00	861.580.400,00	98,54
3	Program peningkatan disiplin aparatur	28.000.000,00	28.000.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	243.500.000,00	214.331.000,00	88,02
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100
	Jumlah	**1.896.580.000,00**	**1.852.628.454,00**	**97.68**

8. Kecamatan Jenamas

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	646.900.000,00	644.861.199,00	99,68
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	760.872.000,00	759.510.000,00	99,82
3	Program peningkatan disiplin aparatur	24.100.000,00	24.100.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	312.000.000,00	3.117.33000,	99,91
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.500.000,00	37.500.000,00	100
	Jumlah	**1.781.372.000,00**	**1.777.704.199,00**	**99.79**

2) Pengawasan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Pengawasan) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran

Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.778.302.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.686.006.694,00** atau sebesar **97,56 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Fungsi Urusan Pemerintah Daerah (Pengawasan)

No	SOPD	Pagu Anggaran	Realiasasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	792.755.000,00	778.475.756,00	98,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.000.000,00	181.201.002,00	86,29
3	Program peningkatan disiplin aparatur	15.000.000,00	15.000.000,00	100
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	56.500.000,00	56.500.000,00	100
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.879.047.400,00	1.874.979.000,00	99,78
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	11.660.000,00	38,87
7	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	395.000.000,00	369.186.936,00	93,47
8	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	200.000.000,00	199.004.000,00	99,50
9	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah	200.000.000,00	200.000.000,00	100
	Jumlah	**3.778.302.400,00**	**3.686.006.694,00**	**97.56**

3) Perencanaan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Perencanaan) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 5.293.698.461,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.159.759.097,00** atau sebesar **97,47 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Perencanaan)

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.029.956.595,00	1.012.031.295,00	98,25
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	692.000.000,00	670.085.719,00	96,83

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.809.866,00	33.809.866,00	100
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	202.300.000,00	195.745.300,00	96,76
5	Program pengembangan data/informasi	587.000.000,00	556.443.281,00	94,79
6	Program perencanaan pembangunan daerah	520.000.000,00	509.352.358,00	97,95
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	524.562.000,00	514.224.628,00	98,03
8	Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	326.300.000,00	325.682.300,00	99,81
9	Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	20.000.000,00	19.591.632,00	97,96
10	Program Perencanaan Pendidikan dan Kesra	205.000.000,00	201.041.023,00	98,07
12	Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Kepemerintahan	332.770.000,00	328.484.595,00	98,71
13	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	40.000.000,00	39.991.000,00	99,98
14	Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	40.000.000,00	39.995.000,00	99,99
15	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	535.000.000,00	510.204.000,00	95,37
16	Program Pemerintahan dan Nakertrans	40.000.000,00	39.659.000,00	99,15
17	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	165.000.000,00	163.418.100,00	99,04
	Jumlah	**5.293.698.461,00**	**5.159.759.097,00**	**97,47**

4) Keuangan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Keuangan) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 10.258.706.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.507.726.009,00** atau sebesar **92,68 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Keuangan)

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.533.100.000,00	1.351.034.351,00	88,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.174.000.000,00	2.075.381.617,00	94,46

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	70.000.000,00	67.400.000,00	96,29
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	45.710.000,00	91,42
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.231.878.100,00	1.948.613.620,00	87,31
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	944.367.000,00	906.951.700,00	96,04
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan	716.480.000,00	712.031.866,00	99,38
8	Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi	173.606.000,00	171.652.000,00	98,87
9	Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	765.000.000,00	747.070.910,00	97,66
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah	596.480.000,00	522.077.000,00	87,53
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan	1.003.795.100,00	959.802.945,00	95,62
	Jumlah	**10.258.706.200,00**	**9.507.726.009,00**	**92,68**

5) Kepegawaian

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Kepegawaian) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 3.542.610.025,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3 470 285 078,00** atau sebesar **97,96 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kepegawaian)

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.700.625,00	739.923.558,00	96,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.200.000,00	118.140.000,00	99,11
3	Program peningkatan disiplin aparatur	74.150.000,00	74.150.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.176.506.000,00	1.149.955.827,00	97,74
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	175.980.500,00	174.483.000,00	99,15
6	Program Pembinaan ASN Kabupaten	181.650.000,00	176.692.890,00	97,27
7	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	579.593.200,00	571.952.903,00	98,68

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
8	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	232.846.700,00	229.361.900,00	98,50
9	Kelembagaan KORPRI/ Aparatur Sipil Negara (ASN)	236.983.000,00	235.625.000,00	99,43
	Jumlah	**3.542.610.025,00**	**3.470.285.078,00**	**97,96**

6) Pendidikan dan Pelatihan

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Pendidikan dan Pelatihan) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 3.542.610.025,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3 470 285 078,00** atau sebesar **97,96 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pendidikan dan Pelatihan)

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	165.000.000,00	163.418.100,00	99,04
	Jumlah	**165.000.000,00**	**163.418.100,00**	**99,04**

7) Fungsi Penunjang Lainnya

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Fungsi Penunjang Lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 1.330.844.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.318.264.513,00** atau sebesar **97,96 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Fungsi Penunjang Lainnya

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611.332.000,00	603.882.835,00	98,78
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	106.072.000,00	105.535.900,00	99,49
3	Program peningkatan disiplin aparatur	34.000.000,00	33.992.700,00	99,98

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	67.650.000,00	66.227.778,00	97,90
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	63.890.200,00	63.715.300,00	99,73
6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	186.000.000,00	185.301.500,00	99,62
7	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi	87.700.000,00	86.437.000,00	98,56
8	Program Kedaruratan dan Logistik	174.200.000,00	173.171.500,00	99,94
	Jumlah	**1.330.844.200,00**	**1.318.264.513,00**	**99,05**

b. Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar sebesar **Rp. 3.397.239,100,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.352.335.424,00** atau sebesar **97,96 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Pemerintahan Umum

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.682.060.500,00	1.650.162.125,00	98,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.900.000,00	90.538.708,00	97,46
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	363.200.000,00	362.930.000,00	99,93
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	80.000.000,00	79.938.000,00	99,92
5	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	924.829.600,00	915.700.591,00	99,01
6	Program Pencegah Tindakan pelanggaran keamanan Ketertiban Umum	153.249.000,00	152.150.000,00	99,28
7	Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan	101.000.000,00	100.916.000,00	99,22
	Jumlah	**3.397.239.100,00**	**3.352.335.424,00**	**98,68**

21) Urusan Statistik

Realisasi Anggaran Urusan Statistik yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu

Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.388.240.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.368.575.957,00** atau sebesar **98,58 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Wajib Statistik

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian	253.440.000,00	246.314.957,00	97,19
2	Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	710.000.000,00	700.000.000,00	98,59
3	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	424.800.000,00	422.261.000,00	99,40
	Jumlah	**1,388,240,000.00**	**1,368,575,957.00**	**98,58**

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.799.884.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.606.691.675,00** atau sebesar **94,92 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.468.084.000,00	1.421.000.520,00	96,79
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.500.000,00	428.377.275,00	99,97
3	Program peningkatan disiplin aparatur	38.300.000,00	38.300.000,00	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	99.360.980,00	99,36
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	600.000.000,00	535.866.556,00	89,31
6	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	120.000.000,00	95.454.800,00	79,55
7	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	330.000.000,00	282.105.000,00	85,49
8	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	715.000.000,00	706.226.844,00	98,77
	Jumlah	**3.799.884.000,00**	**3.606.691.975,00**	**94,92**

23) Urusan Wajib Sosial

Realisasi Anggaran Urusan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 691.504.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 610.891.200,00** atau sebesar **98,60 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Sosial

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	199.479.800,00	197.584.800,00	99,05
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	121.860.000,00	120.608.000,00	98,90
3	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	46.778.600,00	46.778.600,00	100
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	156.376.000,00	156.360.000,00	99,99
5	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	42.000.000,00	36.550.000,00	87,02
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	53.009.800,00	53.009.800,00	100
	Jumlah	**691.504.200,00**	**610.891.200,00**	**98,60**

24) Urusan Wajib Budaya

Realisasi Anggaran Urusan Budaya yang dilaksanakan Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 691.504.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 610.891.200,00** atau sebesar **98,60 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Budaya

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	148.321.000,00	148.321.000,00	100
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	102.259.000,00	102.187.800,00	99,93
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	375.170.000,00	373.942.500,00	99,67
	Jumlah	**625.750.000,00**	**624451300,00**	**99,79**

25) Urusan Wajib Perpustakaan

Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan

Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.202.540.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.188.853.300** atau sebesar **98,86 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	program pelayanan administrasi perkantoran	618.558.000,00	608.919.000,00	98,44
2	program peningkatan arana dan prasarana apartur	78.200.000,00	78.199.800,00	100,00
3	program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	42.200.000,00	40.492.600,00	95,95
4	program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88
5	program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	426.082.200,00	423.919.200,00	99,49
6	program peningkatan dan pembangunan pengelolaan aset daerah	17.500.000,00	17.347.700,00	99,13
	Jumlah	**1.202.540.200,00**	**1.188.853.300,00**	**98,86**

26) Urusan Wajib Kearsipan

Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 212.200.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 209.718.900,00** atau sebesar **98,46 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan

No	Program	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	115.500.000,00	114.879.000,00	99,46
2	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	40.700.000,00	40.568.900,00	99,68
3	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	31.000.000,00	30.151.000,00	97,26
	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	25.000.000,00	24.120.000,00	96,48
	Jumlah	**212.200.000,00**	**209.718.900,00**	**99,46**

Pada Tahun 2018 Realisasi Anggaran Urusan Pilihan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 355.253.884.772,70** (*tiga ratus lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua ribu, tujuh puluh sen*) realisasi **Rp. 299.193.785.881,30**

(*dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan satu ribu tiga puluh sen*) atau sebesar **96,46 %** yang mana ini belum termasung Belanja Tidak Langsung dengan rincian sebagai berikut :

1) Urusan Pilihan Perikanan dan Kelautan

Urusan Perikanan dan Kelautan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.947.113.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.635.653.671,00** atau sebesar **89,43 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya	230.000.000,00	229.481.400,00	99,77
2	Program pengembangan budidaya perikanan	1.897.113.000,00	1.594.776.903,00	84,06
3	Program pengembangan perikanan tangkap	415.000.000,00	407.659.368,00	98,23
4	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	195.000.000,00	194.736.000,00	99,86
5	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	210.000.000,00	209.000.000,00	99,52
	Jumlah	**2.947.113.000,00**	**2,635,653,671,00**	**89,43**

2) Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 301.900.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 297.614.000,00** atau sebesar **98,58 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Pariwista

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program pengembangan pasar pariwisata	182.500.000,00	178.214.000,00	97,65
2	Program pengembangan destinasi pariwisata	46.000.000,00	46.000.000,00	100
3	Program pengembangan Kemitraan	73.400.000,00	73.400.000,00	100
	Jumlah	**301.900.000,00**	**297.614.000,00**	**98,58**

3) Urusan Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 5.443.308.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.022.659.679,00** atau sebesar **92,27 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Pertanian

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	300.000.000,00	297.803.500,00	99,27
2	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	315.000.000,00	306.746.000,00	97,38
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	4.178.558.000,00	3.788.525.287,00	90,67
4	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	190.000.000,00	178.581.484,00	93,99
5	Program peningkatan produksi hasil peternakan	434.750.000,00	426.003.408,00	97,99
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	25.000.000,00	25.000.000,00	100
	Jumlah	**5.443.308.000,00**	**5.022.659.679,00**	**92,27**

4) Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 1.652.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.651.079.510,00** atau sebesar **99,94 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	205.000.000,00	204.863.100,00	99,93
2	Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)	1.447.000.000,00	1.446.216.410,00	99,95
	Jumlah	**1.652.000.000,00**	**1.651.079.510,00**	**99,94**

5) Urusan Perindustrian

Urusan Peridustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 922.430.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 910.401.468,00** atau sebesar **98,70 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	922.430.000,00	910.401.468,00	98,70
	Jumlah	**922.430.000,00**	**910.401.468,00**	**98,70**

6) Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp. 134.696.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 133.311.900,00** atau sebesar **98,97 %.**

Tabel Realisasi Anggaran Urusan Transmigrasi

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	
		Rp	Rp	%
1	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	51.235.000,00	50.603.900,00	98,77
2	Program Transmigrasi Lokal	24.001.000,00	23.832.500,00	99,30
3	Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan	59.460.000,00	58.875.500,00	99,02
4	Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan	54.123.000,00	53.894.500,00	99,58
	Jumlah	**134.696.000,00**	**133.311.900,00**	**98,97**

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Barito Selatan tidak lagi menerima Tugas Pembatuan dari pemerintah pusat namun sebagai gantinya menerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik).

1. **Dasar Hukum**
2. **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**
3. **Program dan Kegiatan**
4. **Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
5. **Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan**
6. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**
7. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan:**
8. **Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan**
9. **Permasalahan dan Solusi**
10. **Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan**

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan mendapatkan Jumlah Paket Kegiatan sebanyak Paket dan biaya kegiatan operasional lainnya yang bersumber dari PAD, DAK, DAU, PDIP dan DPPID dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 186.665.232.682,70 terealisasi Rp. 156.448.515.229,70 atau 83,81 %. Dengan kegiatan yang dihasilkan antara lain :

- Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Peningkatan Kondisi jalan dan jembatan
- Pembangunan Jaringan Irigasi

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada tahun anggaran 2018 Kabupaten Barito Selatan tidak memberikan tugas perbantuan.

1. **Dasar Hukum**
2. **Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantukan**

3. **Sumber dan Jumlah Anggaran**

4. **Sarana dan Prasarana**

BAB VI
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak ada Mou kerja sama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak ketiga antara lain :

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

1.1. BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh

1.2. PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk

1.3. Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

2. Dasar Hukum

2.1. Perjanjian Kerja Sama Nomor 04/KTR/VIII-08/0118 dan Nomor 48/RS.TU.1/800/01/2018.

2.2. Pelanggan dan Nomor Kontrak : K.TEL.2877/HK.810/TR6-W507/2017

2.3. Perjanjian Kerja Nomor : 800/128/PSDM/2018 dan Nomor 02.b./PTM63.R.12.1/AC/2018

3. Bidang Kerjasama

3.1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan

3.2. Kontrak Layanan Penyedia Jasa, layanan Service dan Jaringan Telekomunikasi

3.3. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018.

4. **Nama Kegiatan**

   4.1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan

   4.2. Berlangganan Penyedia Jasa layanan Servisces dan Jaringan Telekomunikasi

   4.3. Pelaksanaan Asisment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah.**

   5.1. RSUD Jaraga Sasameh dengan BPJS Muara Teweh

   5.2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tbk.

   5.3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

6. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

   6.1. Jumlah pegawai yang melaksanakan kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok berjumlah 520 orang yang terdiri dari PNS 197 orang sisanya dari Tenaga Kontrak dan TKS/Magang berjumlah 323 orang.

   6.2. Jumlah pegawai yang melaksanakan kerjasama Kontrak Layanan Penyedia Jasa, layanan Servisces dan Jaringan Telekomunikasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kabupaten Barito Selatan terdiri dari PNS 36 orang.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

7.1. Sumber dan Jumlah Anggaran yang dianggarkan untuk pelaksanaan kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 sebesar Rp. 65.297.943.300,00 dengan yang direaliasasikan sebesar Rp. 63.062.135.891,60 atau sebesar 96,57 %.

7.2. Sumber Pendanaan berasal dari Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018 dengan Biaya Kontrak Rp.76.824.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

7.3. Sumber Pendanaan berasal dari Anggaran Belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018 Biaya Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Rp. 350.000.00,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

8. Jangka Waktu Kerjasama

8.1. Jangka waktu Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan selama 1 tahun.

8.2. Jangka waktu kerjasama 12 Bulan.

8.3. Jangka waktu kerjasama ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

9. Hasil (Output) Kerjasama

9.1. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu.

9.2. Tersedianya Jasa, layanan Servisces dan Jaringan Telekomunikasi

9.3. Terlaksananya Assisment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018.

10. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Kerjasama Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dari RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh akan tetap berlanjut di tahun mendatang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tetap melaksanakan kerjasama Jasa, layanan Servisces dan Jaringan Telekomunikasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tetap berlanjut.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi

Forum Koordinasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/233/2017 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Tahap II Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji, Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017.

2. Materi Koordinasi

Materi koordinasi yang dilaksanakan adalah melaksanakan rencana pembangunan, melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan melaksanakan tugas

lain yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Instansi Vertikal yang Terlibat

Instansi vertikal yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain :

- BPN / ATR Kabupaten Barito Selatan
- Kepolisian Resort Buntok
- Kejaksaan Negeri Buntok
- Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran bersumber dari APBD-P Belanja Langsung Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 1.994.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah*)

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

SOPD Penyelenggara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Tahap II Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji, Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui unit kerja Bagian Pemerintahan.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai yang menangani Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Tahap II Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji, Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 pada Bagian Pemerintahan :

Pegawai Menurut Kualifikasi

No	IJASAH	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S 2)	-
2	Sarjana S-1	3
3	Sarjana Muda (D3)	-
4	SLTA	2
5	SLTP	-
6	SD	-

Pegawai Menurut Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah (Orang)
1	IV	1
2	III	2
3	II	2
4	I	-

Pegawai Menurut Jabatan

No	ESELON	Jumlah (Orang)
1	II	-
2	III	1
3	IV	1
4	Non Eselon	3

7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Irigasi Tahap II Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji, Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 adalah melalui Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan Pembebasan Tanah Untuk Bendungan D.I Uwang.

8. Hasil dan Manfaat Koordinasi

Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji,

Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017.

9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi

Hasil dari pelaksanaan Pengadaan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Sekunder Pada Bendungan D.I Uwang Di Desa Muka Haji, Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 ini akan dilaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi pada tahun anggaran 2018 yang di laksanakan oleh Balai Wilayah II Sungai dan Air Kalimantan Tengah.

10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Penerima ganti kerugian pada pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi bendungan d.i uwang di desa muka haji, desa tabak kanilan dan desa kayumban kecamatan gunung bintang awai kabupaten barito selatan tahun 2017 berjumlah 68 Orang dengan jumlah 69 persil dengan luas tanah yang dibebaskan seluas 6,4597 Ha dan jumlah dana yang dibayarkan sebesar Rp. 1.369.889.708,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah*)

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten / Kota dan Provinsi.

Tidak ada sengketa batas wilayah desa / kelurahan hanya ada inventarisasi Segmen Batas Wilayah Desa antara :

1. Desa Ruhing Raya dengan Desa Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa Ruhing Raya dan Desa Sarimbuah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten

Barito Selatan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017. Batas Desa Ruhing Raya dan Desa Sarimbuah Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari Pertigaan Desa Ruhing Raya dengan Desa Sarimbuah dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan terletak pada Hulu Ruhing dengan koordinat 01° 35'30,9"LS dan 115° 05' 06,7"BT yang ditandai oleh PBU 1 dan berakhir pada PBU-07 dengan koordinat 01° 34' 59,0"LS dan 115° 01' 59,4" BT yang merupakan batas pertigaan Desa Ruhing Raya dengan Desa Sarimbuah dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terletak pada Muara Sungai Ruhing Hulu.

2. Desa Tabak Kanilan dengan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017. Batas Desa Tabak Kanilan dan Desa Kayumban Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari Pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Kayumban dan Desa Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan terletak pada tepi jalan Km. 18 Perusahaan PT. Sindo Lumber yang ditandai dengan PBU-01 dengan koordinat 01° 30' 22,4" LS dan 115° 03' 48,2" BT dan berakhir pada PBU-06 yang merupakan batas pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Kayumban dan Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terletak pada Labaru Pusi tepi Sungai Uwa koordinat 01° 33' 40,1" LS dan 115° 01' 56,4" BT.
3. Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa Tabak Kanilan dan Desa Muka Haji yang

difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017. Batas Desa Tabak Kanilan dan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari Pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Desa Tamparak Bundar Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan terletak pada tepi jalan Km. 21 Perusahaan PT. Sindo Lumber muara jalan Mangkare yang ditandai dengan PBU-01 dengan koordinat 01° 30' 03,4" LS dan 115° 05' 10,1" BT dan berakhir pada PBU-07 yang merupakan batas pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Muka Haji dan Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terletak pada Muara Muara Sungai Ruhing Hulu dengan koordinat 01° 33' 55,1" LS dan 115° 04' 10,8" BT.

4. Desa Sire dengan Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Desa Sire dan Desa Ruhing Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017. Batas Desa Sire dan Desa Ruhing Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari Pertigaan Desa Sire dengan Desa Ruhing Raya dan Desa Muka Haji Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan terletak pada tepi Sei Punsung yang ditandai dengan PBU-01 dengan koordinat 01° 34' 06,4" LS dan 115° 04' 54,1" BT dan berakhir pada PBU-02 yang merupakan batas pertigaan Desa Tabak Kanilan dengan Desa Sire dan Desa Ruhing Raya dan Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai yang terletak pada Sei Bakung dengan koordinat 01° 30' 25,6" LS dan 115° 05' 17,3" BT.

2. Sengketa Batas Kabupaten

1. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan pemerintah Kabupaten barito timur membuat kesepakatan dalam berita acara kesepakatan rapat melaksanakan Invetarisasi batas daerah antara Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur dan telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat untuk penyelesaian batas daerah.
2. Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 24 Pebruari 2017 bahwa dimulai dari: pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat 02° 31' 23.313" LS dan 114° 51' 31.416" BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(median line*) Sungai Barito sampai pada TK.02 dengan koordinat 02° 33' 59.613" LS dan 114° 49' 41.446" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(median line*) Sungai Barito sampai pada TK.03 dengan koordinat 02° 34' 43.539" LS dan 114° 48' 23.470" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as *(median line*) Sungai Barito sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang ditandai oleh TK.04 dengan koordinat 02° 35' 29.566" LS dan 114° 47' 50.285" BT.
3. Penetapan batas daerah antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dengan

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dengan dimulai dari pertigaan batas antara Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara ditandai oleh PBU 00 dengan koordinat 01º 19' 09,510" LS dan 114º 40' 05,090" BT yang merupakan batas antara Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dengan Desa Tarusan Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan dan Desa Ruji Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara; dan diakhiri pada PBU 44 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.01 dengan koordinat 02° 35' 29,566" LS dan 114° 47' 50,285" BT yang terletak pada batas Desa Palangkau Baru Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dengan Desa Tabatan Kecamatan Jenamas Kabupaten Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Pada Tahun 2018 Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 dengan dimulai dari Pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat 01^0 37'13.537" LS dan $115^0$21'43.429"BT, TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 02 dengan koordinat 01^0 36'33.327"LS dan $115^0$19'55.117"BT, TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^0$36'43.983"LS dan $115^0$19'50.287"BT, TK 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $01^0$37'05.113"LS dan $115^0$19'51.680"BT, TK 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $01^0$37'24.079"LS dan $115^0$19'35.778"BT, TK 05

selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 06 dengan koordinat 01^0 37'6.255" LS dan 115^0 19' 28.407" BT, TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung gunung sampai pada TK 07 dengan koordinat 01^0 38'40.782" LS dan 115^0 18' 52.152" BT, TK 07 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 08 dengan koordinat $01^0$38' 37.513" LS dan $115^0$18'06.526" BT, TK 08 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 09 dengan koordinat 01^0 38' 28.313" LS dan $115^0$15' 43.607" BT, TK 09 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat 01^0 38' 27.860" LS dan $115^0$15'16.237" BT, TK 10 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 11 dengan koordinat 01°38'39.317" LS dan 115°13'48.82"BT, TK 11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 12 dengan koordinat $01^0$38'24.790" LS dan $115^0$12'50.400" BT, TK 12 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat $01^0$38'24.040" LS dan $115^0$11'23.700" BT, TK 13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 14 dengan koordinat $01^0$38'24.320" LS dan $115^0$09'54.110" BT, TK 14 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 01 dengan koordinat $01^0$38'26.200"LS dan 115^0 08'52.700" BT yang terletak pada tepi Barat ruas Jalan Negara Ampah – Muara Teweh pada batas Desa Ugang Sayu Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Baruyan Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur; a. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat $01^0$38'13.658"LS dan $115^0$07'45.391"BT, TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 16 dengan koordinat $01^0$38'27.916" LS dan 115^0 04' 54.904" BT, TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 17 dengan koordinat $01^0$39'12.472" LS dan $115^0$03'48.133" BT, TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai

pada TK 18 dengan koordinat $01^0$39'57.874"LS dan $115^0$02'36.005"BT, TK 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan MTU sampai pada TK 19 dengan koordinat $01^0$41'03.542"LS dan $115^0$01'43.197"BT, TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $01^0$42'26.595"LS dan $115^0$00'24.713"BT, TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 21 dengan koordinat $01^0$43'14.013"LS dan $114^0$59'30.318"BT, TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $01^0$44'26.200"LS dan $114^0$59'12.200"BT yang terletak pada batas Desa Mangaris Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sumber Rejo Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur; 3. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 22 dengan koordinat $01^0$45'26.320"LS dan $114^0$58'19.500"BT, TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 23 dengan koordinat $01^0$46'25.860"LS $114^0$57'27.700"BT, TK 23 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 24 dengan koordinat $01^0$47'21.300"LS dan $114^0$6'39.600"BT, TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 25 dengan koordinat $01^0$48'13.100"LS dan $114^0$56'18.700"BT, TK 25 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat $01^0$49'08.620"LS dan $114^0$56'24.700"BT, TK 26 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 27 dengan koordinat $01^0$50'19.720"LS dan $114^0$56'10.800"BT, TK 27 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat $01^0$51'43.240"LS dan $114^0$56'18.100"BT, TK 28 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 29 dengan koordinat 01^0 53' 13.090"LS dan $114^0$56'21.300"BT, TK 29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 30 dengan koordinat 01^0 54'25.990"LS dan $114^0$56'26.400"BT, TK 30 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 31 dengan koordinat $01^0$55'43.720"LS dan $114^0$56'26.200"BT, TK 31 selanjutnya ke arah Selatan

sampai pada TK 32 dengan koordinat $01^0$57'23.440"LS dan $114^0$56'26.400"BT, TK 32 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 33 dengan koordinat 01°58'30.680"LS dan 114°56'28.700"BT, TK 33 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 34 dengan koordinat $01^0$58'34.711"LS dan $114^0$56'28.056"BT yang terletak di as (*median line*) Sungai Karau, TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Karau sampai pada TK 35 dengan koordinat 01°59'59.240"LS dan 114°56'22.400"BT, TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 36 dengan koordinat $01^0$01'29.710"LS dan $114^0$56'06.830"BT, TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 03 dengan koordinat $01^0$02'49.780"LS dan $114^0$55'53.200"BT yang terletak pada batas Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Tampulangit Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur; PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 37 dengan koordinat $01^0$04'05.250"LS dan $114^0$55'41.700"BT, TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 38 dengan koordinat $01^0$05'23.219"LS dan $114^0$30.702"BT, TK 38 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as *Median Line*) Sungai Hulu Napu sampai pada TK 39 dengan koordinat $01^0$06'28.669"LS dan $114^0$55'48.948"BT, TK 39 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $01^0$06'30.850"LS dan $114^0$55'56.500"BT, TK 40 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai pada TK 41 dengan koordinat $01^0$09'10.153"LS dan $114^0$55'21.996"BT, TK 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai pada TK 42 dengan koordinat 01°10'06.135"LS dan 114°54'48.234"BT, TK 42 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 43 dengan koordinat $01^0$10'06.960"LS dan $114^0$54'49.300"BT, TK 43 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 44 dengan

koordinat 01°10'57.093"LS dan 114°55'41.381"BT, TK 44 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 45 dengan koordinat 01^0 11'15.209" LS dan 114^0 55' 53.670" BT, TK 45 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 46 dengan koordinat 01°13'36.669"LS dan 114°55'01.565"BT,TK 46 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 47 dengan koordinat 01°13'04.514"LS dan 114°56'38.981"BT, TK 47 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Napu sampai TK 48 dengan koordinat 01°14'29.180"LS dan 114°54'51.394"BT, TK 48 selanjutnya ke rah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Sirau sampai TK 49 dengan koordinat 01°14'25.577"LS dan 114°55'07.560"BT, TK 49 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 50 dengan koordinat 01^0 15'04.750"LS dan $114^0$55'33.300"BT, TK 50 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 51 dengan koordinat 01°17'02.900"LS dan 114°56'27.800"BT, TK 51 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 52 dengan koordinat $01^0$18'31.250"LS dan $114^0$57'08.820"BT, TK 52 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 53 dengan koordinat 01°19'16.083"LS dan 114°57'29.847"BT, TK 53 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 54 dengan koordinat $01^0$20'02.580"LS dan $114^0$57'51.800"BT, TK 54 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 55 dengan koordinat 01°22'07.546"LS dan 114°58'46.823"BT, TK 55 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 56 dengan koordinat $01^0$22'57.430"LS dan $114^0$59'30.100"BT, TK 56 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 57 dengan koordinat $01^0$23'34.265"LS dan $114^0$59'57.406"BT.

Peta Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

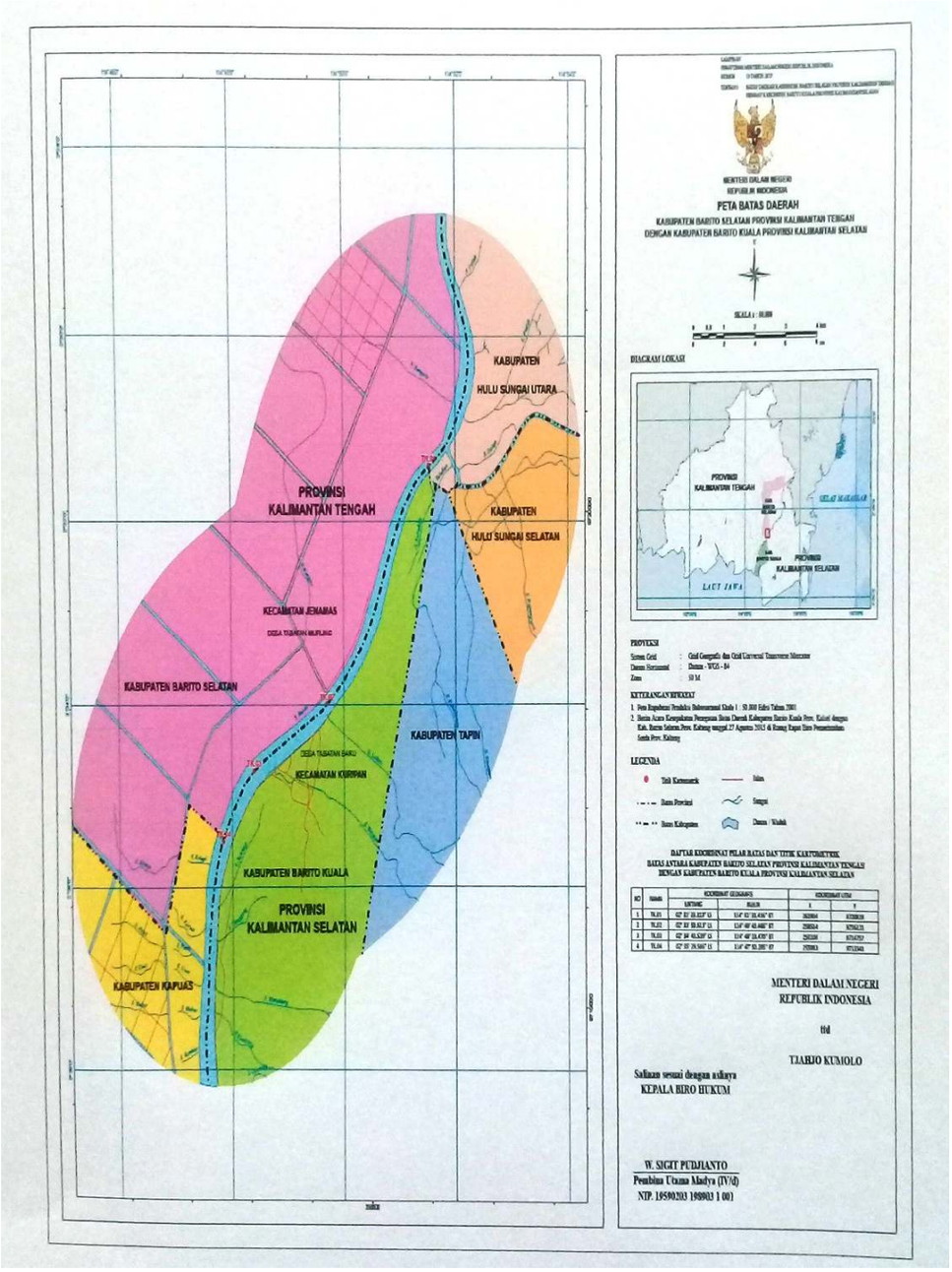

Peta Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan
Kabupaten Barito Selatan

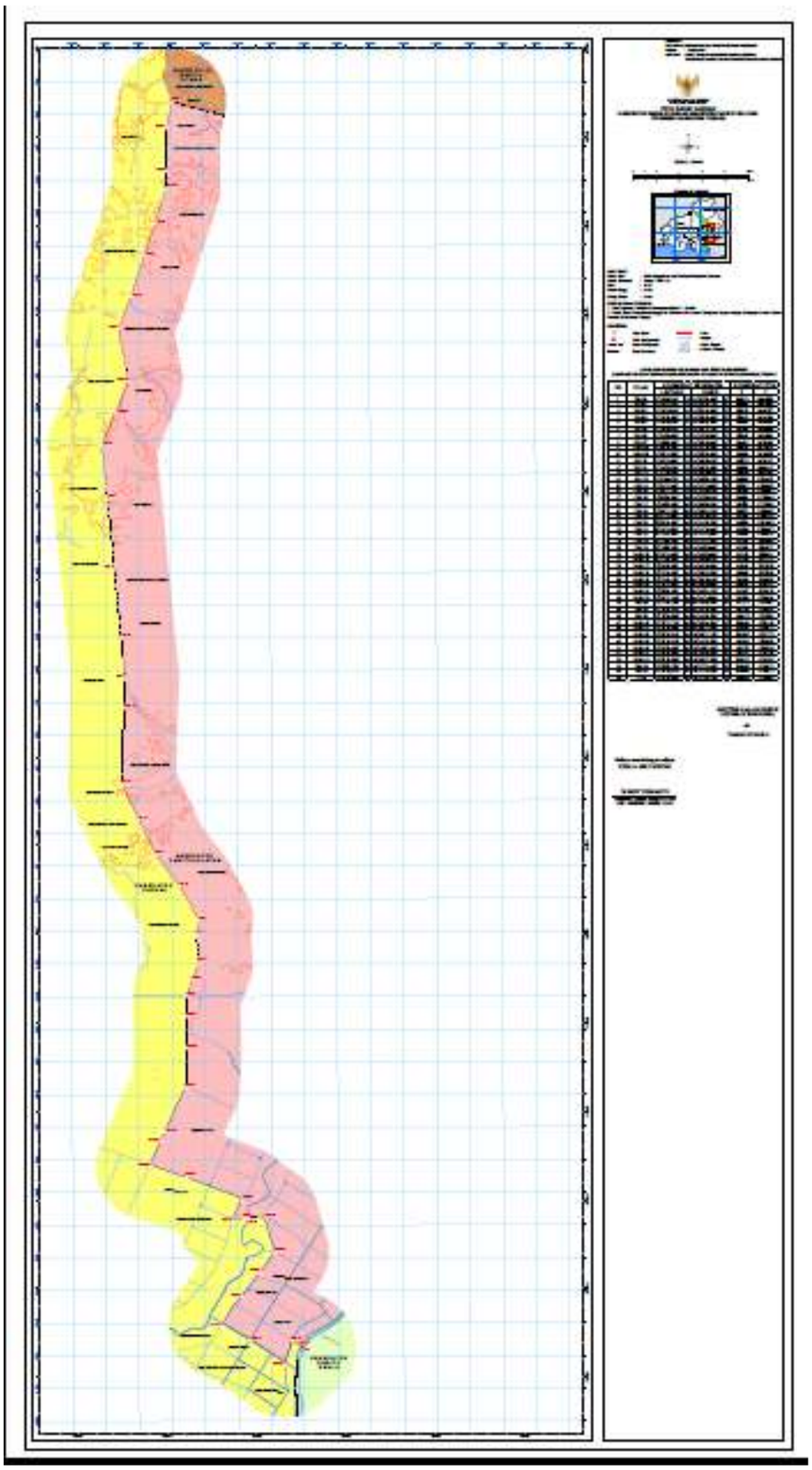

Peta Batas Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Barito Timur
Provinsi Kalimantan Tengah

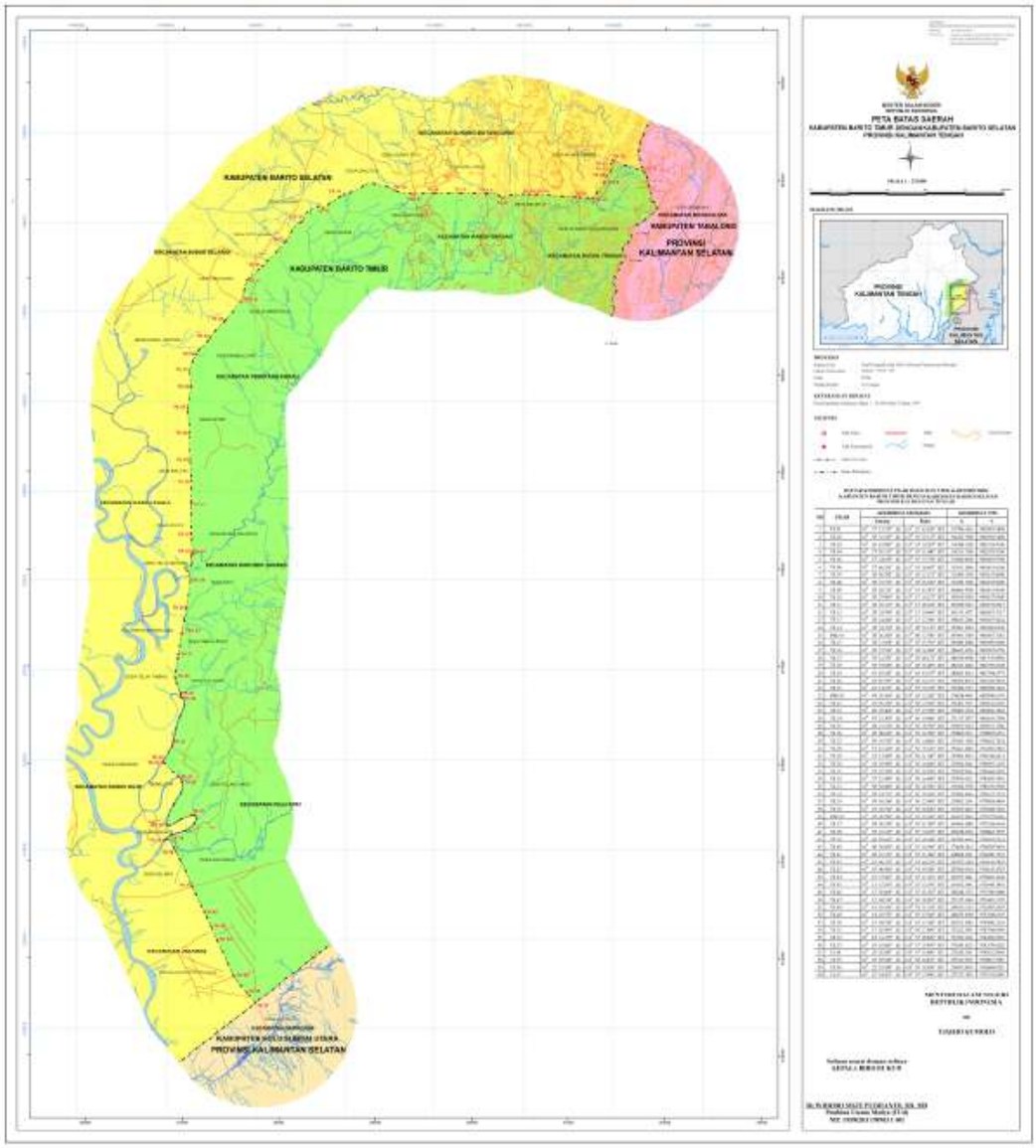

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Kabupaten Barito Selatan dengan kondisi Geografis ± 80 % merupakan daerah berawa-rawa dan berada dibawah permukaan laut, sehingga tidak dapat dihindari setiap tahun selalu rawan bencana yang terjadi antara lain :

- Banjir

- Tanah Longsor
- Kebakaran Hutan, Lahan, dan Pekarangan
- Angin Puting Beliung

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Barito Selatan antara lain :

- Mengadakan Sosialisasi Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Penanggulangan bencana
- Membuat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Rawan Bencana
- Menyusun Profil Daerah Rawan Bencana (Peta Rawan Bencana)
- Mengadakan Kegiatan Posko Siaga Bencana
- Pendataan Dampak Bencana
- Mengadakan Pelatihan untuk Aparatur Penanggulangan Bencana
- Menyalurkan Bantuan untuk Korban Bencana
- Mengendalikan Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana

2. Status Bencana

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2018 masih berstatus bencana regional atau bencana lokal, yang jumlah korban dan besaran wilayah bencana masih bisa diatasi dan ditanggani Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana bagi penanganan bencana di Kabupaten Barito Selatan selain berasal dari dana APBD Kabupaten juga berasal dari dana sharing dengan APBD Provinsi dan APBN. Sedangkan alokasi anggaran bencana alam yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.980.456.129,00 (*dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan*

rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.953.524.636,00 (*dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juat lima ratus dua empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) atau 99,05 % melalui dinas teknis yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Antisipasi Pemerintah Daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana :

- Mengadakan Sosialisasi Kesiapsiagaan, Mitigasi dan Penanggulangan bencana
- Membuat Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Rawan Bencana
- Menyusun Profil Daerah Rawan Bencana (Peta Rawan Bencana)
- Mengadakan Kegiatan Posko Siaga Bencana
- Pendataan Dampak Bencana
- Mengadakan Pelatihan untuk Aparatur Penanggulangan Bencana
- Menyalurkan Bantuan untuk Korban Bencana
- Mengendalikan Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Penanggulangan Bencana

SKPD penyelenggara penanggulangan bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pengarah, tim komando atau koordinator yang membawahi unsur Kepolisian, TNI, Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan, Satpol-PP dan Instansi terkait lain yang di dalam rencana kerjanya terdapat kegiatan yang menyangkut masalah penanggulangan bencana.

6. **Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Adapun pegawai yang menangani bencana yang ada pada Badan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah seperti pada tabel berikut dibawah ini :

Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	IJASAH	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S 2)	-
2	Sarjana S-1	9
3	Sarjana Muda (D3)	2
4	SLTA	9
5	SLTP	-
6	SD	-

Pegawai Menurut Golongan

No	GOLONGAN	Jumlah (Orang)
1	IV	2
2	III	12
3	II	6
4	I	-

Pegawai Menurut Jabatan

No	ESELON	Jumlah (Orang)
1	II	-
2	III	1
3	IV	4
4	Non Eselon	15

7. **Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana**

Berdasarkan Peraturan Darah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, lembaga Pemerintah Daerah yang khusus menangani bencana adalah Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pada tahun 2018 diterbitkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/264/2018 tanggal 10 Juli 2018 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan ini berkenaan dengan terdapatnya titik panas *(hotspot)* yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas dibentuklah Pos Komando Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 188.45/265 tanggal 11 Juli 2018 yang bertugas anatara lain :

a. Melaksanakan upaya pengumpulan data/informasi daerah rawan kebakaran.
b. Melaksanakan penilaian bahaya dan penentuan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
c. Melaksanakan pengembangan skenario Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.
d. Menyusun kebijakan dan strategis Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, serta
e. Membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) Siaga Darurat kebakaran Hutan dan Lahan.

8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Keadaan alam di Kabupaten Barito Selatan dengan luas 702.009,90 Km² terletak antara 1°20 dan 2°35 lintang selatan, 114° dan 115° Bujur Timur, diapit oleh tiga Kabupaten tetangga yaitu di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Utara, di sebelah timur dengan Kabupaten Barito Timur, disebelah selatan dengan Kabupaten Kapuas, dan Provinsi Kalimantan Selatan dan disebelah barat dengan Kabupaten Kapuas.

Kemungkinan bencana yang diperkirakan terjadi di kKabupaten Barito Selatan diantaranya banjir dan angin rebut juga kebakaran lahan maupun hutan.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus

Tahun 2018 Kabupaten Barito Selatan tidak melaksanakan pengelolaan Kawasan Khusus yang mana kewenangan tersebut sudah ditangani oleh Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota.

2. Satus Kepemilikan Kawasan

3. Sumber Anggaran

4. Permasalahan yang Dihadapi

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang Terjadi

Masih terdapat pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha antara lain penambangan galian c, sarang burung walet dan warung / toko.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Adapun data keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018

sejumlah 143 (Seratus empat puluh tiga) orang Pegawai yang terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) orang PNS dan 46 (empat puluh enam) orang Pegawai Banpol/Kontrak, dengan perincian sebagai berikut.

Jumlah Pegawai PNS / CPNS Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana	3
2.	Sarjana S-1	20
3.	Sarjana Muda (DIII)	5
4.	SLTA / Sederajat	66
5.	SLTP	2
6.	SD	1

Jumlah Pegawai PNS / CPNS Menurut Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	5
2.	III	28
3.	II	62
4.	I	2

Jumlah Pejabat Struktural Menurut Eselon

No	Golongan	Jumlah
1.	II	1
2.	III	4
3.	IV	11
4.	V	-

Jumlah Pegawai PHT dan Banpol / Kontrak Menurut Kualifikasi Pendidikan

No	Golongan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana S-1	5
3.	Sarjana Muda (D.III)	-
4.	SLTA / Sederajat	41
5.	SLTP	-
6.	SD	-

Untuk membantu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebkaran Kabupaten ditunjuk dari PNS dan Honor Satpol.PP Kecamatan di 6 (enam) Kecamatan berjumlah 20 orang masing – masing sebagai berikut :

- Kecamatan Dusun Selatan 4 (Empat) orang anggota
- Kecamatan Dusun Utara 4 (Empat) orang anggota
- Kecamatan Gunung Bintang Awai 4 (Empat) orang anggota
- Kecamatan Karau Kuala 4 (Empat) orang anggota
- Kecamatan Jenamas 4 (Empat) orang anggota

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan gangguan ketertiban dan ketentraman yaitu melaksanakan penertiban secara rutin diwilayah Kabupaten Barito Selatan, untuk wilayah Kota Buntok dilaksanakan setiap sedangkan untuk wilayah diluar kota Buntok dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

Kendala yang dihadapi dalam penanggulan gangguan ketertiban dan ketentraman antara lain:

- Sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih terbatas
- Dana operasional dalam melakasanakan tugas dan fungsi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah Perda serta dan Perbup yang perlu ditertibkan
- Belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Di lihat dari segi luas wilayah dan letak geografis anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih kekurangan personil.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum bekerjasama dengan pihak Kepolisian, baik kegiatan penertiban

maupun kegiatan hari – hari besar Agama maupun kegiatan Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber anggaran dalam melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum bersumber dari APBD yaitu sebesar Rp. 3.397.239.100,00 (*Tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*).

BAB VII

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan satu instrumen dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai bahan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia disamping melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan tata cara pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Laporan ini disampaikan sebagai ***progress report*** yang menggambarkan situasi dan kondisi serta harapan dan cita-cita pendirian daerah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Kondisi demikian itu, sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk mampu

mengembangkan dan menyelenggarakan amanat rakyat yang ditugaskan kepada Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari tugas dimaksud, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan arti dan ruang lingkup arah dan kebijakan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana Keuangan Tahunan Daerah yang berisi pemikiran atau tafsiran yang diharapkan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan merupakan Indikator keberhasilan dari yang ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Pembiayaan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam struktur APBD, komponennya terdiri dari sumber Penerimaan Daerah yang meliputi sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 19 November 2019

Kepada

Yth. Bupati / Walikota
Se – Kalimantan Tengah
di-
TEMPAT

Nomor : 700/617 /IV-a/2019/INSP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi yang telah divalidasi oleh Tim Nasional EPPD dijabarkan sebagai berikut:

Peringkat	Kabupaten/Kota	Skor	Prestasi
1	Barito Utara	3,2203	Sangat Tinggi
2	Murung Raya	3,1651	Sangat Tinggi
3	Palangka Raya	3,1152	Sangat Tinggi
4	Kotawaringin Barat	3,0538	Sangat Tinggi
5	Kapuas	3,0356	Sangat Tinggi
6	Kotawaringin Timur	3,0156	Sangat Tinggi
7	Lamandau	3,0141	Sangat Tinggi
8	Sukamara	2,9590	Tinggi
9	Seruyan	2,9562	Tinggi
10	Barito Timur	2,9376	Tinggi
11	Barito Selatan	2,9334	Tinggi
12	Pulang Pisau	2,9158	Tinggi
13	Katingan	2,8454	Tinggi
14	Gunung Mas	2,8293	Tinggi

Laporan lengkap tentang hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 tersebut sebagaimana terlampir agar dapat dipelajari dan ditindaklanjuti guna memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp: (0536) 322000, Fax: (0536) 3222845
www.kalteng.go.id